

RANCANGAN
30 DESEMBER 2009

RANCANGAN
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2010-2014



KEMENTERIAN PERTANIAN
2009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR BOKS	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum Pembangunan Pertanian Tahun 2005-2009	2
1.1.1 Indikator Makro	4
1.1.2 Produksi Komoditas Pertanian	8
1.1.3 Pendukung Peningkatan Produksi	10
1.2 Potensi, Permasalahan dan Tantangan	13
1.2.1 Potensi Pertanian Indonesia	13
1.2.2 Permasalahan	17
1.2.3 Tantangan Pembangunan Pertanian 2010-2014	31
II. VISI, MISI, TUJUAN DAN TARGET UTAMA	
KEMENTERIAN PERTANIAN	40
2.1 Visi Kementerian Pertanian	40
2.2 Misi Kementerian Pertanian	40
2.3 Tujuan	41
2.4 Target Utama dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian	41
2.4.1 Target Utama Kementerian Pertanian	41
2.4.1.1 Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	43
2.4.1.2 Peningkatan Diversifikasi Pangan	53

2.4.1.3	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor	57
2.4.1.4	Peningkatan Kesejahteraan Petani	60
2.4.2	Sasaran Makro	65
2.4.2.1	Produk Domestik Bruto (PDB)	65
2.4.2.2	Neraca Perdagangan	65
2.4.2.3	Investasi Pertanian	66
2.4.2.4	Tenaga Kerja	67
2.4.2.5	Nilai Tukar Petani (NTP)	67
III.	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	68
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	68
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian	76
3.2.1	Arah Kebijakan Kementerian Pertanian	76
3.2.2	Strategi Kementerian Pertanian	78
3.2.2.1	Revitalisasi Lahan	79
3.2.2.2	Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan	81
3.2.2.3	Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana	82
3.2.2.4	Revitalisasi Sumberdaya Manusia	83
3.2.2.5	Revitalisasi Pembiayaan Petani	83
3.2.2.6	Revitalisasi Kelembagaan Petani	84
3.2.2.7	Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir	85
3.2.3	Program dan Kegiatan Kementerian Pertanian	87
3.2.4	Dukungan Sektor Lain untuk Pembangunan Pertanian	94
3.2.5	Pembiayaan Pembangunan Pertanian	98
	PENUTUP	100
	LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian 2005-2009	5
Tabel 1.2	Tenaga Kerja Pertanian	5
Tabel 1.3	Nilai Tukar Petani (NTP)	6
Tabel 1.4	Neraca Perdagangan Pertanian	6
Tabel 1.5	Realisasi Investasi PMDN Sektor Pertanian	7
Tabel 1.6	Realisasi Investasi PMA Sektor Pertanian	7
Tabel 1.7	Produksi Komoditas Tanaman Pangan	9
Tabel 1.8	Produksi Komoditas Hortikultura	9
Tabel 1.9	Produksi Komoditas Perkebunan	9
Tabel 1.10	Produksi Komoditas Peternakan	10
Tabel 2.1	Komoditas Unggulan Nasional	43
Tabel 2.2	Peningkatan Produksi Komoditas Pangan Utama, 2010-2014	44
Tabel 2.3	Sasaran Produksi Komoditas Pangan Utama	45
Tabel 2.4	Sasaran Produksi Tanaman Pangan	46
Tabel 2.5	Sasaran Produksi Hortikultura	46
Tabel 2.6	Sasaran Produksi Perkebunan	47
Tabel 2.7	Sasaran Produksi Peternakan	48
Tabel 2.8	Proyeksi Kebutuhan Pupuk Sektor Pertanian	48
Tabel 2.9	Target Perluasan Areal Lahan Pertanian 2 Juta Hektar, 2010-2014	49

Tabel 2.10	Indikator Utama, Strategi dan Rencana Aksi Pencapaian	
	Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	49
Tabel 2.11	Sasaran Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	55
Tabel 2.12	Sasaran Konsumsi Komoditas Pangan Utama, 2010-2014	55
Tabel 2.13.	Indikator Utama, Strategi dan Rencana Aksi Peningkatan	
	Diversifikasi Pangan	56
Tabel 2.14.	Indikator Utama, Strategi dan Rencana Aksi Peningkatan	
	Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor Produk Pertanian	58
Tabel 2.15.	Indikator Utama, Strategi dan Rencana Aksi Peningkatan	
	Kesejahteraan Petani	63
Tabel 2.16.	Target Pertumbuhan PDB Sektor dan	
	Sub Sektor Pertanian	65
Tabel 2.17.	Target Neraca Perdagangan Pertanian	66
Tabel 2.18.	Target Investasi PMDN dan PMA	66
Tabel 2.19.	Target Tenaga Kerja Pertanian	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Target Pembangunan dan Kebutuhan Pendanaan Untuk Tahun 2010-2014, Kementerian Pertanian	97
Lampiran 2. Sasaran Produksi Padi Tahun 2010-2014	128
Lampiran 3. Sasaran Produksi Jagung Tahun 2010-2014	129
Lampiran 4. Sasaran Produksi Kedelai Tahun 2010-2014	130
Lampiran 5. Sasaran Produksi Kacang Tanah 2010-2014	131
Lampiran 6. Sasaran Produksi Kacang Hijau Tahun 2010-2014	132
Lampiran 7. Sasaran Produksi Ubi Kayu Tahun 2010-2014	133
Lampiran 8. Sasaran Produksi Ubi Jalar Tahun 2010-2014	134
Lampiran 9. Sasaran Produksi Cabe Tahun 2010-2014	135
Lampiran 10. Sasaran Produksi Bawang Merah Tahun 2010-2014	136
Lampiran 11. Sasaran Produksi Kentang Tahun 2010-2014	137
Lampiran 12. Sasaran Produksi Mangga Tahun 2010-2014	138
Lampiran 13. Sasaran Produksi Pisang Tahun 2010-2014	139
Lampiran 14. Sasaran Produksi Jeruk Tahun 2010-2014	140
Lampiran 15. Sasaran Produksi Durian Tahun 2010-2014	141
Lampiran 16. Sasaran Produksi Manggis Tahun 2010-2014	142
Lampiran 17. Sasaran Produksi Rimpang Tahun 2010-2014	143
Lampiran 18. Sasaran Produksi Tanaman Hias Tahun 2010-2014	144
Lampiran 19. Sasaran Produksi Karet Tahun 2010-2014	145
Lampiran 20. Sasaran Produksi Kelapa Sawit Tahun 2010-2014	146
Lampiran 21. Sasaran Produksi Kakao Tahun 2010-2014	147

Lampiran 22. Sasaran Produksi Jambu Mete Tahun 2010-2014	148
Lampiran 23. Sasaran Produksi Kapas Tahun 2010-2014	149
Lampiran 24. Sasaran Produksi Nilam Tahun 2010-2014	150
Lampiran 25. Sasaran Produksi Tembakau Tahun 2010-2014	151
Lampiran 26. Sasaran Produksi Jarak Pagar Tahun 2010-2014	152
Lampiran 27. Sasaran Produksi Cengkeh Tahun 2010-2014	153
Lampiran 28. Sasaran Produksi Lada Tahun 2010-2014	154
Lampiran 29. Sasaran Produksi Kelapa Tahun 2010-2014	155
Lampiran 30. Sasaran Produksi Teh Tahun 2010-2014	156
Lampiran 31. Sasaran Produksi Kopi Tahun 2010-2014	157
Lampiran 32. Sasaran Produksi Tebu Tahun 2010-2014	158
Lampiran 33. Sasaran Produksi Daging Sapi Tahun 2010-2014	159
Lampiran 34. Sasaran Produksi Susu Tahun 2010-2014	160
Lampiran 35. Sasaran Produksi Daging Kerbau Tahun 2010-2014	161
Lampiran 36. Sasaran Produksi Daging Kambing Tahun 2010-2014	162
Lampiran 37. Sasaran Produksi Daging Domba Tahun 2010-2014	163
Lampiran 38. Sasaran Produksi Daging Babi Tahun 2010-2014	164
Lampiran 39. Sasaran Produksi Daging Ayam Buras Tahun 2010-2014	165
Lampiran 40. Sasaran Produksi Daging Itik Tahun 2010-2014	166
Lampiran 41. Proyeksi Kebutuhan Pupuk Sektor Pertanian 2010-2014	167
Lampiran 42. Target Perluasan Areal Pertanian 2 Juta Ha Tahun 2010-2014	
Untuk Lahan Sawah 250.000 Ha	168
Lampiran 43. Target Perluasan Areal Pertanian 2 Juta Ha Tahun 2010-2014	
Untuk Lahan Kering 400.000 Ha	169

Lampiran 44.Target Perluasan Areal Pertanian 2 Juta Ha Tahun 2010-2014	
Untuk Lahan Hortikultura 400.000 Ha	170
Lampiran 45.Target Perluasan Areal Pertanian 2 Juta Ha Tahun 2010-2014	
Untuk Lahan Perkebunan 585.430 Ha	171
Lampiran 46.Target Perluasan Areal Pertanian 2 Juta Ha	
Tahun 2010-2014 Untuk Lahan Kebun Hijauan Makanan	
Ternak (HMT) 351.000 Ha	172
Lampiran 47.Target Perluasan Areal Pertanian 2 Juta Ha Tahun 2010-2014	
Untuk Lahan Padang Penggembalaan 13.570 Ha	173
Lampiran 48.Rancangan Pengembangan Industri Hilir Pertanian	174
Lampiran 49.Rancangan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,	
2010-2014	174

DAFTAR BOKS

Boks 1.1	Permasalahan Mendasar Sektor Pertanian	17
Boks 1.2	Tantangan Pembangunan Pertanian	32
Boks 2.1	Empat Target Utama Kementerian Pertanian, 2010-2014	42
Boks 3.1	Kaitan antara Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan Strategi Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014	75
Boks 3.2	Tujuh Gema Revitalisasi	78
Boks 3.3	Pokok-pokok Reformasi Perencanaan dan Penganggaran	88

KATA PENGANTAR

(foto Mentan)

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2010-2014 ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan Menteri Kabinet menyusun rencana pembangunan jangka menengah di bidangnya masing-masing dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selanjutnya sesuai tahapan perencanaan pembangunan nasional, Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014 yang final akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian setelah ditetapkannya Peraturan Presiden tentang RPJMN 2010-2014 yang diperkirakan pada bulan Januari 2010.

Rancangan Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014 ini dapat diunduh di website Kementerian Pertanian, beralamat: www.deptan.go.id. Kepada semua pihak kami harapkan dapat memberi saran, masukan dan perbaikan terhadap rancangan Renstra ini melalui alamat email: pkproren@gmail.com atau fax ke: (021) 7804156/7890625 paling lambat 29 Januari 2010.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Desember 2009
Menteri Pertanian

SUSWONO

I. PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan capital; penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi; penyerap tenaga kerja; sumber devisa negara; sumber pendapatan; serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian seperti meningkatnya jumlah penduduk; tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar; pesatnya kemajuan teknologi dan informasi; makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi; perubahan iklim global; perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat; kecilnya status dan luas kepemilikan lahan; masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan; masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh; masih rawannya ketahanan pangan dan energi; masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian maka pembangunan pertanian ke depan menghadapi banyak tantangan.

Tantangan pembangunan pertanian Indonesia ke depan antara lain bagaimana memenuhi kebutuhan pangan serta keseimbangan gizi keluarga; memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan; meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian; membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil; memperkuat kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan; menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif; membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan

kesuburan tanah; mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; menciptakan kebijakan harga (*pricing policies*) yang proporsional untuk produk-produk pertanian khusus; mengupayakan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan; memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global; serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian selama lima tahun ke depan (2010-2014). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi pembangunan pertanian dan selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini seyogyanya dijadikan acuan dan arahan bagi Jajaran Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2010-2014 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Reformasi perencanaan dan penganggaran 2010-2014 mengharuskan Kementerian/Lembaga untuk merestrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka *performance based budgeting*. Untuk itu, dokumen ini dilengkapi dengan indikator kinerja sehingga akuntabilitas pelaksana beserta organisasinya dapat dievaluasi selama periode tahun 2010-2014.

1.1 Kondisi Umum Pembangunan Pertanian 2005-2009

Melanjutkan kemajuan pembangunan pertanian yang telah dicapai sebelumnya, selama periode 2005-2009 pembangunan pertanian juga terus mencatat berbagai keberhasilan. Salah satu yang patut disyukuri dan membanggakan adalah Indonesia berhasil mencapai swasembada beras sejak tahun 2007, serta swasembada jagung

dan gula konsumsi rumah tangga di tahun 2008. Mapannya produksi beras yang merupakan pangan utama dalam negeri sangat membantu menstabilkan harga pangan, sehingga Indonesia bisa terhindar dari krisis pangan yang melanda banyak negara pada periode yang sama tersebut. Krisis pangan lebih terasa pada saat terjadinya krisis keuangan global yang berdampak pada meningkatnya harga pangan internasional terutama di negara-negara produsen. Secara umum harga komoditas pangan dalam negeri lebih stabil jika dibandingkan dengan harga internasional. Di sisi lain, surplus produksi beras memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengeksport beras, yang sudah barang tentu akan meningkatkan pendapatan petani dan citra pertanian Indonesia.

Selain produksi padi yang meningkat dan bahkan mencapai swasembada, selama periode pembangunan lima tahun terakhir pembangunan pertanian juga mencatat sejumlah keberhasilan seperti: peningkatan produksi beberapa komoditas pertanian, ketersediaan energi dan protein, membaiknya skor Pola Pangan Harapan (PPH), dan semakin banyaknya hasil penelitian dan pengembangan pertanian. Selama tahun 2005-2008, rata-rata pertumbuhan produksi yang cukup tinggi setiap tahunnya ditunjukkan oleh tebu (3,82%), kelapa sawit (8,88 %), kakao (2,24%), daging sapi (5,53%), daging ayam broiler (6,52%), mangga (14,22%), durian (8,77%), bawang merah (5,23 %) dan anggrek (28,79%). Ketersediaan energi dan protein per kapita meningkat sebesar 0,45% untuk energi dan 1,98% untuk protein. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) meningkat dari 74 pada tahun 2006 menjadi 81,9 pada tahun 2008. Di bidang penelitian dan pengembangan, telah dihasilkan 191 varietas unggul padi, 46 varietas unggul jagung, dan 64 varietas unggul kedelai, serta inovasi pola tanam, pemupukan, bioteknologi, PHT, alat mesin pertanian, dan lain sebagainya.

Pada tataran makro, pembangunan pertanian juga memperlihatkan kinerja yang menggembirakan. PDB sektor pertanian terus tumbuh dan mencapai 5,16% di tahun 2008. Pada tahun 2008, neraca perdagangan pertanian mencatatkan surplus sebesar US\$ 17, 97 milyar yang telah melampaui target yang ditetapkan sebesar US\$ 13,13 milyar. Angkatan kerja pertanian mencapai lebih dari 40 juta orang setiap

tahun selama 2005-2009. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja nasional.

Semua capaian pembangunan pertanian ini merupakan bentuk nyata dari hasil kerja keras dan kerjasama yang baik dan terus menerus dari para pelaku pembangunan pertanian, yaitu petani, penyuluh, pelaku usaha di bidang pertanian bersama dengan Pemerintah (pusat dan daerah). Sektor pertanian kembali membuktikan dapat bertahan menghadapi terpaan krisis ekonomi sebagaimana yang dialami Indonesia pada tahun 1997.

Kondisi umum pembangunan pertanian di Indonesia selama tahun 2005-2009 secara lebih lengkap dapat dilihat dari capaian indikator makro, produksi komoditas pertanian, dan pencapaian kinerja pertanian lainnya yang akan digambarkan berikut ini.

1.1.1 Indikator Makro

1.1.1.1 Produk Domestik Bruto (PDB)

Sektor pertanian memperlihatkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Selama 2005-2009, pertumbuhan PDB pertanian (di luar perikanan dan kehutanan) memperlihatkan kenaikan setiap tahunnya yaitu rata-rata 3,30%. Meski di awal periode masih dibawah target, tetapi pertumbuhan PDB pertanian terus meningkat, bahkan di tahun 2008 berhasil melampaui target yang ditetapkan (Tabel 1.1).

Tabel 1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian

TAHUN	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
2005	3,20	2,50
2006	3,40	3,20
2007	3,60	3,40
2008	3,60	5,16
2009	3,80	3,57 *
Rata-rata	3,52	3,30

Keterangan : * angka sementara

1.1.1.2 Tenaga Kerja

Dari besarnya angka tenaga kerja, pertanian masih tetap menjadi sektor andalan mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Besarnya angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian tentu saja memberatkan pertanian primer sehingga diperlukan upaya keras untuk mendorong perpindahan tenaga kerja pertanian primer ke sektor industri pertanian atau non pertanian. Jumlah tenaga kerja pertanian (pertanian, perikanan, dan kehutanan) berada pada kisaran 40% dari angkatan kerja nasional dan cenderung terus meningkat setiap tahunnya selama periode 2005-2009 (Tabel 1.2).

Tabel 1.2 Tenaga Kerja Pertanian

Tahun	Tenaga Kerja (Orang)		Total Tenaga Kerja (orang)	Pangsa Pertanian Terhadap Total (%)	Tidak Bekerja (orang)	Angkatan Kerja Nasional (orang)
	Pertanian**	Non Pertanian				
2005	41,309,776	52,648,611	93,958,387	43,97	11,899,266	105,857,653
2006	40,136,242	55,320,693	95,456,935	42,05	10,932,000	106,388,935
2007	41,206,474	58,723,743	99,930,217	43,66	10,011,142	109,941,359
2008	41,331,706	61,221,044	102,552,750	40,30	9,394,515	111,947,265
2009*	43,029,493	61,455,951	104,485,444	41,18	9,258,964	113,744,408

Keterangan: * angka sementara (Peb 2009), ** mencakup pertanian, perikanan dan kehutanan)

Sumber : BPS

1.1.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Selama tahun 2005-2009, rata-rata NTP mencatat angka mendekati 100 yang menunjukkan bahwa yang dibelanjakan petani masih lebih besar dari yang didapatkan. Meskipun NTP belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari kesejahteraan petani, namun NTP sampai saat ini masih merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani (Tabel 1.3).

Tabel 1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

	2005	2006	2007	2008	2009*
NTP	93,5	95,73	100,00	98,99	100,79

Keterangan : * sampai dengan Oktober 2009, Tahun 2007 sebagai tahun dasar.
Sumber: BPS.

1.1.1.4 Neraca Perdagangan

Realisasi neraca perdagangan pertanian, selama periode 2005-2009, tumbuh sangat mengesankan. Pada Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa tahun 2005, surplus neraca perdagangan baru US\$ 6.447,51 juta, namun tiga tahun kemudian telah naik tiga kali lipat menjadi US\$ 17.971,575 juta di tahun 2008.

Tabel 1.4 Neraca Perdagangan Pertanian

Subsektor	2005	2006	2007	2008	2009*
	(US\$ 000)				
Tanaman Pangan	-1.828.396	-2.304.299	-2.440.098	- 3.178.047	- 1.798.179
Hortikultura	-139.451	-289.352	-541.081	- 476.942	- 558.361
Perkebunan	9.140.665	12.296.997	16.588.468	22.830.613	11.918.345
Peternakan	- 725.306	-801.457	-947.928	- 1.204.049	- 1.022.479
Pertanian	6.447.513	8.901.889	12.659.361	17.971.575	8.539.327

Keterangan: * angka kumulatif s/d September 2009.

Sumber : BPS diolah Pusdatin Deptan.

1.1.1.5 Investasi

Investasi pertanian salah satunya dapat dilihat dari realisasi investasi PMDN dan PMA. Dari Tabel 1.5 dan Tabel 1.6 dapat dilihat bahwa investasi pertanian sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 cenderung meningkat. Tahun 2008 terjadi krisis keuangan global yang juga dialami oleh Indonesia sehingga realisasi investasi pertanian baik PMDN maupun PMA menurun. Namun demikian, melihat realisasi investasi PMDN dan PMA di tahun 2009 (sampai bulan September) yang sudah melebihi tahun 2008, menunjukkan bahwa daya tarik investasi pertanian Indonesia sudah membaik kembali. Pada dasarnya investasi pertanian yang dominan sebenarnya berasal dari petani, namun sangat disayangkan sampai saat ini belum ada perhitungan yang dapat memperlihatkan investasi petani ini.

Tabel 1.5 Realisasi Investasi PMDN Sektor Pertanian

Subsektor	2005	2006	2007	2008*	2009**
(Rp Milyar)					
Pertanian	3.178,9	3.558,6	3.674,0	1.235,0	1.392,4
Total Primer	5.577,2	3.599,8	4.377,40	1.758,1	3.152,4
Pertumb. Pertanian (%)		11,94	2,48	-66,39	-

Sumber: Pusdatin * angka sampai September 2009

Tabel 1.6 Realisasi Investasi PMA Sektor Pertanian

Subsektor	2005	2006	2007	2008*	2009**
(US\$ Juta)					
Pertanian	224,3	370,7	264,80	151,9	37,9
Total Primer	402,03	533,0	599,30	335,5	362,1
Pertumb. Pertanian (%)		65,27	-28,57	- 42,63	-

Keterangan: * angka sampai September 2009, ** angka target

Sumber: Pusat Data Pertanian.

1.1.2 Produksi Komoditas Pertanian

Capaian produksi komoditas pertanian selama tahun 2005-2008 telah menunjukkan prestasi sangat baik, antara lain: peningkatan produksi padi dari 57,16 juta ton tahun 2007 menjadi 60,33 juta ton pada tahun 2008, atau meningkat 3,69 %, sehingga terjadi surplus 3,17 juta ton GKG, dan mendorong beberapa perusahaan untuk mengeksport beras kelas premium. Target produksi padi 2009 sebesar 63,5 juta ton, sementara berdasarkan ARAM III (Juni 2009) produksi padi telah mencapai 63,8 juta ton atau mencapai 100,5 % dari target tahun 2009. Peningkatan produksi ini telah menempatkan Indonesia meraih kembali status swasembada beras sejak tahun 2007 dan terhindar dari krisis pangan seperti terjadi di banyak negara ketika krisis keuangan global melanda dunia. Keberhasilan swasembada ini sudah diakui dunia dan bahkan banyak negara menyatakan keinginan untuk mempelajari strategi yang telah diterapkan Indonesia. Peningkatan produksi jagung juga cukup pesat, mencapai 9,98%, dari 12,52 juta ton tahun 2005 menjadi 16,32 juta ton tahun 2008. Target produksi jagung 18,0 juta ton pada tahun 2009, sementara berdasarkan ARAM III (Juni 2009) produksi jagung telah mencapai 17,66 juta ton.

Peningkatan produksi komoditas penting lainnya selama periode 2005-2008 juga menunjukkan hasil yang menggembirakan yaitu: tebu (3,82%), kelapa sawit (8,88%), jambu mete (7,80 %), mangga (14,22 %), anggrek (28,79 %), sapi potong (5,53%), ayam ras pedaging (6,52%) dan telur (10,17%). Sejak tahun 2008 Indonesia sudah swasembada untuk komoditas gula konsumsi langsung rumah tangga, sementara swasembada gula untuk industri ditargetkan tercapai pada tahun 2014.

Produksi komoditas pertanian selama tahun 2005-2008, khususnya komoditas pangan utama dan komoditas unggulan yang didorong pertumbuhannya secara nasional dapat dilihat pada Tabel 1.7, Tabel 1.8, Tabel 1.9 dan Tabel 1.10.

Tabel 1.7 Produksi Komoditas Tanaman Pangan

NO	KOMODITAS	2005	2006	2007	2008	2009*	Pertumbuhan 2005-2008 (%)
		(ribu ton)					
1.	Padi	54.151	54.455	57.157	60.326	63.840	3,69
2.	Jagung	12.524	11.609	13.288	16.317	17.659	9,98
3.	Kedele	808	748	593	776	966	0,90
4.	Kacang Tanah	836	838	789	770	785	-2,67
5.	Kacang Hijau	321	316	322	298	314	-2,37
6.	Ubi Kayu	19.321	19.987	19.988	21.757	22.376	4,10
7.	Ubi Jalar	1.857	1.854	1.887	1.882	2.027	0,45

Sumber: BPS, * Aram III.

Tabel 1.8 Produksi Komoditas Hortikultura

NO	KOMODITAS	2005	2006	2007	2008	2009*	Pertumbuhan 2005-2008 (%)
		(ribu ton)**					
1.	Kentang	1.009	1.012	1.003	1.071	1.073	2,06
2.	Cabe	1.058	1.185	1.129	1.159	1.177	3,31
3.	Bawang Merah	733	795	803	853	862	5,23
4.	Mangga	1.413	1.622	1.819	2.105	2.137	14,22
5.	Pisang	5.178	5.037	5.454	6.004	6.095	5,21
6.	Durian	566	748	595	682	693	8,77
7.	Jeruk	2.214	2.566	2.626	2.467	2.505	4,06
8.	Rimpang	328	417	444	399	425	7,82
9.	Anggrek	7.902	10.903	9.485	15.309	15.375	28,79

Sumber: BPS, *) angka target, **) kecuali Anggrek dalam bentuk batang

Tabel 1.9 Produksi Komoditas Perkebunan

NO	KOMODITAS	2005	2006	2007	2008*	2009**	Pertumbuhan 2005-2008 (%)
		(ribu ton)					
1.	Kelapa Sawit	11.862	17.351	17.665	18.089	19.440	8,88
2.	Karet	2.271	2.637	2.755	2.922	3.040	1,59
3.	Kelapa	3.097	3.131	3.193	3.247	3.258	2,02
4.	Kakao	749	769	740	793	850	2,24
5.	Kopi	640	682	677	683	689	2,10
6.	Jambu Mete	135	149	146	143	133	7,80
7.	Tebu	2.242	2.307	2.624	2.801	2.850	3,82
8.	Tembakau	153	146	165	170	173	2,92
9.	Cengkeh	79	62	80	81	83	8,88

Keterangan: * angka sementara, **aAngka estimasi

Sumber: Pusat Data Pertanian dan Direktorat Jenderal Perkebunan, Deptan.

Tabel 1.10 Produksi Komoditas Peternakan

NO	KOMODITAS	2005	2006	2007	2008	2009*	Pertumbuhan 2005-2008 (%)
		(ribu ton)					
1.	DAGING :	1.439	1.598	1.577	1.684	1.704	6,93
	- Sapi	359	396	339	392	404	5,53
	- Ayam Buras	301	341	295	273	283	1.49
	- Broiller	779	861	943	1019	1.017	6,52
2.	TELUR :	1.052	1.204	1.369	1.324	1.404	10,17
	- Ayam buras	175	194	218	167	174	4,07
	- Ayam ras	681	817	944	956	1013	13,43
	- Itik	195	194	207	201	217	4,00
3.	SUSU	536	616.5	568	647	679	2,66

Keterangan: * angka sementara.

Sumber : Pusat Data Pertanian.

1.1.3 Pendukung Peningkatan Produksi

Selain dalam bentuk indikator makro dan produksi, kinerja Kementerian Pertanian dapat dilihat dari capaian dalam bentuk dukungan peningkatan produksi, antara lain sebagai berikut:

1.1.3.1 APBN Kementerian Pertanian

Selama periode tahun 2004-2009, alokasi APBN ke Kementerian Pertanian memperlihatkan peningkatan yang cukup tajam. APBN Kementerian Pertanian tercatat sebesar Rp 2,9 trilyun di tahun 2004, kemudian meningkat hampir tiga kali lipat menjadi Rp 8,17 trilyun di tahun 2009.

Anggaran subsidi pertanian juga meningkat pesat. Subsidi pupuk meningkat dari Rp 1,5 trilyun pada tahun 2004 menjadi Rp 18,74 trilyun di tahun 2009, yang terbagi untuk subsidi harga gas dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP). Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemakaian benih bagi petani, maka subsidi benih juga meningkat dari Rp 173,5 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp 1,32 triliun pada tahun 2009. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian juga meningkat dari Rp 170 milyar di tahun 2005 menjadi Rp 1,5 trilyun di tahun 2009.

1.1.3.2 Pembangunan Infrastruktur Pertanian

Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, Kementerian Pertanian telah melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian yang mencakup: Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT); Jaringan Irigasi Desa (JIDES); Tata Air Mikro (TAM); Jalan Usaha Tani (JUT), Jalan Produksi, konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS), embung, sawah, sumur, dam parit, dan konservasi lahan.

Dari tahun 2004 sampai 2009, telah dibangun JITUT seluas 388.106 ha; JIDES seluas 227.282 ha; TAM seluas 116.702 ha; optimasi, konservasi dan reklamasi lahan seluas 80.457 ha, JUT dan jalan produksi sepanjang 3.992,24 km, konservasi DAS Hulu seluas 30.050 ha; perluasan sawah sebanyak 82.514 ha; embung sebanyak 1.885 unit; sumur serapan sebanyak 2.469 unit; dan Dam Parit sejumlah 295 unit. Di samping itu, selama periode yang sama juga telah dikembangkan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebanyak 3.941 unit.

1.1.3.3 Pembangunan Kelembagaan dan Penguatan Modal Petani

Bantuan penguatan modal dan pengembangan kelembagaan merupakan upaya untuk mengatasi keterbatasan modal dan kapasitas yang dimiliki petani. Melalui kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat - Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP), satu unit Gapoktan dapat menerima bantuan penguatan modal sebesar Rp 100 juta. Sampai tahun 2008 telah diberikan bantuan penguatan modal kepada 10.542 Gapoktan. Untuk tahun 2009, sebanyak 10.000 Gapoktan ditargetkan akan menerima bantuan BLM-PUAP.

1.1.3.4 Pengolahan Produk Pertanian dan Pengembangan Pasar

Untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar, maka usahatani tidak cukup hanya sampai tahap menghasilkan produk primer saja, melainkan harus dilakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran. Dalam upaya mendorong kegiatan pengolahan dan pemasaran oleh petani, selama periode 2005-2009, Kementerian Pertanian telah melakukan pembangunan pasar tani di 32 Kabupaten/Kota, Sub

Terminal Agribisnis (STA) 61 Kabupaten/Kota di 16 Provinsi, Pasar Ternak 74 Kabupaten/Kota di 25 Provinsi; pengembangan pengolahan hasil hortikultura di 116 Kabupaten/Kota, pengolahan hasil perkebunan di 40 Kabupaten/Kota, dan pengolahan pakan ternak di 78 Kabupaten/Kota, pengolahan susu di 27 Kabupaten/Kota, pengolahan daging di 88 Kabupaten/Kota. Inseminasi Buatan (IB) 300 unit, dan pelayanan investasi hortikultura di 32 kawasan di Indonesia.

1.1.3.5 Ketahanan Pangan

Secara umum, pembangunan ketahanan pangan 2005-2008 memperlihatkan kecenderungan yang membaik, yaitu ketersediaan energi meningkat 2,6% per tahun dan ketersediaan protein meningkat 2,7% per tahun. Tingkat ketersediaan energi sudah mencapai 3.032 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein sekitar 76,9 gram/kap/hari. Selain itu, jumlah dan kualitas konsumsi masyarakat juga sudah mencapai Angka Kecukupan Gizi, yang ditandai dengan peningkatan skor PPH. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) meningkat dari 74 pada tahun 2006 menjadi 81,9 pada tahun 2008. Target skor PPH di tahun 2010 adalah 89,4.

1.1.3.6 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian yang telah berhasil dicapai Kementerian Pertanian selama ini. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan Kementerian Pertanian selama tahun 2005-2009 mencatat keberhasilan inovasi teknologi yang mencakup: 196 varietas unggul padi; 46 varietas unggul jagung; 64 varietas unggul kedelai; 7 galur baru kambing, domba, ayam dan itik; 13 teknologi vaksin; 8 antigen; 10 kit diagnostik dan teknik pengujian penyakit; dan 15 varietas unggul baru (VUB) tebu. Selanjutnya, juga telah dikembangkan inovasi pola tanam; pendekatan pengelolaan tanaman terpadu (PTT) yang adopsinya dipercepat dengan Sekolah Lapang (SL-PTT), dimana sejak tahun 2008 dilaksanakan melalui SL-PTT padi, jagung dan kedelai; sistem integrasi tanaman

ternak bebas limbah (SITTBL); pemupukan, pupuk produk bio; bioteknologi; PHT; alsintan; dan pasca panen; dan lain-lain.

1.1.3.7 Subsidi Bunga untuk Kredit Petani

Salah satu keterbatasan petani untuk pengembangan usahatani adalah modal. Dalam upaya membantu petani mengatasi masalah kesulitan modal, Kementerian Pertanian mengembangkan berbagai skim kredit pertanian, seperti: Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pembangunan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), serta memperluas pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Subsidi bunga yang disediakan untuk masing-masing skim kredit tersebut bervariasi antara 8-10%. Khusus untuk KUPS, beban bunga bagi peminjam ditetapkan sebesar 5 persen. Sementara untuk KUR, meskipun menggunakan bunga komersial tetapi mensyaratkan agunan yang relatif kecil.

Subsidi bunga program revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) yang dimulai sejak tahun 2006 telah berhasil meningkatkan serapan kredit perbankan sebesar Rp. 4,0 triliun sampai dengan tahun 2008. Bunga kredit yang diberikan kepada pekebun sebesar 10% dan selisih bunga menjadi beban Pemerintah. Luas areal yang telah dicapai melalui Skim KPEN-RP sebesar 115.169 ha yang meliputi kelapa sawit (111.977 ha), karet (1.972 ha) dan kakao (1.220 ha). Jumlah petani peserta program revitalisasi perkebunan ini telah mencapai 53.299 orang mulai dari tahun 2006 sampai 2009.

1.2 Potensi, Permasalahan dan Tantangan

1.2.1 Potensi Pertanian Indonesia

1.2.1.1 Keanekaragaman Hayati dan Agroekosistem

Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah (*mega biodiversity*), termasuk plasma nutfah. *Bio-diversity* darat Indonesia merupakan terbesar nomor

dua di dunia setelah Brasil, sedangkan bila termasuk kelautan maka Indonesia nomor satu dunia. Keaneka ragaman hayati yang didukung dengan sebaran kondisi geografis, berupa dataran rendah dan tinggi serta limpahan sinar matahari, intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, serta keaneka ragaman jenis tanah memungkinkan dibudidayakannya aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis maupun komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun di Indonesia.

Aneka ragam dan besarnya jumlah plasma nutfah tanaman dan hewan yang sudah beradaptasi dengan iklim tropis merupakan sumber materi genetik yang dapat direkayasa untuk menghasilkan varietas dan klon tanaman unggul serta bangsa ternak. Hal ini dapat dilihat dengan beragamnya jenis komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sudah sejak lama diusahakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat.

1.2.1.2 Lahan Pertanian

Indonesia memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian lahan potensi tersebut merupakan lahan sub optimal seperti lahan kering, rawa, lebak, pasang surut dan gambut yang produktivitasnya relatif rendah, karena kendala kekurangan dan kelebihan air, tingginya kemasaman/salinitas, jenis tanah yang kurang subur serta keberadaan lahan di daerah lereng dataran menengah dan tinggi. Namun apabila keberadaan lahan sub optimal tersebut dapat direkayasa dengan penerapan inovasi teknologi budidaya dan dukungan infrastruktur jalan dan irigasi, maka lahan tersebut dapat diubah menjadi lahan-lahan produktif. Di samping itu dapat pula dilakukan perluasan areal tanam melalui peningkatan intensitas pertanaman (IP) pada lahan subur beririgasi dengan varietas unggul baru umur super ultra genjah. Potensi tersebut merupakan peluang bagi peningkatan produksi tanaman dan ternak apabila dapat dirancang dengan baik pemanfaatannya.

Jumlah luasan dan sebaran hutan, sungai, rawa dan danau serta curah hujan yang cukup tinggi sesungguhnya merupakan potensi alamiah untuk memenuhi kebutuhan

air pertanian apabila dikelola dengan baik. Waduk, bendungan, embung dan air tanah serta air permukaan lainnya sangat potensial untuk mendukung pengembangan usaha pertanian, baik di lahan subur maupun lahan-lahan sub optimal. Dari luas daratan Indonesia, terdapat sekitar 94,1 juta ha lahan yang sesuai untuk pertanian tanpa mengganggu keseimbangan ekologis daerah aliran sungai, sedangkan yang sudah dijadikan lahan pertanian baru sekitar 63,7 juta ha. Dengan demikian masih terbuka peluang untuk perluasan areal pertanian sekitar 30,4 juta hektar dengan 24 juta ha diantaranya merupakan lahan subur untuk persawahan, perkebunan dan pengembangan komoditas lain, sedangkan 6,4 juta ha lainnya merupakan sawah pasang surut, lebak dan gambut yang masih memerlukan inovasi khusus. Di samping itu, hingga saat ini lahan pertanian terlantar jumlahnya cukup luas, yaitu sekitar 12,4 juta hektar.

1.2.1.3 Tenaga Kerja Pertanian

Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di pedesaan dan memiliki kultur budaya kerja keras, sesungguhnya merupakan potensi tenaga kerja untuk mendukung pengembangan pertanian. Hingga saat ini lebih dari 43 juta tenaga kerja masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Namun besarnya jumlah penduduk tersebut belum tersebar secara proporsional sesuai dengan sebaran luas potensi lahan serta belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mendukung pengembangan pertanian yang berdaya saing.

Apabila keberadaan penduduk yang besar di suatu wilayah dapat ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk dapat berkerja dan berusaha di sektor produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, maka penduduk Indonesia yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi aneka komoditas bagi pemenuhan kebutuhan pasar nasional dan dunia. Masih terdapat cukup potensi meningkatkan kapasitas aneka produksi komoditas pertanian melalui penempatan tenaga kerja terlatih di daerah yang masih kurang penduduknya dengan didukung oleh stimulus dalam bentuk penyediaan faktor produksi, bimbingan teknologi serta pemberian jaminan pasar yang baik.

1.2.1.4 Teknologi

Sesungguhnya saat ini sudah cukup banyak tersedia paket teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan produktifitas, kualitas dan kapasitas produksi aneka produk pertanian. Berbagai varietas, klon dan bangsa ternak berdaya produksi tinggi; berbagai teknologi produksi pupuk dan produk bio; alat dan mesin pertanian; serta aneka teknologi budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sudah cukup banyak dihasilkan para peneliti di lembaga penelitian maupun yang dihasilkan oleh masyarakat petani. Beberapa keberhasilan alih teknologi di sektor pertanian melalui program PRIMA TANI, SLPTT, P2BN, telah mampu menggiatkan kegiatan agribisnis spesifik lokasi. Namun demikian aneka paket teknologi ini masih belum sepenuhnya dapat diadopsi oleh masyarakat petani, karena berbagai keterbatasan yang dihadapi dan dimiliki petani seperti: proses diseminasi, kelembagaan dan skala usaha, keterampilan serta tingginya biaya untuk menerapkan teknologi.

1.2.1.5 Pasar dan Pertumbuhan Jumlah serta Daya Beli Penduduk

Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan pasar dalam negeri yang potensial bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani. Pada tahun 2009 jumlah penduduk Indonesia tercatat sebesar 230.632.700 jiwa dengan pertumbuhan 1,25 persen per tahun. Saat ini, tingkat konsumsi aneka produk hasil pertanian Indonesia, kecuali beras, gula dan minyak goreng, masih relatif rendah. Rendahnya tingkat konsumsi produk pertanian ini, terutama disebabkan masih rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk Indonesia sehingga mempengaruhi daya beli.

Seiring dengan keberhasilan pembangunan ekonomi yang saat ini tengah giat dijalankan, maka pendapatan per kapita penduduk juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan di satu sisi, maka diharapkan juga terjadi peningkatan permintaan produk pertanian di sisi lain. Permintaan pasar domestik, di samping jumlahnya yang semakin meningkat, juga membutuhkan keragaman produk yang

bervariasi, sehingga akan membuka peluang yang lebih besar terhadap diversifikasi produk.

Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang pasar dalam negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan dengan berbasis pada keunggulan komparatif dan kompetitif, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian Indonesia.

1.2.2 Permasalahan

Persoalan mendasar yang dihadapi sektor pertanian pada saat ini dan di masa yang akan datang adalah meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; sedikitnya status dan kecilnya luas kepemilikan lahan; lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional; keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani; lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh; masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi; belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik; rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP), dan belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian.

Boks 1.1 Permasalahan Mendasar Sektor Pertanian

1. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global
2. Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air
3. Status dan luas kepemilikan lahan (9,55 juta KK < 0.5 Ha)
4. Lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional
5. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani
6. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh
7. Masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi
8. Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik
9. Rendahnya nilai tukar petani (NTP)
10. Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian
11. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian.

1.2.2.1 Dampak Perubahan Iklim Terhadap Penurunan Produksi Pertanian

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat celsius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2-3 persen per tahun. Dalam 5 tahun terakhir rata-rata luas lahan sawah yang terkena banjir dan kekeringan masing-masing sebesar 29.743 Ha terkena banjir (11.043 Ha diantaranya puso karena banjir) dan 82.472 Ha terkena kekeringan (8.497 Ha diantaranya puso karena kekeringan). Kondisi ini kecenderungannya akan terus meningkat pada tahun-tahun ke depan.

Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian.

1.2.2.2 Terbatasnya Infrastruktur, Sarana Prasarana, Lahan dan Air Pertanian

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaannya sangat memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumberdaya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai; pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan; pengembangan sumber-sumber air

alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah; pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa dan air hujan.

Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan berpendingin udara, laboratorium dan kebun percobaan bagi penelitian, laboratorium pelayanan uji standar dan mutu, pos dan laboratorium perkarantinaaan, kebun dan kandang untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian, balai-balai penyuluhan serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan sentra produksi, dan biaya pelayanan yang terjangkau.

Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Sistem distribusi yang belum baik serta margin harga dunia yang relatif tinggi dibandingkan dengan harga pasar domestik mengakibatkan banyak terjadinya praktek penyelundupan pupuk bersubsidi ke luar negeri. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu,

menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman/hewan yang ramah lingkungan.

1.2.2.3 Lemahnya Status dan Kecilnya Luas Penguasaan Lahan serta Tekanan Degradasi dan Alih Fungsi Lahan

Dari sisi skala penguasaan lahan, ternyata sejak tahun 1993, jumlah rumah tangga petani gurem yang kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 hektar meningkat dari 10,9 juta rumah tangga menjadi 13,7 juta rumah tangga pada tahun 2003 (Sensus Pertanian 2003). Adapun rata-rata kepemilikan lahan petani di pedesaan sebesar 0,41 ha dan 0,96 ha masing-masing di Jawa dan Luar Jawa, dan dalam periode 1995 – 2007 rata-rata kepemilikan lahan cenderung menurun (PASEK, 2008). Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Di sisi lain, menurunnya rata-rata luas kepemilikan lahan diikuti pula dengan meningkatnya ketimpangan distribusi kepemilikan lahan khususnya untuk agroekosistem persawahan di Jawa.

Status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan. Hingga saat ini sertifikat tanah yang telah diterbitkan baru mencapai jumlah 24,5 juta persil atau sekitar 30% dari seluruh persil yang ada di Indonesia (± 75 juta persil). Dari jumlah yang telah memperoleh sertifikat tersebut, 50% adalah tanah di perkotaan (pemukiman dan industri) yang luas arealnya tidak lebih dari 3 juta ha. Sedangkan lahan pertanian di pedesaan yang luasnya lebih dari 25 juta ha baru memperoleh sertifikat 50% dari seluruh sertifikat yang sudah diterbitkan atau ± 12 juta persil (HKTI, 2003). Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya kepemilikan dan lemahnya status penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas

usaha tani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, pengendalian pertumbuhan penduduk, reformasi agraria serta penguatan status kepemilikan lahan.

Revolusi hijau melalui penggunaan benih unggul produktivitas tinggi yang mensyaratkan penggunaan pupuk kimia dosis tinggi dan diabaikannya penggunaan pupuk organik telah mengakibatkan degradasi lahan yang menurunkan kapasitas produksi lahan pertanian. Kondisi ini semakin diperparah dengan menipisnya kearifan lokal dalam pengaturan pola tanam dan penggunaan pupuk organik. Struktur fisik dan kimia tanah di lahan pertanian, terutama lahan sawah menjadi masif dan kurang respon terhadap penggunaan input produksi, sehingga peningkatan produktivitas menjadi stagnan (*levelling off*) bahkan cenderung menurun. Tantangan ke depan untuk mengatasi dan mengantisipasi degradasi sumber daya lahan adalah bagaimana melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan secara teknis, dan biologis (vegetatif) melalui penerapan teknologi budidaya pertanian yang ramah lingkungan serta pengaturan dan pengendalian tata ruang kawasan.

Di sisi lain, pesatnya laju pembangunan nasional di berbagai bidang yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lahan telah membawa implikasi terhadap pelanggaran tata ruang dan pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan. Otonomi daerah juga telah mendorong peningkatan laju pertumbuhan permintaan/pemanfaatan lahan multi sektoral yang semakin meningkat. Kondisi tersebut pada kenyataannya sulit diimbangi dengan penyediaan lahan, baik melalui pemanfaatan lahan pertanian yang ada maupun pembukaan lahan baru.

Konversi sawah menjadi lahan non pertanian dari tahun 1999 – 2002 mencapai 563.159 ha atau 187.719,7 ha/tahun. Antara tahun 1981 – 1999, neraca pertambahan lahan sawah seluas 1,6 juta ha, namun antara tahun 1999 – 2002 terjadi pengurangan luas lahan seluas 0,4 juta ha atau 141.285 ha/tahun. Data BPS tahun 2004 menunjukkan bahwa besaran laju alih fungsi lahan pertanian dari lahan sawah ke non sawah sebesar 187.720 ha per tahun, dengan rincian alih fungsi ke non pertanian sebesar 110.164 ha per tahun dan alih fungsi ke pertanian lainnya

sebesar 77.556 ha per tahun. Adapun alih fungsi lahan kering pertanian ke non pertanian sebesar 9.152 ha per tahun.

Konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya. Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

1.2.2.4 Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional Belum Berjalan Optimal

Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi. Swasembada beras, jagung dan tebu yang telah dicapai selama ini, utamanya dikarenakan penggunaan benih unggul. Sampai saat ini, benih unggul banyak diimpor seperti: padi hibrida, sayuran dan tanaman hias, serta bibit sapi. Untuk bibit sapi, belum ada satu lembaga perbibitan yang menonjol.

Peran benih sebagai sarana utama agribisnis sangat penting. Agar usaha agribisnis dapat maju dan berkembang, maka sistem dan usaha perbenihan harus tangguh. Sistem perbenihan didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari: subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan selera masyarakat; subsistem produksi dan distribusi benih; subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan; dan subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM. Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen tersebut sangat dipengaruhi oleh komponen pendukung antara lain lembaga perbenihan,

sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, sistem informasi, dan kesadaran konsumen dalam menggunakan benih bermutu.

Saat ini, infrastruktur perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan investasi di perusahaan perbenihan/perbibitan. Di lain pihak, pemerintah sebagai pendorong kegiatan masyarakat juga kurang menunjukkan perhatian. Perlu ada upaya yang serius untuk membangkitkan kelembagaan perbenihan nasional mulai dari pusat sampai daerah, termasuk peningkatan kapasitas kemampuan penangkar benih lokal.

1.2.2.5 Terbatasnya Akses Petani Terhadap Sumber Permodalan

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan perusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Di sisi lain petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya akibatnya oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, sehingga petani lebih memilih “rentenir” yang menyediakan pinjaman modal dengan cepat walau dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga keuangan formal. Kondisi ini, pada akhirnya semakin memperburuk kondisi arus tunai (*cash flow*) dan kesejahteraan petani.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal yang kebanyakan berada di daerah perkotaan dengan masyarakat petani yang tersebar di pedesaan. Sementara menunggu perbankan lebih berpihak kepada pertanian, maka pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro di pedesaan perlu dilakukan. Pada akhirnya lembaga ini diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani pedesaan. Namun pengembangan lembaga ini membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan manajemen dan *seed capital* kepada

kelompok atau gabungan kelompok yang sudah benar-benar siap dirintis untuk tumbuh menjadi lembaga keuangan mikro di pedesaan.

1.2.2.6 Lemahnya Kapasitas dan Kelembagaan Petani dan Penyuluh

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air dan Subak dihadapkan pada tantangan ke depan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.

1.2.2.7 Masih Rawannya Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi

Tercapainya swasembada komoditas pangan utama seperti padi dan jagung pada kenyataannya belum menjamin kemampuan individu di tingkat rumah tangga untuk dapat memperoleh bahan pangan dengan jumlah yang cukup. Kondisi ini bukan saja disebabkan lemahnya daya beli sebagian anggota masyarakat terhadap bahan pangan, tetapi juga dalam arti yang sebenarnya di beberapa daerah terpencil distribusi bahan pangan sulit dilakukan, terutama pada musim paceklik. Sulitnya memperoleh bahan pangan akibat kemiskinan tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Secara teknis dan sosial ekonomis penyebab menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan yang pernah terjadi adalah diakibatkan oleh gagal panen, akibat bencana alam, perubahan iklim maupun serangan hama dan

penyakit maupun jatuhnya harga pasar produk yang dihasilkan petani. Di sebagian wilayah menurunnya daya beli petani terhadap pangan disebabkan oleh gagal panen atau anjoknya harga jual komoditas yang ditanam secara mono kultur.

Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah bagaimana membangun kelembagaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) masyarakat, terutama di daerah-daerah rawan pangan. Di samping itu pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan lumbung pangan, pola-pola integrasi komoditas, pengendalian hama terpadu maupun pengenalan iklim diharapkan dapat membantu masyarakat dari gagal panen yang dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan rumah tangga petani untuk memperoleh bahan pangan.

Dengan makin terbatasnya ketersediaan energi dari fosil, maka harus dicari sumber energi alternatif lain. Dari hasil penelitian, beberapa tanaman, seperti kelapa sawit, jagung, ubi kayu, tebu, tanaman jarak dan kotoran ternak dapat diolah menjadi sumber energi. Apabila energi sumber nabati ini dapat dikembangkan masyarakat terutama di pedesaan maka akan diciptakan masyarakat yang mandiri energy terutama untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga sehari-hari. Harus diakui bahwa sampai saat ini ongkos produksi energi terbarukan masih lebih mahal dibandingkan dengan energi fosil.

1.2.2.8 Belum Berjalannya Diversifikasi Pangan dengan Baik

Harapan Pangan adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, namun ketidakmampuan mengakses bahan pangan karena kemiskinan dan menurunnya daya beli masyarakat serta kurangnya pengetahuan keluarga terhadap konsumsi pangan dan gizi mengakibatkan belum tercapainya Pola Pangan Harapan (PPH) yang dicirikan dengan tingkat konsumsi energi, protein, lemak dan vitamin. Hingga saat ini konsumsi perkapita beras masih sangat tinggi, yaitu sekitar 139,15 kg/kapita/tahun. Dengan jumlah penduduk yang besar dan akan terus bertambah, maka dominasi beras dalam pola konsumsi pangan ini akan memberatkan upaya pemantapan pangan secara berkelanjutan di tingkat lokalita.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mendidik masyarakat untuk melakukan diversifikasi produksi dan konsumsi bahan pangan sesuai dengan skore PPH yang dicanangkan. Melalui tercapainya PPH diharapkan ketahanan pangan nasional akan dapat dicapai secara berkelanjutan. Di samping itu sumber daya alam yang tersedia dapat dikembangkan untuk mendorong komoditas pangan lain dan bahan baku industri yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta devisa negara.

1.2.2.9 Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)

Petani Indonesia pada umumnya tidak memiliki modal besar. Dengan usahatani berskala kecil dan subsisten, akses petani terhadap sumber permodalan menjadi terbatas. Kondisi ini ditambah dengan petani kurang memiliki fasilitas penyimpanan hasil pasca panen, sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Akibatnya banyak petani terlibat ke dalam sistem ijon dan/atau tengkulak. Meskipun hasil survei statistik menghasilkan perhitungan NTP di atas 100, dimana artinya penerimaan lebih besar dari pembelanjaan, tetapi nilai NTP saat ini masih sangat kecil untuk menyatakan bahwa kesejahteraan petani sudah baik.

1.2.2.10 Tekanan Globalisasi Pasar dan Liberalisasi Perdagangan

Dinamika perubahan lingkungan strategis internasional, sektor pertanian dihadapkan kepada persaingan pasar yang semakin kompetitif. Dengan diratifikasinya beberapa kesepakatan internasional, telah memaksa setiap negara membuka segala rintangan perdagangan dan investasi serta membuka ekspor-impor seluas-luasnya. Hal tersebut akan mendorong persaingan pasar yang semakin ketat karena terjadinya integrasi pasar regional/internasional terhadap pasar domestik.

Praktek perdagangan bebas yang cenderung menghilangkan perlakuan *non tariff barrier* telah berdampak besar terhadap sektor pertanian Indonesia, baik ditingkat mikro (usahatani) dan makro (nasional – kebijakan). Di tingkat mikro, liberalisasi

perdagangan ini sangat terkait dengan efisiensi, produktifitas dan skala usaha. Sedangkan di tingkat makro, kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi petani produsen dan masyarakat konsumen. Pada kenyataannya kelompok negara maju lebih berhasil dalam mengamankan petaninya agar tetap bergairah berproduksi, sementara negara-negara berkembang relatif kurang berhasil memproteksi petani produsen dan masyarakat konsumen.

Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan daya saing komoditas pertanian dengan karakteristik yang sesuai keinginan konsumen dan memiliki daya saing yang tinggi, baik pasar domestik, maupun pasar ekspor. Pengembangan daya saing dan ekspansi pasar komoditas ekspor tradisional harus lebih ditingkatkan, terutama pengembangan produk olahan. Di samping itu, pengembangan komoditas dan produk baru yang memiliki permintaan pasar yang tinggi juga harus dirintis.

1.2.2.11 Kuantitas dan Kualitas Produk Pertanian Belum Mendukung Berkembangnya Agroindustri

Upaya mewujudkan agroindustri yang berdaya saing dihadapkan pada permasalahan kurangnya kontinuitas pasokan bahan baku yang bermutu dan dalam jumlah yang sesuai kebutuhan kapasitas terpasang. Skala pengusahaan komoditas dalam skala yang kecil dan lokasinya tersebar, keragaman varietas/klon, penerapan teknologi budidaya dari pra panen sampai pasca panen yang beragam, waktu panen yang tidak sesuai dengan kapasitas kerja industri, keterbatasan sarana pergudangan yang dapat menjaga mutu produk serta jauh dan buruknya jalan distribusi dan sistem transportasi bahan baku kesemuanya merupakan faktor penyebab agroindustri belum dapat beroperasi secara efisien.

Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah bagaimana mengembangkan budidaya komoditas di *on-farm* yang sesuai dengan prasyarat agroindustri skala besar, memperbaiki infrastruktur transportasi hingga ke sentra produksi, mengembangkan agroindustri skala kecil di pedesaan yang terintegrasi dalam pengembangan yang berskala kawasan. Di samping itu kerja sama antar kawasan

untuk menumbuhkan agregat permintaan pasar dalam skala wilayah juga sangat diperlukan untuk mengembangkan agroindustri yang berlokasi di pusat-pusat pertumbuhan baru.

1.2.2.12 Minat Pemuda Terhadap Pertanian Semakin Menurun

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian, karena mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan semakin berkurangnya upaya pendampingan dalam bentuk penyuluhan pertanian. Di sisi lain, bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi, melihat kemiskinan di pedesaan telah menjadikan mereka kurang tertarik lagi bekerja dan berusaha di sektor pertanian, sehingga mengakibatkan semakin tingginya urbanisasi ke perkotaan. Kondisi ini hanya dapat ditekan dengan mengembangkan agroindustri pertanian di pedesaan, karena dapat membuka peluang keterlibatan peran seluruh pelaku, termasuk kelompok pemuda dan wanita di pedesaan. Kelompok ini sesungguhnya dapat lebih memegang peranan penting dalam seluruh proses produksi usaha tani seperti penyediaan dan distribusi sarana produksi, usaha jasa pelayanan alat dan mesin pertanian, usaha industri pasca panen dan pengolahan hasil, usaha jasa transportasi hasil pertanian, pengelolaan lembaga keuangan mikro, konsultan manajemen agribisnis serta tenaga pemasaran produk agroindustri.

Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah bagaimana memberikan kesempatan yang lebih luas kepada kelompok yang masih termarginalisasi ini untuk dapat beraktivitas di sektor pertanian *off-farm*. Beberapa bidang usaha yang sangat terbuka untuk dikembangkan adalah usaha penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, usaha penangkaran bibit dan benih, perbengkelan alat dan mesin pertanian, pelayanan jasa alsintan, konsultan penyuluhan pertanian, analisis kredit perbankan serta pengelolaan lembaga keuangan mikro di pedesaan.

1.2.2.13 Belum Padunya Antar Sektor dalam Menunjang Pembangunan Pertanian

Pembangunan sektor tidak bisa berdiri sendiri, melainkan melibatkan banyak sektor terkait. Pertemuan koordinasi antar sektor sudah sering dilakukan, hanya saja mengintegrasikan secara fisik kegiatan antar sektor sangat sulit dilaksanakan. Hal ini karena memerlukan waktu dan tenaga untuk menelaah kegiatan antar sektor, wilayah, komoditas, dan waktu, sehingga tidak tumpang tindih. Kebijakan fiskal yang tidak berpihak kepada penumbuhan industri pengolahan pertanian di dalam negeri, misalnya, menyebabkan hilangnya kesempatan bangsa Indonesia untuk menambah pendapatan dan memperluas lapangan kerja.

1.2.2.14 Kebijakan Fiskal dan Moneter Belum Mendukung Berkembangnya Usaha Pertanian

Sektor pertanian telah berperan besar dalam pembentukan PDB Nasional hingga mencapai 13-14 %, namun anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk sektor pertanian hanya sekitar 3 % dari APBN. APBN tersebut sangat dibutuhkan untuk membangun pertanian, terutama untuk mengatasi faktor kritis, yaitu penyediaan sarana-prasarana yang tidak diminati swasta atau tidak mampu disediakan oleh petani, pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pelayan pemerintah di bidang pertanian serta membantu mengatasi kegagalan pasar produk yang dihasilkan oleh petani.

Sementara di sektor formal, pengembangan pertanian dan agribisnis mutlak memerlukan dukungan agar tercipta iklim berusaha yang kondusif melalui formulasi kebijakan dan pengamalan kebijakan fiskal dan moneter yang dikeluarkan Pemerintah. Namun pada kenyataannya, beberapa kebijakan Pemerintah yang ditetapkan selama ini kurang sepenuhnya berpihak pada sektor pertanian, seperti Harga Pembelian Pemerintah (gabah) yang hanya sedikit di atas biaya produksi, pengendalian harga penjualan (beras) agar tidak memicu kenaikan inflasi,

pembebasan tarif bea masuk impor beberapa komoditas, serta pencegahan penyelundupan masuknya produk luar negeri belum berjalan maksimal.

Di sisi lain, beberapa kebijakan yang sudah ditetapkan juga belum berjalan efektif di tingkat lapangan, seperti Harga Pembelian Pemerintah yang lebih rendah dari harga pasar atau sebaliknya harga produk petani seringkali berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah, terutama pada saat panen raya di daerah-daerah sentra produksi. Pemberlakuan tarif bea masuk impor yang dilaksanakan selama ini juga belum efektif dalam melindungi produk petani domestik. Komoditas impor sering membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang lebih murah karena pemerintah negara-negara eksportir melindungi petaninya dengan memberikan aneka subsidi dari hulu sampai hilir. Kondisi demikian mengakibatkan insentif yang diterima petani belum optimal sesuai dengan yang diharapkan, sehingga kurang mendorong gairah petani untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usahatani.

Tantangan ke depan yang perlu dikembangkan adalah bagaimana membangun sistem perlindungan yang diberikan terhadap petani dan pelaku agribisnis secara lebih baik mulai dari aspek proses produksi sampai aspek pemasaran hasil melalui pola-pola promosi, asuransi, penjaminan maupun subsidi bunga kredit atau subsidi harga.

1.2.2.15 Kurang Optimalnya Kinerja dan Pelayanan Birokrasi Pertanian

Seperti kebanyakan institusi pemerintah pada umumnya, sumberdaya manusia aparat Pemerintah masih jauh dari memuaskan. Kondisi ini ditambah dengan penempatan aparatur Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak tepat dan sesuai dengan kompetensinya. Penyuluh yang merupakan ujung tombak pembangunan pertanian merupakan aparat Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota kurang memberikan perhatian pada peningkatan kemampuan, fasilitas dan sarana kerja

Di sisi lain, organisasi Kementerian Pertanian tidak sesuai/pas dengan SKPD pertanian yang ada di daerah sehingga perlu diselaraskan. Dengan diterbitkannya

PP No. 41 tahun 2007, maka terjadi perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk SKPD pertanian, nomenklatur ini tidak selaras dengan nomenklatur Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian. Hal ini berdampak pada banyaknya Satuan Kerja (Satker) Kementerian di Daerah. Karena jumlah Satker sangat besar, maka sulit melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Akibatnya persentasi jumlah pelaporan yang masuk dan serapan anggaran APBN pertanian masih relatif rendah.

1.2.3 Tantangan Pembangunan Pertanian 2010-2014

Disamping permasalahan mendasar, pembangunan pertanian ke depan menghadapi berbagai tantangan yang menyangkut produksi dan produktivitas, penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang, infrastruktur lahan dan air, perbenihan/perbibitan, pembiayaan, pemenuhan kebutuhan pangan, *Millenium Development Goals* (MDGs), kebijakan harga, kelembagaan usaha ekonomi produktif, penyuluhan, citra pertanian, dan persaingan global.

Boks 1.2 Tantangan Pembangunan Pertanian

- 1) Memperbaiki produktivitas dan nilai tambah produk pertanian di beberapa sentra produksi dengan menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan.
- 2) Penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah.
- 3) Memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan.
- 4) Membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil.
- 5) Pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan
- 6) Penciptaan *pricing policies* yang proporsional untuk produk-produk pertanian khusus.
- 7) Persaingan global serta pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global.
- 8) Memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.
- 9) Memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan.
- 10) Menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif.
- 11) Pemenuhan kebutuhan pangan, disamping pengembangan komoditas unggulan hortikultura dan peternakan, serta peningkatan komoditas ekspor perkebunan.

1.2.3.1 Memperbaiki produktivitas dan nilai tambah produk pertanian di beberapa sentra produksi dengan menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan.

Kondisi produktivitas komoditas pertanian primer yang diproduksi petani di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Hal ini antara lain diakibatkan karena keterbatasan kemampuan permodalan petani untuk membeli sarana produksi, terutama benih/bibit unggul, pupuk kimia dan pestisida. Harga pupuk dan pestisida kimia yang cenderung terus meningkat juga semakin membebani biaya produksi. Penerapan pestisida kimia secara terus menerus mengakibatkan

organisme pengganggu tanaman menjadi semakin kebal dan membutuhkan dosis pestisida yang semakin tinggi, predator/musuh alami hama-penyakit juga ikut musnah akibat penggunaan pestisida yang kurang selektif. Di sisi lain degradasi lahan dan sumber air juga terjadi akibat budidaya produksi yang mengabaikan kaidah konservasi lingkungan, terutama dalam pembukaan lahan dan budidaya tanaman di daerah lereng-lereng perbukitan dan pegunungan.

Untuk dapat meningkatkan produktivitas tanaman sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pengurangan biaya pembelian sarana produksi seperti pupuk dan pestisida kimia serta menjaga produktivitas lahan dan sumber air, maka tantangan pertanian ke depan adalah bagaimana mendorong petani untuk menerapkan teknologi pertanian organik yang ramah lingkungan dengan sedapat mungkin memproduksi sendiri pupuk organik yang dihasilkan dari limbah pertanian, penerapan sistem pengendalian hama terpadu, pembukaan lahan tanpa bakar serta penerapan teknologi budidaya konservasi di lahan kering.

1.2.3.2 Penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah.

Saat ini produktivitas beberapa komoditas pertanian primer yang diproduksi petani sudah mencapai titik jenuh (*leveling off*) yang diakibatkan oleh menurunnya kesuburan fisik tanah pertanian, terutama di lahan sawah. Struktur tanah semakin masif akibat penerapan pupuk kimia dalam jangka waktu yang lama. Di samping itu penyebab tidak bertambahnya produktivitas tanaman juga diakibatkan oleh kecenderungan petani yang masih menggunakan salah satu pupuk tunggal secara berlebihan, terutama pupuk nitrogen (N) sementara penggunaan jenis pupuk lainnya (P, K dan unsur mikro) masih sangat kurang. Untuk dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan lahan sekaligus mengurangi konsumsi pupuk N, maka tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah bagaimana mencanangkan gerakan nasional penggunaan pupuk majemuk secara berimbang serta menurunkan proporsi penggunaan pupuk kimia dengan meningkatkan penggunaan pupuk organik untuk memperbaiki kesuburan fisik tanah.

1.2.3.3 Memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan.

Lahan dan air merupakan faktor produksi utama pertanian, sedangkan benih/bibit merupakan sarana produksi utama produksi pertanian, sehingga keberadaan dan berfungsinya infrastruktur lahan, air serta benih/bibit merupakan prasyarat proses produksi pertanian. Namun kondisi infrastruktur lahan dan air saat ini sangat memprihatinkan. Jaringan jalan produksi dan usahatani dari dan ke sentra produksi pertanian masih sangat terbatas, sehingga belum dapat berfungsi untuk keluar-masuk alat dan mesin pertanian untuk membawa sarana produksi maupun memasarkan hasil pertanian secara efisien. Ladang penggembalaan luasnya semakin mengecil, karena perubahan fungsi maupun ketidakjelasan status lahannya (antara milik Negara atau milik adat). Demikian pula dengan waduk-waduk dan jaringan irigasi dan drainase yang ada semakin menurun kapasitasnya, akibat pendangkalan dan kurangnya perawatan. Sementara pembangunan waduk dan embung besar yang baru masih jauh dari memadai untuk mendukung tuntutan peningkatan produksi komoditas pertanian, terutama di daerah sub optimal seperti di lahan kering dan lahan rawa. Di sisi lain keberadaan infrastruktur pendukung usaha penangkaran benih dan bibit juga masih sangat kurang, laboratorium sertifikasi dan pengujian mutu, balai benih, kebun bibit maupun kebun induk juga belum tersebar merata hingga ke seluruh daerah sentra produksi utama.

Salah satu fungsi utama Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah membangun dan memelihara infrastruktur yang tidak mampu dibangun oleh petani dan tidak diminati swasta. Tantangan ke depan adalah bagaimana merencanakan dan mengelola penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur dasar di wilayah sentra produksi dan wilayah pengembangan baru di tengah keterbatasan anggaran dengan melibatkan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat.

1.2.3.4 Membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil.

Usaha pertanian rakyat berskala kecil dan tersebar serta keterbatasannya dalam menyediakan agunan mengakibatkan perbankan kurang berminat untuk membangun jaringan hingga ke pelosok-pelosok desa, sehingga proporsi alokasi dan tingkat penyerapan pembiayaan usaha kecil di bidang pertanian relatif rendah, termasuk yang dibiayai dari kredit program. Di sisi lain, kelembagaan kelompok usaha tani yang belum solid serta tingkat pendidikan petani yang rendah juga merupakan faktor pembatas dalam menyusun proposal/rencana usaha dan mengelola administrasi keuangan yang merupakan pra syarat dalam pengajuan pinjaman ke perbankan. Adalah merupakan tantangan ke depan untuk mendorong keberpihakan Pemerintah dan perbankan untuk memberikan kredit program dan kredit komersial berbunga rendah yang disertai dengan upaya memperluas jaringan pelayanannya hingga ke pelosok pedesaan. Di samping itu, diperlukan upaya pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha kelompok, peningkatan kemampuan dalam menyusun rencana usaha dan manajemen pengelolaan keuangan serta penumbuhan, pengembangan kelembagaan keuangan mikro pedesaan, pengembangan Koperasi Unit Desa maupun koperasi khusus pertanian di perdesaan.

1.2.3.5 Pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan.

Hingga saat ini sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan tingkat produktivitas dan pendapatan usaha yang relatif rendah, sehingga kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan banyak terdapat di pedesaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan harus dilakukan dengan membangun pertanian dan pedesaan. Adalah merupakan tantangan ke depan untuk mencapai komitmen global pada tahun 2015 sebagaimana yang dicanangkan dalam *Millenium*

Development Goals (MDG's) melalui pembangunan pertanian dengan segala karakteristik dan spesifikasi masalahnya yang tersebar merata hampir di seluruh wilayah pedesaan.

1.2.3.6 Penciptaan *pricing policies* yang proporsional untuk produk-produk pertanian khusus.

Rantai tata niaga hampir seluruh produk pertanian primer relatif panjang dan dikuasai oleh pedagang perantara, pedagang pengumpul dan pedagang besar, sehingga margin harga antara produk di tingkat petani dengan di tingkat konsumen relatif tinggi, petani adalah juga pihak yang paling menderita apabila terjadi resiko kegagalan pasar (*market failure*). Skala usaha yang kecil dengan permodalan yang terbatas mengakibatkan kenaikan harga sarana produksi akan meningkatkan proporsi biaya produksi dalam struktur ongkos secara keseluruhan. Adalah menjadi tantangan ke depan untuk menciptakan formula kebijakan harga eceran tertinggi (*ceiling price*) terhadap sarana produksi serta harga pembelian terendah (*floor price*) terhadap hasil panen di tingkat usaha tani yang penerapannya disesuaikan dengan gejolak fluktuasi harga yang terjadi di lapangan, terutama pada saat menjelang masa tanam dan saat panen raya di sentra-sentra produksi utama.

1.2.3.7 Persaingan global serta pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global.

Karakteristik pertanian adalah berskala kecil dan lokasinya tersebar dengan tingkat produktivitas dan mutu produk yang rendah dan beragam. Dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri terhadap produk impor pertanian sejenis serta ketatnya standar mutu di pasar ekspor sebagai instrumen *non tariff barrier* yang kerap diberlakukan banyak negara di era globalisasi ini, maka kondisi tersebut akan semakin menekan dan mengancam daya saing produk-produk pertanian, baik di pasar domestik maupun ekspor. Kondisi tersebut akan semakin diperparah apabila terjadi pelemahan daya beli konsumen pada saat terjadinya krisis ekonomi dalam

skala global. Tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan daya saing produk pertanian melalui peningkatan mutu dan produktivitas, pengembangan produk, derivasi produk serta memperluas pangsa dan negara tujuan ekspor yang didorong dengan upaya peningkatan kerjasama ekonomi antar wilayah (kawasan), baik dalam skala nasional (antar daerah) maupun kerja sama regional (antar negara).

1.2.3.8 Memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.

Belum berkembangnya agroindustri di perdesaan, sehingga usaha tani masih dominan di aspek produksi *on-farm* dengan tingkat pendapatan yang relatif kecil dan belum berkembangnya usaha jasa pelayanan permodalan, dan teknologi, mengakibatkan citra petani dan pertanian lebih sebagai aktifitas sosial budaya tradisional, bukan sosial ekonomi yang dinamis dan menantang. Kondisi ini pada akhirnya kurang menarik minat generasi muda di perdesaan untuk bekerja dan berusaha di bidang pertanian, terlebih bagi mereka yang telah mengikuti pendidikan sekolah menengah ke atas. Adalah menjadi tantangan ke depan untuk mengembangkan agroindustri di perdesaan, diantaranya melalui pengembangan kawasan agropolitan atau Kota Terpadu Mandiri, sehingga menumbuhkembangkan usaha penyediaan barang dan jasa pendukung yang merupakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru di pedesaan.

1.2.3.9 Memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di pedesaan.

Hingga saat ini, petani dengan skala usaha mikro (rumah tangga) dihadapkan kepada keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan, teknologi, serta pasar dan informasi pasar. Kondisi ini membutuhkan penguatan kelembagaan usaha, pembinaan dan pendampingan serta kemudahan fasilitasi pelayanan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses produksi. Kelembagaan

usaha kelompok yang ada saat ini banyak yang sudah tidak berfungsi, sementara sebagian besar yang masih ada juga belum mampu berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan petani secara nyata. Tantangan ke depan adalah bagaimana memperkuat kelembagaan usaha kelompok dan gabungan usaha kelompok untuk mampu berperan sebagai media dalam meningkatkan kapasitas anggota, sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas kelompok maupun anggotanya terhadap sumber pembiayaan, teknologi, pasar dan informasi pasar serta mempermudah pembinaan dan fasilitasi yang diberikan pemerintah dan masyarakat.

1.2.3.10 Menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif.

Tingkat penguasaan teknologi petani yang relatif terbatas di tengah persaingan pasar yang semakin ketat membutuhkan pendampingan pembinaan teknis dan manajemen secara intensif dan berkesinambungan. Hal tersebut juga menuntut adanya kapasitas aparat pembina teknis yang mampu melayani bimbingan teknologi secara spesifik (komoditas) sesuai dengan kebutuhan petani serta mampu berperan sebagai mediator terhadap sumber pembiayaan dan pasar. Luasnya wilayah kerja penyuluhan pertanian dan banyaknya individu/kelompok petani yang harus dilayani juga membutuhkan ratio petani dan penyuluh yang ideal serta terpenuhinya sarana transportasi, komunikasi, alat peraga dan biaya operasional pembinaan yang memadai. Tantangan ke depan adalah bagaimana mewujudkan sistem penyuluhan yang efektif melalui terbangunnya kelembagaan penyuluhan yang didukung dengan kapasitas dan jumlah penyuluh yang proporsional, sarana kerja dan fasilitas operasional yang memadai, pembinaan yang berkesinambungan serta terbuka bagi masyarakat yang berminat untuk berperan serta dalam kegiatan penyuluhan.

1.2.3.11 Pemenuhan kebutuhan pangan, disamping pengembangan komoditas unggulan hortikultura dan peternakan, serta peningkatan komoditas ekspor perkebunan.

Harus diakui bahwa nilai tambah usaha pertanian tanaman pangan, terlebih produksi produk primer adalah relatif lebih rendah dibandingkan peluang perolehan nilai tambah dari produk pertanian lainnya, sehingga usaha pertanian tanaman pangan didominasi oleh pertanian rakyat. Masih sangat sedikit investor yang tertarik untuk mengembangkan usahanya pada bidang usaha pertanian tanaman pangan. Di sisi lain, meningkatnya harga domestik dan ekspor beberapa produk pertanian non pangan, mengakibatkan banyak petani tanaman pangan yang beralih komoditi, sehingga dalam jangka panjang dapat berpotensi mengurangi luas areal pertanian tanaman pangan. Tantangan ke depan untuk merancang bangun pewayalahan komoditas yang menjamin terpenuhinya kebutuhan pasokan produksi komoditas pangan dengan tetap memberikan keuntungan yang memadai bagi petani produsen adalah melalui pemberian berbagai insentif produksi dan jaminan harga pasar hasil panen yang layak. Di samping itu adalah merupakan tantangan ke depan untuk menarik investor swasta untuk membuka kawasan pertanian tanaman pangan (*food estate*), terutama di wilayah pengembangan baru melalui penyediaan dukungan infrastruktur dan insentif investasi.

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN TARGET KEMENTERIAN PERTANIAN

2.1 VISI Kementerian Pertanian

Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani.

2.2 MISI Kementerian Pertanian

- 1) Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis.
- 2) Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan.
- 3) Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan.
- 4) Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi.
- 5) Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi.
- 6) Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri.
- 7) Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan.

- 8) Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional.
- 9) Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan.
- 10) Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparaturnya pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

2.3 Tujuan

- 1) Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal.
- 2) Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan.
- 3) Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan.
- 4) Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian.
- 5) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

2.4 Target Utama dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian

2.4.1 Target Utama Kementerian Pertanian

Selama lima tahun ke depan (2010-2014), dalam membangun pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
- (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan.
- (3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.
- (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Boks 2.1 Empat Target Utama Kementerian Pertanian 2010-2014

4 TARGET UTAMA

1. Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

• Swasembada berkelanjutan

- Kedelai; produksi 2,7 ton di tahun 2014
- Gula; produksi 4,81 juta ton di tahun 2014
- Daging sapi; produksi 0,55 juta ton di tahun 2014

• Swasembada

- Padi, produksi 75,70 juta ton di tahun 2014
- Jagung; produksi 29 juta ton di tahun 2014

Dukungan utama:

- Perluasan lahan baru 2 juta ha selama 2010-2014
- Penyediaan pupuk sesuai kebutuhan selama 5 tahun (urea 35,6 juta ton, SP-36 22,1 juta ton, ZA 6,3 juta ton, KCL 13,1 juta ton, NPK 45,9 juta ton, Oragnik 62,2 juta ton)

2. Peningkatan Diversifikasi Pangan

- Skor Pola Pangan Harapan mencapai 93,3 di tahun 2014
- Konsumsi pangan pokok beras menurun 3%/tahun

3. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor

- Industri hilir berbasis komoditas: beras, tepung local (*modified cassava flour*-MOCAF, sagu, ganyong), jagung, kedelai, buah-buahan; biofarmaka, sawit, kakao, karet, kopi, tebu, susu, mete, pakan ternak skala kecil; pengolahan produk pangan fermentasi dan non fermentasi, derivasi produk.
- Penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi/deregulasi

4. Peningkatan Kesejahteraan Petani

- Pendapatan per kapita pertanian Rp 7,93 juta di tahun 2014
- Rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10 persen per tahun.

Uraian mengenai 4 (empat) target utama yang terdiri dari indikator utama, strategi, rencana aksi, dan dukungan Kementerian/Lembaga lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1.1 Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

Dalam rangka peningkatan produksi pertanian pada periode lima tahun ke depan (2010-2014), Kementerian Pertanian akan lebih fokus pada peningkatan 39 komoditas unggulan nasional. Komoditas unggulan nasional tersebut terdiri dari 7 komoditas tanaman pangan, 10 komoditas hortikultura, 15 komoditas perkebunan, dan 7 komoditas peternakan (Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Komoditas Unggulan Nasional

Komoditas	Pangan	Non-Pangan
1. Tanaman Pangan (7)	padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar	
2. Hortikultura (10)	cabe, bawang merah, kentang, mangga, pisang, jeruk, durian, manggis	rimpang, tanaman hias
3. Perkebunan (15)	kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, teh, tebu	karet, kapas, tembakau, cengkeh, jarak pagar, nilam, kemiri sunan
4. Peternakan (7)	sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing/domba, babi, ayam buras, itik	

Dari ke-39 komoditas unggulan nasional yang ingin dipacu peningkatan produksinya, ada **5 (lima) komoditas** yang dijadikan target swasembada, yaitu **padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi**. Selanjutnya, lima komoditas tersebut dinamakan **komoditas pangan utama**. Saat ini dua komoditas pangan utama (padi dan jagung) sudah dalam posisi swasembada, sehingga ditargetkan ke depan adalah mempertahankan posisi swasembada tersebut (swasembada berkelanjutan), bahkan diharapkan bisa dijadikan komoditas ekspor. Sementara tiga komoditas pangan utama lainnya (kedelai, gula dan daging sapi) ditargetkan bisa mencapai swasembada pada tahun 2014.

Agar posisi swasembada tersebut dapat berkelanjutan, maka target peningkatan produksinya harus dipertahankan minimal sama dengan pertumbuhan permintaan dalam negeri. Dengan memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk secara nasional, permintaan bahan baku industri dalam negeri, kebutuhan stok nasional dalam rangka stabilitas harga serta pemenuhan peluang ekspor, maka produksi padi pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 75,70 juta ton. Dengan posisi produksi tahun 2009 yang berada pada tingkat 63,84 juta ton (ARAM III, BPS), maka rata-rata laju peningkatan produksi yang ditargetkan adalah 3,22 persen per tahun. Sementara itu untuk jagung, diharapkan pada tahun 2014 produksinya dapat mencapai 29,00 juta ton. Dengan posisi produksi jagung pada tahun 2009 sebesar 17,66 juta ton (ARAM III, BPS), maka rata-rata laju peningkatan produksi yang ditargetkan adalah 10,02 persen per tahun.

Agar dapat berswasembada pada tahun 2014, untuk komoditas kedelai, gula dan daging sapi, maka target produksinya pada tahun 2014 minimal harus sama dengan proyeksi permintaan dalam negeri pada tahun 2014 tersebut, masing-masing kedelai 2,70 juta ton, gula 4,81 juta ton dan daging sapi 0,55 juta ton. Kalau melihat posisi produksi ketiga komoditas tersebut pada tahun 2009 sebesar 1,00 juta ton kedelai, 2,85 juta ton gula dan 0,40 juta ton daging sapi, maka untuk mencapai swasembada tahun 2014 masing-masing komoditas tersebut harus mampu dipacu peningkatannya rata-rata 20,05 persen (kedelai), 12,55 persen (tebu) dan 7,30 persen (daging sapi) per tahun.

Target dan sasaran peningkatan produksi komoditas pangan utama dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Peningkatan Produksi Komoditas Pangan Utama, 2010-2014

KOMODITAS	TARGET	Produksi Th 2009 (Juta Ton)	Sasaran Produksi Th 2014 (Juta Ton)	Rata-rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
1. PADI	Swasembada berkelanjutan	63,84 *)	75,70	3,22
2. JAGUNG	Swasembada berkelanjutan	17,66 *)	29,00	10,02
3. KEDELAI	Swasembada 2014	1,00 *)	2,70	20,05
4. GULA	Swasembada 2014	2,85 **)	4,81	12,55
5. DAGING SAPI	Swasembada 2014	0,40 **)	0,55	7,30

Keterangan : *) Angka Ramalan III, **) Angka Target

Sedangkan sasaran produksi tahunan komoditas pangan utama selama lima tahun ke depan (2010-2014) dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Sasaran Produksi Komoditas Pangan Utama, 2010-2014

KOMODITAS	TAHUN					PERTUMBUHAN (% / tahun)
	2010	2011	2012	2013	2014	
	(000 ton)					
1. Padi	66.680	68.800	71.000	73.300	75.700	3,22
2. Jagung	19.800	22.000	24.000	26.000	29.000	10,02
3. Kedelai	1.300	1.560	1.900	2.250	2.700	20,05
4. Gula	2.966	3.449	3.902	4.355	4.806	12,55
5. Daging Sapi	411	439	471	506	546	7,30

Untuk komoditas pangan selain pangan utama, target pertumbuhan produksinya lebih disesuaikan dengan kemampuan petani serta daya serap pasar. Semua komoditas tetap akan ditingkatkan produksinya, tetapi laju peningkatannya sangat bervariasi antar komoditas. Walaupun secara fisik potensi peningkatan produksinya ada, tetapi peningkatan produksi yang sangat tinggi dapat saja menimbulkan kerugian bagi petani apabila terjadi *over supply* di pasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka komoditas-komoditas yang dipacu pertumbuhannya secara cukup tinggi (lebih dari 5 persen) adalah kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, mangga, durian, ayam buras dan susu. Sementara komoditas yang pertumbuhannya pada tingkat moderat (di bawah 5 persen) adalah kacang hijau, cabe, bawang merah, kentang, pisang, jeruk, manggis, kelapa, jambu mete, kambing/domba, babi dan itik.

Secara keseluruhan, dari 39 komoditas unggulan nasional ada 14 komoditas yang peningkatan produksinya bukan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, melainkan lebih ditujukan untuk substitusi impor, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri dan penerimaan devisa/ekspor, yaitu kelapa sawit, karet, kakao, kopi, lada, cengkeh, tembakau, kapas, teh, jarak pagar, nilam, kemiri sunan, rimpang dan tanaman hias. Untuk ke-14 (empat belas) komoditas tersebut, pertumbuhan produksinya akan dipacu sesuai permintaan. Target pertumbuhan produksi tersebut berkisar antara 0,41 persen dan 24,99

persen per tahun, dimana target pertumbuhan tertinggi adalah kapas dan terendah adalah tembakau.

Target produksi komoditas unggulan nasional dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok komoditas subsektor, yaitu: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Sasaran produksi komoditas tanaman pangan dan pertumbuhannya selama 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.4. Sasaran produksi tanaman pangan yang terbagi atas propinsi di Indonesia secara lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2 sampai dengan Lampiran 8.

Tabel 2.4 Sasaran Produksi Tanaman Pangan

KOMODITAS	2010	2011	2012	2013	2014	PERTUMBUHAN (%/tahun)
	(ribu ton)					
1. Padi	66.680	68.800	71.000	73.300	75.700	3,22
2. Jagung	19.800	22.000	24.000	26.000	29.000	10,02
3. Kedelai	1.300	1.560	1.900	2.250	2.700	20,05
4. Kc. Tanah	882	970	1.100	1200	1.300	10,20
5. Kc. Hijau	360	370	390	410	430	4,55
6. Ubi kayu	22.248	22.400	25.000	26.300	27.600	5,54
7. Ubi jalar	2.000	2.150	2.300	2.450	2.600	6,78

Sasaran produksi hortikultura dan pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 2.5. Secara lebih lengkap sasaran produksi hortikultura dapat dilihat pada Lampiran 9 sampai dengan Lampiran 18.

Tabel 2.5 Sasaran Produksi Hortikultura, 2010-2014

KOMODITAS	2010	2011	2012	2013	2014	PERTUMBUHAN
	(ribu ton)*					(%/tahun)
1. Cabe	1.197	1.221	1.246	1.271	1.295	2,00
2. Bawang Merah	875	895	915	935	955	2,21
3. Kentang	1.073	1.081	1.088	1.096	1.104	0,73
4. Mangga	2.233	2.361	2.488	2.616	2.743	5,28
5. Pisang	6.348	6.571	6.778	6.969	7.143	3,00
6. Jeruk	2.873	3.020	3.168	3.315	3.463	4,78
7. Durian	696	731	769	812	857	5,35
8. Manggis	79	81	83	84	86	2,16
9. Rimpang	438	455	474	492	512	4,00
10. Tanaman Hias	216.675	230.758	245.758	261.732	278.745	6,50

Keterangan: * kecuali Tanaman Hias dalam ribu tangkai.

Sasaran produksi dan pertumbuhan tahunan tanaman perkebunan selama 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.6. Sasaran produksi perkebunan untuk propinsi dapat dilihat pada Lampiran 19 sampai dengan Lampiran 32.

Tabel 2.6 Sasaran Produksi Perkebunan

KOMODITAS	2010	2011	2012	2013	2014	PERTUMBUHAN (%/tahun)
	(ribu ton)*					
1. Sawit	23.200	24.429	25.710	27.046	28.439	5,22
2. Karet	2.681	2.711	2.741	2.771	2.801	1,10
3. Kelapa	3.266	3.290	3.317	3.348	3.380	0,86
4. Kopi	698	709	718	728	738	1,40
5. Kakao	988	1.074	1.342	1.539	1.648	13,86
6. Lada	83	85	87	89	92	2,51
7. Cengkeh	78	80	83	84	86	2,47
8. Mete	145	148	152	156	159	2,36
9. Tembakau	181	182	183	183	184	0,41
10. Kapas	26	33	40	57	63	24,99
11. Teh	168	171	174	177	182	2,02
12. Gula	2.966	3.449	3.902	4.355	4.806	12,55
13. Jarak Pagar	15	20	24	29	35	23,71
14. Nilam	91	97	106	116	124	8,05
15. Kemiri Sunan	1.000	2.000	4.000	7.000	10.000	79,46

Keterangan: * kecuali Kemiri Sunan dalam luas areal (hektar).

Adapun untuk komoditas peternakan selama kurun 2010-2014, sasaran produksi dan pertumbuhan tahunannya dapat dilihat pada Tabel 2.7. Sasaran produksi peternakan per propinsi di Indonesia selama periode tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Lampiran 33 sampai dengan Lampiran 40.

Tabel 2.7 Sasaran Produksi Peternakan

KOMODITAS		2010	2011	2012	2013	2014	PERTUMBUHAN (%/tahun)
		(ribu ton)					
1.	Daging Sapi	412	439	471	506	546	7,30
2.	Daging Kerbau	42	42	42	42	42	0,32
3.	Daging Kambing/Domba	133	138	145	153	161	4,95
4.	Daging Babi	232	235	239	243	247	1,66
5.	Ayam Buras	324	342	364	378	401	5,47
6.	Itik	29	29	30	31	33	3,71
7.	Sapi Perah (susu segar)	728	854	986	1.125	1.297	15,56

Dalam mendukung upaya peningkatan produksi untuk pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan diperlukan sarana produksi pupuk. Untuk keperluan pencapaian target produksi yang telah ditetapkan, diperkirakan kebutuhan pupuk untuk setiap jenis selama tahun 2010-2014 adalah urea 35,6 juta ton, SP-36 22,1 juta ton, ZA 6,3 juta ton, KCL 13,1 juta ton, NPK 45,9 juta ton dan Organik 62,2 juta ton (Tabel 2.8). Lebih lanjut, proyeksi kebutuhan pupuk untuk subsektor pertanian selama 2010-2014 dapat dilihat pada Lampiran 42.

Tabel 2.8 Proyeksi Kebutuhan Pupuk Sektor Pertanian

Jenis Pupuk	2010	2011	2012	2013	2014	Total
	(juta ton)					
Urea	7,3	7,2	7,1	7	7	35,6
SP-36	4,5	4,5	4,4	4,4	4,3	22,1
ZA	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	6,3
KCL	2,8	2,7	2,6	2,5	2,5	13,1
NPK	8,1	8,6	9,2	9,7	10,3	45,9
Organik	11,9	12,2	12,4	12,7	13	62,2
<i>Total</i>	35,8	36,4	37	37,6	38,4	185,2

Untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan sebagaimana diuraikan di atas, disamping diupayakan melalui peningkatan produksi dan produktivitas juga diupayakan melalui perluasan areal lahan pertanian baru seluas 2 (dua) juta hektar, dengan rincian selama lima tahun ke depan (2010-

2014) adalah sebagai berikut: 250.000 ha cetak sawah, 400.000 ha pembukaan lahan kering, 400.000 ha perluasan areal hortikultura, 585.430 ha perluasan areal perkebunan, 364.570 ha pengembangan areal hijauan makan ternak (HMT) (Tabel 2.9). Secara lebih lengkap, target perluasan areal lahan pertanian per propinsi dapat dilihat pada Lampiran 43 sampai dengan Lampiran 48.

Tabel 2.9 Target Perluasan Areal Lahan Pertanian 2 Juta Hektar

Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air	2010	2011	2012	2013	2014	Total
	(Ha)					
Cetak Sawah	12.025	87.975	50.000	50.000	50.000	250.000
Pembukaan Lahan Kering	1.050	98.950	100.000	100.000	100.000	400.000
Perluasan Areal Hortikultura	3.525	96.475	100.000	100.000	100.000	400.000
Perluasan Areal Perkebunan	10.200	143.670	143.850	143.850	143.860	585.430
Pengembangan Areal Hijauan Makanan Ternak (HMT)	5.705	92.500	90.115	88.750	87.500	364.570
<i>Total</i>	32.505	519.570	483.965	482.600	481.360	2.000.000

Indikator utama, strategi, dan rencana aksi dalam rangka pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan pada periode lima tahun ke depan (2010-2014) seperti tercantum pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Indikator Utama, Strategi, Dan Rencana Aksi Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

INDIKATOR UTAMA	STRATEGI	RENCANA AKSI	DUKUNGAN K/L LAIN
Rata-rata peningkatan produksi per tahun dalam kurun waktu 2010-2014: ▪ Padi 3,22 % ▪ Jagung 10,02 %	7 Gema Revitalisasi, yaitu: 1. Revitalisasi Lahan, 2. Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan,	A. Peningkatan Produktivitas: 1. Penyediaan benih unggul tanaman dan bibit ternak 2. Penyediaan pupuk, benih/bibit, sarana pasca panen bersubsidi secara tepat waktu, tepat jumlah dan terjangkau. 3. Perlindungan tanaman dan ternak dari	1. <u>Kementerian Kehutanan dan BPN</u> : Penyediaan lahan usaha pertanian 2. <u>Kementerian BUMN</u> :

INDIKATOR UTAMA	STRATEGI	RENCANA AKSI	DUKUNGAN K/L LAIN
▪ Kedelai 20,05 % ▪ Gula 12,55 % ▪ Daging sapi 7,30%	3. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana, 4. Revitalisasi SDM, 5. Revitalisasi Pembiayaan Petani, 6. Revitalisasi Kelembagaan Petani, dan 7. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir	OPT, penyakit ternak dan bencana alam 4. Pelayanan dan pengawasan sarana produksi tanaman dan ternak. 5. Perakitan paket teknologi dan diseminasi teknologi tepat guna spesifik lokasi serta didukung paket kebijakan pertanian yang kondusif bagi petani/peternak 6. Pelayanan dan proteksi melalui perkarantina tanaman dan hewan/ternak 7. Pelayanan penyuluhan dan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM petani dan peternak 8. Peningkatan pelayanan pasca panen dan pengolahan dalam rangka meningkatkan mutu dan standar produk tanaman dan ternak B. <u>Investasi Pemerintah dan Swasta:</u> 1. Pelayanan pembiayaan usahatani tanaman dan ternak. 2. Pengembangan dan pembinaan kelembagaan petani/peternak, disertai dukungan pengembangan usaha antara lain melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dan Lembaga yang Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) 3. Optimalisasi pelayanan perizinan dan investasi di bidang pertanian tanaman dan ternak 4. Mendorong keterlibatan sektor untuk mendukung upaya peningkatan produksi pangan utama 5. Peningkatan kapasitas jalan usahatani, JIUT dan JIDES C. <u>Harga Produk/Output:</u> 1. Penetapan HPP untuk produk pertanian 2. Pengembangan kemitraan antara swasta dan petani D. <u>Tambahan Lahan Pertanian:</u> 1. Perluasan areal pertanian serta optimalisasi pemanfaatan lahan dan air. 2. Penyelesaian PP dari UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan.	Penyediaan pupuk, revitalisasi dan pembangunan pabrik gula, penyediaan benih unggul 3. <u>Kementerian PU:</u> Pengawasan Penetapan RUTR; pengembangan jaringan transportasi di sentra produksi; rehabilitasi waduk & embung; pengembangan jaringan irigasi primer & sekunder; pembangunan pergudangan di pasar & pelabuhan 4. <u>BPN:</u> Pengendalian konversi lahan & sertifikasi lahan pertanian 5. <u>Kementerian Koordinator Perekonomian:</u> Penataan mekanisme subsidi

INDIKATOR UTAMA	STRATEGI	RENCANA AKSI	DUKUNGAN K/L LAIN
		<u>E. Rencana lainnya sesuai Kontrak Kinerja Kementerian Pertanian:</u> 1. Memastikan penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, dan penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar. 2. Memastikan pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya. 3. Memastikan peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi. 4. Memastikan dilakukannya langkah-langkah konkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim. 5. Mengkaji dan mengusulkan penyempurnaan kebijakan dan peraturan mengenai subsidi pupuk sebelum Juni 2010 dan memastikan efektivitas peraturan yang disempurnakan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. 6. Mencapai sasaran-sasaran Renstra Kementerian 2009-2014.	

Target pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan sebagaimana diuraikan di atas akan sangat dipengaruhi oleh fenomena perubahan iklim yang telah menjadi isu global dan sangat berdampak terhadap kelangsungan pembangunan pertanian di masa yang akan datang. Perlu upaya mengurangi dampak negatif perubahan iklim terhadap sumberdaya dan sistem produksi pertanian serta terhadap sosial ekonomi petani. Oleh karena itu, untuk menyiapkan antisipasinya diperlukan analisis tentang kerentanan dampak perubahan iklim, inventarisasi dan delineasi wilayah yang terkena dampak, serta penyusunan road map rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan

lingkungan. Selain itu, perlu diciptakan dan disiapkan berbagai teknologi adaptif baik untuk adaptasi maupun mitigasi, seperti varietas unggul, teknologi pengelolaan lahan dan air, pemupukan serta paket-paket teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan sebagainya.

Berikut adalah strategi, rencana aksi dan dukungan Kementerian/Lembaga lain yang diperlukan bagi upaya adaptasi, mitigasi dan antisipasi menghadapi dampak perubahan iklim.

A. Strategi:

- 1) Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Air/irigasi.
- 2) Penyesuaian Pola Tanam/Pengelolaan.
- 3) Perakitan dan penyiapan Teknologi Adaptif.
- 4) Penerapan Teknologi Adaptif.

B. Rencana Aksi:

- 1) Pemetaan daerah rentan Perubahan iklim (rawan bencana banjir, kekeringan, prioritas penanganan).
- 2) Perakitan peta kalender tanam dinamik.
- 3) Pengembangan sistem informasi iklim dan bencana.
- 4) Pengembangan sistem peringatan dini banjir.
- 5) Perbaikan dan pengembangan jaringan irigasi dan drainase, normalisasi dan peningkatan kapasitas waduk/bangunan penyimpanan air.
- 6) Konservasi DAS kritis hulu utama di Jawa, Sulawesi dan Sumatera, antara lain melalui pengembangan tanaman pohon/buah.
- 7) Perakitan varietas unggul tanaman pangan adaptif (toleran genangan, kekeringan, salinitas, umur genjah, OPT).
- 8) Perakitan teknologi pupuk organik/hayati/pembenah tanah.
- 9) Perakitan teknologi budidaya/pengelolaan lahan/tanah/pemupukan.
- 10) Sosialisasi teknologi dan model untuk adaptasi perubahan iklim.
- 11) Sosialisasi dan pengembangan *System Rice Intensification* (SRI) dan Pengelolaan Tanaman Ternak (PTT) serta teknologi hemat air lainnya.

- C. **Dukungan Kementerian/Lembaga lain:** Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Pemerintah-Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Dinas/Pemerintah Daerah.

2.4.1.2 Peningkatan Diversifikasi Pangan

Diversifikasi pangan atau keragaman konsumsi pangan merupakan salah satu strategi mencapai ketahanan pangan. Sasaran percepatan keragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi seimbang yang dicerminkan oleh tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) sekurang-kurangnya 93,3 pada tahun 2014. Konsumsi umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, pangan hewani ditingkatkan dengan mengutamakan produksi lokal, sehingga konsumsi beras diharapkan turun sekitar 3% per tahun. Data menunjukkan bahwa rakyat Indonesia mengkonsumsi beras lebih banyak daripada asupan karbohidrat yang dibutuhkan, yakni mencapai 62,2% untuk tahun 2007. Menurut rekomendasi pada Widyakarya Pangan dan Gizi 2004 bahwa konsumsi padi-padian untuk mencukupi karbohidrat itu cukup 50% saja, dan sisanya umbi-umbian.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.22 tahun 2009 menetapkan Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Tujuan utama Perpres tersebut adalah meningkatkan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan, baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat, dengan melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini serta pengembangan pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Disamping itu, juga perlu diupayakan ketersediaan aneka pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral yang menggerakkan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Termasuk di dalam Perpres tersebut adalah penguatan dan peningkatan partisipatif Pemerintah

Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII menganjurkan konsumsi energi dan protein penduduk Indonesia masing-masing adalah 2000 kkal/kap/hari dan 52 gram/kap/hari. Pada rekomendasi WNPG sebelumnya, angka kecukupan energi adalah 2.100 kkal/kap/hari dan kecukupan protein sebesar 56 gram/kap/hari.

Penilaian kualitas atau mutu konsumsi pangan seperti ini dilakukan dengan menggunakan skor keanekaragaman pangan yang dikenal dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Nilai/skor mutu PPH ini dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kuantitas dan kualitas konsumsi, yang menggambarkan pencapaian ragam (diversifikasi) konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan konsumsi dinilai semakin baik. Upaya pemulihan ekonomi telah meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan peningkatan skor PPH dari 79,1 pada tahun 2005 meningkat kembali menjadi 83,1 pada tahun 2007. Laju peningkatan skor PPH yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan dalam pola konsumsi pangan yang mengarah pada pola konsumsi yang semakin beragam dan bergizi seimbang. Sasaran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Makna lain dari diversifikasi pangan ditujukan untuk menurunkan konsumsi padi-padian sebesar 3% per tahun dengan meningkatkan konsumsi umbi-umbian, meningkatkan konsumsi protein hewani dan meningkatkan konsumsi sayur mayur sebesar 4% per tahun. Dengan demikian nantinya konsumsi pangan masyarakat Indonesia bisa mencapai angka ideal yang menjadi rujukan, yaitu 93,3 pada tahun 2014.

Tabel 2.11. Sasaran Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

MAKANAN	2010	2011	2012	2013	2014
Padi - padian	54.9	53.9	52.9	51.9	51.0
Umbi - umbian	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8
Pangan Hewani	9.6	10.1	10.6	11.1	11.5
Minyak dan Lemak	10.1	10.1	10.1	10.0	10.0
Buah / Biji Berminyak	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0
Kacang - kacanggan	4.3	4.4	4.6	4.7	4.9
Gula	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0
Sayur dan Buah	5.2	5.4	5.5	5.7	5.8
Lain – lain	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0
SKOR PPH	86.4	88.1	89.8	91.5	93.3

Konsumsi komoditas pangan utama yang menghasilkan karbohidrat diharapkan menurun setiap tahunnya dan meningkatkan konsumsi penghasil protein baik nabati maupun hewani. Sasaran konsumsi komoditas pangan utama lima tahun ke depan (2010-2014) dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Sasaran Konsumsi Komoditas Pangan Utama, 2010-2014

Komoditas	2010	2011	2012	2013	2014
(kg/kapita/tahun)					
BERAS	101.1	99.3	97.5	95.7	94.0
JAGUNG	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8
KEDELAI	9.8	10.1	10.2	10.2	10.2
GULA	9.4	9.5	9.5	9.5	9.6
DAGING SAPI	2.7	2.9	3.0	3.1	3.3

Adapun indikator utama, strategi, dan rencana aksi dalam rangka diversifikasi pangan untuk periode lima tahun ke depan (2010-2014) dapat dilihat pada Tabel 2.13

Tabel 2.13. Indikator Utama, Strategi, dan Rencana Aksi Peningkatan Diversifikasi Pangan

INDIKATOR UTAMA	STRATEGI	RENCANA AKSI	DUKUNGAN K/L LAIN
▪ Meningkatnya keanekaragaman produksi dan konsumsi pangan berbasis local sesuai skor PPH (Pola Pangan Harapan) sebesar 93,3 pada tahun 2014. ▪ Menurunnya konsumsi pangan pokok beras per kapita sebesar 3% pe tahun. ▪ Mantapnya stabilitas harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen terutama pada musim panen dan paceklik. ▪ Berkurangnya jumlah/persen tase penduduk rawan pangan kronis (yang mengkonsumsi kurang dari 80% AKG) dan penduduk miskin minimal 1 persen per tahun (kesepakatan Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia). ▪ Semakin meningkatkan	1. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana 2. Revitalisasi SDM 3. Revitalisasi Pembiayaan Petani 4. Revitalisasi Kelembagaan Petani 5. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir.	A. <u>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Promosi :</u> 1. Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan melalui promosi, pendidikan dan penyuluhan di 40.000 Desa dan 450 Kabupaten. 2. Penanganan keamanan pangan segar tingkat produsen dan konsumen di 350 Kabupaten. B. <u>Peningkatan investasi agroindustri pangan berbasis pangan lokal :</u> 1. Pengembangan bisnis pangan lokal. 2. Pengembangan sistem distribusi dan stabilitasi harga pangan melalui penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) untuk 2.500 Gapoktan. C. <u>Peningkatan efektivitas koordinasi melalui penyiapan data dan informasi :</u> 1. Pemantauan dan analisis ketersediaan dan kebutuhan pangan, distribusi dan akses pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan di 33 propinsi. 2. Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan di 33 Propinsi dan 450 Kabupaten D. <u>Intervensi penanganan kerawanan pangan:</u> 1. Penanganan daerah rawan pangan dan pemantapan SKPG di 450 Kabupaten. 2. Pengembangan desa mandiri pangan (5.000 desa) dan lumbung pangan (2.500	1. <u>Kementerian Koordinator Kesra, Bappenas, Kementerian Kesehatan:</u> Penurunan penduduk miskin dan rawan pangan 2. <u>Kementerian Dalam Negeri:</u> Perumusan kebijakan dan pemantauan distribusi dan harga pangan; menugaskan Bulog untuk pengadaan pangan pokok strategis 3. <u>Kementerian Pendidikan Nasional :</u> Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman secara sistematis melalui pendidikan formal dan non formal. 4. <u>Kementerian Perindustrian:</u> Pengembangan bisnis dan pangan lokal. 5. <u>Kementerian Kesehatan, BPOM:</u> Penerapan standard mutu dan keamanan pada industri rumah tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal. 6. <u>BPS, Kementerian Kesehatan:</u> Kerjasama penyusunan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan (FSVA); penyusunan neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan (NBM, PPH). 7. <u>Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Pemda:</u> Koordinasi kebijakan ketahanan pangan nasional dan wilayah (Dewan Ketahanan Pangan).

INDIKATOR UTAMA	STRATEGI	RENCANA AKSI	DUKUNGAN K/L LAIN
kemandirian masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan. ▪ Semakin efektifnya koordinasi antara pusat dan daerah.		lambung pangan). E. Rencana Aksi Lainnya sesuai Kontrak Kinerja Kementerian Pertanian: Memastikan peningkatan keanekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah dalam rangka peningkatan kualitas gizi.	

2.4.1.3 Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor

Peningkatan nilai tambah akan difokuskan pada dua hal yakni peningkatan kualitas dan jumlah olahan produk pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor. Peningkatan kualitas produk pertanian (segar dan olahan) diukur dari peningkatan jumlah produk pertanian yang mendapatkan sertifikasi jaminan mutu (SNI, Organik, *Good Agricultural Practices*, *Good Handling Practices*, *Good Manufacturing Practices*). Pada akhir 2014 semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olah karet (bokar) sudah harus tersertifikasi dengan pemberlakuan sertifikasi wajib. Peningkatan jumlah olahan diukur dari rasio produk segar olahan. Saat ini, sekitar 80 % produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk segar sedangkan 20% dalam bentuk olahan sehingga nilai tambahnya sangat kecil. Pada akhir 2014 ditargetkan bahwa 50% produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk olahan.

Peningkatan daya saing akan difokuskan pada pengembangan produk berbasis sumberdaya lokal yang (1) bisa meningkatkan pemenuhan permintaan untuk konsumsi dalam negeri; dan (2) bisa mengurangi ketergantungan impor (substitusi impor). Ukurannya adalah besarnya pangsa pasar (*market share*) di pasar dalam negeri dan penurunan net impor. Upaya peningkatan daya saing akan difokuskan pada peningkatan produksi susu yang selama ini impornya mencapai 73% untuk memenuhi kebutuhan domestik. Untuk mengurangi besarnya impor gandum/terigu yang mencapai 6,7 juta ton per tahun akan dikembangkan tepung-tepungan berbasis sumberdaya lokal, yang ditargetkan pada akhir 2014 sudah bisa mensubstitusi 10 % impor gandum/terigu. Untuk

kakao, ditargetkan pada akhir 2014 kebutuhan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri bisa dipenuhi semua dari produksi dalam negeri.

Peningkatan ekspor akan difokuskan pada pengembangan produk yang punya daya saing di pasar internasional, baik segar maupun olahan, yang kebutuhan di pasar dalam negeri sudah tercukupi. Indikatornya adalah pertumbuhan volume ekspor. Sedangkan indikator utama, strategi, dan rencana aksi dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor produk pertanian pada periode lima tahun ke depan (2010-2014) dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14 Indikator Utama, Strategi, dan Rencana Aksi Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor Produk Pertanian

INDIKATOR UTAMA	STRATEGI	RENCANA AKSI	DUKUNGAN DARI K/L LAIN
100% produk pertanian strategis berorientasi ekspor (segar dan olahan) mendapatkan sertifikasi. - Rasio produk dengan nilai tambah meningkat dari 80:20 ke 50:50. - Substitusi impor: 5% tepung, 25% susu, 100% SNI <i>cocoa bean</i> pada 2014. - Peningkatan net ekspor rata-rata 15% per tahun - Jumlah dan skala industri hilir pertanian tumbuh 6% setiap tahunnya	- Revitalisasi SDM, - Revitalisasi Pembiayaan Petani, - Revitalisasi Kelembagaan Petani, dan - Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir	- Revisi PP 17 tahun 1986 tentang kewenangan pembinaan agroindustri. Pengembangan industri hilir: beras, tepung local (<i>modified cassava fermentation-MOCAF, sagu, ganyong</i>), jagung, kedelai, buah-buahan; biofarmaka, sawit, kakao, karet, kopi, tebu, susu, mete, pakan ternak skala kecil; pengolahan produk pangan fermentasi dan non fermentasi, derivasi produk. - Pengembangan alsintan, RMU, <i>grading & packaging house</i>, manajemen pergudangan & <i>cool chain, revitalisasi silo</i>. - Sosialisasi penerapan SNI wajib, RSPO, penerapan sistem jaminan mutu (GAP, GHP, GMP) dan sertifikasi (GI) produk komoditi strategis. - Menyusun usulan penyesuaian kebijakan fiskal, investasi, pembiayaan & insentif untuk mendorong pengembangan agroindustri olahan dalam negeri dan ekspor, stabilisasi harga, tarif bea keluar, registrasi impor, importasi susu, SPS, revitalisasi pabrik - Pengembangan pasar & SI pasar: intensifikasi promosi, diplomasi, negosiasi, <i>market</i>	<u>1.Kementerian Perindustrian:</u> Revisi PP 17 tahun 1986; pengembangan kompetensi inti industri nasional dan daerah yang mendukung pertanian <u>2.Kementerian Perdagangan:</u> - Penyesuaian kebijakan fiskal dan insentif untuk pengembangan agroindustri dan ekspor. - Kerjasama promosi, diplomasi, negosiasi, market intelligence, dan pemasaran <u>3.Kementerian BUMN:</u> - Pengembangan investasi agroindustri, revitalisasi pabrik <u>4.BKPM :</u> - Penyediaan informasi investasi komoditas unggulan; pengemb komoditas unggulan nasional; insentif investasi primer & olahan

INDIKATOR UTAMA	STRATEGI	RENCANA AKSI	DUKUNGAN DARI K/L LAIN
		<i>intelligence</i>, misi dagang, kerjasama kedutaan/ATPC, advokasi <i>negative campagne</i>, kemitraan pola cluster dan kerjasama pemasaran; penataan rantai pasokan, efisiensi transportasi, sistem tunda jual, 7. Penguatan kajian survey data industri hilir pertanian 8. Pengembangan metodologi, teknologi multi guna & tepat guna: produksi, panen, pasca panen produk segar & olahan 9. Pengembangan kelembagaan usaha tani dan pemasaran penyangga harga 10. Pengembangan SDM petani dan pembina teknis (SL-PHP) <u>Rencana Aksi Lainnya sesuai Kontrak Kinerja Kementerian Pertanian:</u> 11. Memastikan peningkatan investasi di bidang pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau. 12. Memastikan dukungan atas program pengembangan energi terbarukan antara lain bio-energi melalui penyediaan bahan baku. 13. Mengkaji ulang dan mengusulkan perbaikan kebijakan peraturan dan proses pelaksanaan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan umum yang diberikan kementeriannya secara tuntas sebelum Juni 2010 serta memastikan efektivitas implementasi perbaikan peraturan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk Presiden untuk	

INDIKATOR UTAMA	STRATEGI	RENCANA AKSI	DUKUNGAN DARI K/L LAIN
		memimpin reformasi pelayanan umum. 14. Mengkaji dan mengusulkan perbaikan peraturan-peraturan yang menghambat atau berpotensi menghambat investasi sebelum Juni 2010 dan memastikan efektivitas perbaikan peraturan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.	

Adapun rancangan pengembangan industri hilir yang berbasis komoditas, khususnya beras, tepung local (*modified cassava flour*-MOCAF, sagu, ganyong), jagung, kedelai, buah-buahan tropis; biofarmaka, sawit, kakao, karet, kopi, tebu, dan susu berikut rencana aksi dan lokasinya secara lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 48.

2.4.1.4 Peningkatan Kesejahteraan Petani

Unsur penting yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan petani. Walaupun demikian tidak selalu upaya peningkatan pendapatan petani secara otomatis diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, karena kesejahteraan petani juga tergantung pada nilai pengeluaran yang harus dibelanjakan keluarga petani serta faktor-faktor non-finansial seperti faktor sosial budaya. Walaupun demikian, sisi pendapatan petani merupakan sisi yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, dalam kerangka peningkatan kesejahteraan petani, prioritas utama Kementerian Pertanian adalah upaya meningkatkan pendapatan petani.

Saat ini rata-rata pendapatan per kapita pertanian hanya sekitar Rp 4,69 juta per tahun. Pada tahun 2014 Kementerian Pertanian menargetkan pendapatan per kapita tersebut dapat meningkat menjadi Rp 7.93 juta per tahun. Hal ini berarti setiap tahun harus diupayakan kenaikan pendapatan 11,1 persen per tahun.

Sebagai gambaran umum pendapatan petani, dapat pula dilihat dari PDB Pertanian per rumah tangga petani. PDB Pertanian dalam arti sempit (di luar kehutanan dan perikanan) tahun 2008 adalah Rp 21,6 juta/rumah tangga/tahun.

Untuk tahun 2009 (s/d triwulan III) adalah Rp 19,8 juta/rumah tangga (*belum lengkap 1 tahun*). Data RTP (Rumah Tangga Pertanian) menggunakan data hasil sensus pertanian 2003. Sementara itu secara nasional, PDB total per rumah tangga nasional tahun 2008 sebesar Rp 93,6 juta/rumah tangga dan tahun 2009 s/d triwulan III sebesar Rp 78,1 juta/rumah tangga. Hal ini mencerminkan betapa kecilnya pendapatan rumah tangga sektor pertanian dibandingkan non pertanian.

Nilai pendapatan petani dapat bersumber dari usaha pertanian dan usaha non-pertanian. Nilai pendapatan yang bersumber dari usaha pertanian akan diperoleh dari selisih nilai penjualan komoditas usahatani yang dihasilkan dengan biaya usahatani yang dikeluarkan. Nilai penjualan hasil usahatani akan ditentukan oleh volume produksi yang dihasilkan serta harga jual. Makin besar volume produksi yang dihasilkan makin besar pula volume fisik yang dapat dijual, di mana upaya peningkatan volume produksi ini merupakan hal yang sudah banyak dipaparkan pada saat mengupayakan target peningkatan produksi dan swasembada berkelanjutan. Sementara itu, walaupun komoditas pertanian berhasil ditingkatkan produksinya, hal tersebut hanya akan secara nyata meningkatkan nilai penjualan manakala harga jual paling tidak konstan atau lebih baik lagi kalau juga meningkat. Oleh karena itu hal fundamental yang perlu diupayakan dalam rangka peningkatan nilai jual ini adalah mempertahankan agar harga jual tidak mengalami penurunan.

Agar harga jual tidak mengalami penurunan, maka Kementerian Pertanian perlu menempuh sejumlah rencana aksi guna menjamin peningkatan pendapatan petani. Rencana aksi dimaksud antara lain:

- (1) Meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), khususnya komoditas padi, agar petani mendapat jaminan kepastian harga jual padi yang mereka hasilkan.
- (2) Mengembangkan kelembagaan sistem tunda jual yang memungkinkan petani mendapatkan harga jual produk pertanian yang wajar.
- (3) Melakukan proteksi terhadap serbuan impor hasil-hasil pertanian, baik melalui instrumen tarif dan non tarif. Hal ini sangat dibutuhkan untuk

melindungi kejatuhan harga pertanian akibat perdagangan internasional yang tidak adil (*unfair market*).

- (4) Mendorong Pemerintah Daerah untuk menciptakan *captive market* bagi produk pertanian melalui sistem kontrak yang tidak merugikan petani.
- (5) Mengembangkan kelembagaan lumbung pangan yang bisa menjadi alat pelindung bagi petani dari kejatuhan harga akibat tidak memiliki gudang penyimpanan.

Upaya mengatasi kejatuhan harga jual baru merupakan satu sisi yang dapat dilakukan Kementerian Pertanian untuk mengupayakan peningkatan pendapatan petani. Upaya dari sisi lain adalah menekan biaya produksi pertanian agar margin keuntungan petani dapat meningkat. Rencana aksi yang akan ditempuh Kementerian Pertanian untuk menekan biaya produksi pertanian (selain upaya peningkatan produktivitas pertanian) adalah:

- (1) Pemberian subsidi input, khususnya pupuk dan benih/bibit.
- (2) Melakukan upaya koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memungkinkan diberikannya keringanan pajak terhadap barang-barang modal atau sarana yang digunakan untuk berusaha.
- (3) Mengupayakan pemberian skim subsidi bunga kredit dan penjaminan untuk investasi dan modal kerja usahatani.
- (4) Memberikan bantuan sosial terhadap petani yang mengalami bencana alam atau gangguan produksi lainnya agar biaya usahatani yang mereka keluarkan tidak menjadi terlalu besar.

Selain berbagai upaya yang berhubungan secara langsung dengan nilai input dan output pertanian, pendapatan petani juga masih memungkinkan untuk ditingkatkan melalui:

- (1) Pengembangan infrastruktur oleh Pemerintah yang dilakukan secara padat karya dengan melibatkan petani yang menjadi sasaran kegiatan.
- (2) Mengembangkan berbagai aktivitas off-farm yang mampu membangkitkan penghasilan bagi petani dengan basis kegiatan yang terkait usahatani,

seperti wisata agro, industri rumah tangga berbahan baku hasil pertanian dan industri rumah tangga yang dapat menghasilkan peralatan pertanian sederhana.

- (3) Mengupayakan insentif bagi tumbuhnya industri hulu dan hilir pertanian.
- (4) Mengupayakan adanya payung hukum bagi bertumbuhnya Lembaga Pembiayaan Pertanian yang tersedia di perdesaan.

Adapun indikator utama, strategi, dan rencana aksi dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani pada periode lima tahun ke depan (2010-2014) dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15 Indikator Utama, Strategi, dan Rencana Aksi Peningkatan Kesejahteraan Petani

INDIKATOR UTAMA	STRATEGI	RENCANA AKSI	DUKUNGAN DARI K/L LAIN
▪ Pendapatan per kapita pertanian tahun 2014 sebesar Rp 7,93 juta per tahun ▪ Rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10 persen	1. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana 2. Revitalisasi SDM 3. Revitalisasi Pembiayaan 4. Revitalisasi Kelembagaan Petani 5. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir.	1. Meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), khususnya komoditas padi, agar petani mendapat jaminan kepastian harga jual padi yang mereka hasilkan. 2. Mengembangkan kelembagaan sistem tunda jual yang memungkinkan petani mendapatkan harga jual produk pertanian yang wajar. 3. Melakukan proteksi terhadap serbuan impor hasil-hasil pertanian, baik melalui instrumen tarif dan non tarif. Hal ini sangat dibutuhkan untuk melindungi kejatuhan harga pertanian akibat perdagangan internasional yang tidak adil (<i>unfair market</i>). 4. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menciptakan <i>captive market</i> bagi produk pertanian melalui sistem kontrak yang tidak merugikan petani. 5. Mengembangkan kelembagaan lumbung pangan yang bisa menjadi alat pelindung bagi petani dari kejatuhan harga 6. Pemberian subsidi input, khususnya pupuk dan benih/bibit. 7. Melakukan upaya yang memungkinkan diberikannya	1. <u>BULOG</u> : Stabilisasi harga pangan; pemberdayaan kelompok tani. 2. <u>Kementerian Koordinator Perekonomian + Kementerian Keuangan</u>: Subsidi saprodi bunga kredit, penjaminan, perpajakan, investasi, alokasi dana perimbangan khusus pertanian. 3. <u>PEMDA</u> : <i>Captive market</i>. 4. <u>Kementerian Perdagangan</u> : Kerjasama pemasaran LN, regulasi pajak impor barang modal, pengaturan prosedur ekspor-impor, perlindungan harga produk lokal, penataan struktur pasar.

INDIKATOR UTAMA	STRATEGI	RENCANA AKSI	DUKUNGAN DARI K/L LAIN
		keringanan pajak terhadap barang-barang modal atau sarana yang digunakan untuk berusahatani. 8. Mengupayakan pemberiakan subsidi bunga kredit untuk investasi dan modal kerja usahatani. 9. Memberikan bantuan sosial terhadap petani yang mengalami bencana alam atau gangguan produksi lainnya 10. Pengembangan infrastruktur oleh Pemerintah yang dilakukan secara padat karya. 11. Mengembangkan berbagai aktivitas <i>off-farm</i> yang mampu membangkitkan penghasilan bagi petani dengan basis kegiatan yang terkait usahatani. <u>Rencana Aksi Lainnya sesuai Kontrak Kinerja Kementerian Pertanian:</u> 12. Memastikan konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tataruang secara terpadu. 13. Memastikan konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga terkait pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2011.	

Untuk mencapai 4 (empat) target utama seperti diuraikan di atas yaitu: 1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, 2) Peningkatan Diversifikasi Pangan, 3) Peningkatan Nilai Tambah, daya Saing dan Ekspor, dan 4) Peningkatan Kesejahteraan Petani, maka diperlukan peran dan dukungan penelitian dan pengembangan. Kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian yang akan dikembangkan untuk mendukung pencapaian 4 (empat) target tersebut selama 5 (lima) tahun ke depan (2010-2014) secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 49.

2.4.2 Sasaran Makro

Sasaran makro pembangunan pertanian selama tahun 2010-2014 mencakup pertumbuhan PDB Pertanian, Neraca Perdagangan, Investasi, Tenaga Kerja, dan Nilai Tukar Petani.

2.4.2.1 Produk Domestik Bruto (PDB)

Selama periode 2010-2014, pertumbuhan PDB sektor pertanian dalam arti luas setiap tahunnya diharapkan tumbuh dengan kisaran 3,70-3,90%. Sementara itu, PDB pertanian dalam arti sempit (di luar perikanan dan kehutanan) diproyeksikan tumbuh dalam kisaran 3,62-3,75 (Tabel 2.16).

Tabel 2.16 Target Pertumbuhan PDB Sektor dan Sub Sektor Pertanian

TAHUN	PANGAN	KEBUN	TERNAK	PERTANIAN SEMPIT	IKAN	HUTAN	PERTANIAN LUAS
	(%)						
2010	3.33	4.01	4.30	3.62	5.66	-1.05	3.70
2011	3.31	3.99	4.28	3.61	5.64	-1.07	3.70
2012	3.39	4.08	4.36	3.69	5.73	-0.99	3.80
2013	3.47	4.16	4.44	3.77	5.81	-0.91	3.90
2014	3.45	4.14	4.42	3.75	5.79	-0.93	3.90

2.4.2.2 Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan pertanian diharapkan terus surplus, dimana kontribusi terbesar masih diharapkan dari subsektor perkebunan. Selama lima tahun ke depan (2010-2014), neraca perdagangan pertanian diharapkan surplus di atas US\$ 20 milyar dan terus meningkat hingga diatas US\$ 50 milyar per tahun (Tabel 2.17).

Tabel 2.17 Neraca Perdagangan Pertanian

Tahun	Pangan & Hortikultura	Kebun	Ternak	Pertanian Sempit
	(US\$ ribu)			
2010	-2.917.534	28.222.465	-972.452	24.332.495
2011	-3.142.957	33.964.948	-942.907	29.879.083
2012	-3.373.604	40.773.156	-883.210	36.516.342
2013	-3.613.728	49.100.847	-782.221	44.704.898
2014	-3.852.651	58.996.502	-630.126	54.513.725

2.4.2.3 Investasi Pertanian

Investasi pertanian yang dimaksud dalam hal ini adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Proyeksi investasi pertanian PMDN dan PMA selama lima tahun ke depan (2010-2014) berkisar Rp Rp. 45,9 – Rp. 464,9 Trilyun untuk PMDN dan Rp. 22,9 – Rp 199,9 Trilyun untuk PMA (Tabel 2.18).

Tabel 2.18 Target Investasi PMDN dan PMA

TAHUN	PMDN	PMA	
	(Rp milyar)	(Rp milyar)	(US \$ juta)
2009	26.022	13.487	1.317
2010	45.978	22.957	2.184
2011	81.118	39.016	3.616
2012	144.424	66.915	6.042
2013	259.460	115.804	10.188
2014	464.905	199.886	17.133
Laju (%)			
2010	76,7	70,2	65,8
2011	76,4	70,0	65,6
2012	78,0	71,5	67,1
2013	79,7	73,1	68,6
2014	79,2	72,6	68,2

2.4.2.4 Tenaga Kerja

Sektor Pertanian masih menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja. Untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, seyogyanya sektor pertanian tidak menanggung angkatan kerja yang besar. Berdasarkan catatan statistik tenaga kerja periode sebelumnya, diperkirakan masih akan banyak angkatan kerja nasional yang bekerja di sektor pertanian. Selama lima tahun ke depan (2010-2014), proyeksi penyerapan tenaga kerja pertanian tumbuh dalam kisaran 0,89-0,94 % setiap tahunnya (Tabel 2.19).

Tabel 2.19 Target Tenaga Kerja Pertanian

Tahun	Pertanian* (ribu orang)	Pertumbuhan (%)
2010	43.713	0,89
2011	44.114	0,92
2012	44.519	0,92
2013	44.938	0,94
2014	45.362	0,94

Keterangan: * Mencakup pertanian, perikanan dan kehutanan.

2.4.2.5. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) menggambarkan perbandingan antara indeks penerimaan dan indeks pengeluaran petani. Untuk periode tahun 2010-2014, sasaran angka NTP berkisar antar 115-120, yang berarti bahwa penerimaan petani diharapkan semakin lebih besar dari pengeluaran.

III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam penyusunan Rencana Strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian harus mengacu kepada kebijakan dan strategi nasional. Dalam rancangan RPJMN 2010-2014 (**Buku I**), ada 11 prioritas nasional yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. ***Ketahanan Pangan***
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Dari 11 Prioritas Nasional tersebut, yang terkait dengan Kementerian Pertanian yang utamanya adalah Prioritas ke-5, yaitu ***Ketahanan Pangan***. Dalam Rancangan RPJMN 2010-2014 tersebut, **TEMA Prioritas Ketahanan Pangan** adalah **Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam**. Peningkatan pertumbuhan **PDB sektor pertanian sebesar 3,7%** dan **Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 115-120 pada tahun 2014**.

Secara nasional, target pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi adalah: Rata-rata 6,3 – 6,8 persen, mencapai 7 persen pada tahun 2013 dan minimal 7 persen pada tahun 2014. Inflasi: rata-rata 4 – 6 persen, pengangguran: 5 – 6 persen pada tahun 2014, dan kemiskinan: 8 – 10 persen pada tahun 2014.

Prioritas **KETAHANAN PANGAN** dalam Buku I rancangan RPJMN 2010-2014 memiliki 6 (enam) Substansi Inti yaitu:

1). Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian

Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, Pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, dan Penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar.

2). Infrastruktur

Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya.

3). Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi.

4). Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi:

Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau.

5). Pangan dan Gizi

Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan.

6). Adaptasi Perubahan Iklim

Pengambilan langkah-langkah konkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

Dalam Rancangan RPJMN 2010-2014 (Buku I), disamping Prioritas Nomor 5. Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian juga mendapat amanah untuk terlibat dalam pelaksanaan Prioritas Nasional Nomor 1. **Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**, Nomor 8. **Energi**, dan Nomor 9. **Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana**.

Disamping terlibat dalam pencapaian Prioritas Nasional (RPJMN 2010-2014, Buku I), pembangunan pertanian ditempatkan pada kelompok pembangunan Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (RPJMN 2010-2014, **Buku II**) dengan 7 Prioritas Bidang yaitu:

- 1) ***Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan***
- 2) Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi
- 3) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
- 4) Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup
- 5) Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
- 6) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
- 7) Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam

Dari 7 Prioritas Bidang tersebut, yang terkait dengan Kementerian Pertanian utamanya adalah ***Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan***

Prioritas Bidang (RPJMN 2010-2014, Buku II): **Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan**

Kebijakan Umum:

- 1) Meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan serta kecukupan gizi masyarakat secara luas;
- 2) Mewujudkan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan; peningkatan pendapatan petani; dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Arah Kebijakan Strategis:

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan terus dilakukan untuk mendukung peningkatan ketersediaan pangan dan bahan baku industri.
 - (i) meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi, antara lain benih/bibit, pupuk, pakan, lahan, kapal, alat mesin, dan sarana tangkap termasuk kebijakan subsidi yang lebih efisien;
 - (ii) meningkatkan dukungan penelitian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknologi terapan serta penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 - (iii) meningkatkan efektivitas pengendalian organisme pengganggu tanaman, peningkatan kesehatan hewan/ikan, dan pengembangan sistem perkarantina;
 - (iv) mendorong investasi pangan, pertanian, perikanan, kehutanan, dan industri perdesaan yang berbasis produk lokal;
 - (v) mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara luas ke non pertanian serta konservasi sumber daya lahan dan air;
 - (vi) memperluas areal lahan pertanian dan perikanan baru serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering, lahan basah, dan lahan terlantar, termasuk lahan untuk pembudidayaan ikan dan perluasan wilayah tangkapan nelayan nasional ke ZEEI dan laut lepas;
 - (vii) membenahi, menata, dan mengharmonisasikan peraturan perundangan untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta untuk meningkatkan penguasaan lahan oleh petani/nelayan/pembudidaya ikan;
 - (viii) mengembangkan infrastruktur pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan seperti jalan produksi/usahatani, jalan desa, pencetakan sawah, jaringan irigasi, saluran tambak, tata air mikro, pelabuhan perikanan, dan infrastruktur perdesaan lainnya seperti transportasi, listrik, dan alat komunikasi; dan

- (ix) mengembangkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- 2). Peningkatan efisiensi distribusi pangan untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau.
- (i) meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk stabilisasi harga;
 - (ii) mengembangkan kebijakan perdagangan dan ekspor-impor untuk mendukung ketahanan pangan;
 - (iii) meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan agar lebih efisien dalam perdagangan dan mengurangi kerusakan bahan pangan;
 - (iv) mengembangkan kebijakan dan peraturan daerah yang dapat memperlancar dan mengefisienkan distribusi pangan antar daerah/wilayah; serta
 - (v) mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran produk pangan di perdesaan yang berbasis bahan pangan lokal.
- 3). Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan menjadi kebijakan dan strategi pembangunan ketahanan pangan yang perlu memperoleh perhatian yang memadai agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan.
- (i) Mengembangkan panganekaragaman (diversifikasi) pengolahan dan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - (ii) meningkatkan konsumsi ikan dan diversifikasi produk perikanan;
 - (iii) meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk keperluan bantuan pangan;

- (iv) meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan cadangan pangan;
 - (v) meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang pangan yang bergizi dan seimbang serta pola hidup sehat, terutama untuk memperbaiki status gizi ibu hamil dan anak balita;
 - (vi) mengembangkan penelitian pangan dan gizi, serta industri pangan lokal;
 - (vii) mengembangkan sistem mutu, kehalalan, dan keamanan pangan, termasuk pengendalian risiko penyakit zoonosis;
 - (viii) meningkatkan pencegahan dan penanganan keadaan rawan pangan dan gizi karena keterbatasan akses, akibat adanya bencana alam dan bencana sosial;
 - (ix) meningkatkan efisiensi dan efektivitas bantuan pangan/subsidi pangan kepada golongan masyarakat tertentu (masyarakat miskin, ibu hamil, balita gizi buruk);
 - (x) mengembangkan jaringan antarlembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan; serta
 - (xi) meningkatkan efektivitas fungsi lembaga ketahanan pangan dan gizi, baik di pusat maupun daerah.
- 4). Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (i) meningkatkan mutu produk pertanian, perikanan dan kehutanan, serta efisiensi produksi;
 - (ii) mengembangkan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta jasa pendukungnya;
 - (iii) membangun dan merehabilitasi sarana dan prasarana distribusi dan pemasaran serta manajemen logistik dalam menjaga kesinambungan pasokan produk;

- (iv) mengembangkan sentra usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan secara terpadu;
 - (v) mengembangkan kebijakan perdagangan internasional yang mendukung peningkatan daya saing nasional;
 - (vi) mengembangkan kebijakan perdagangan internasional dan peningkatan upaya diplomasi ke negara-negara pengimpor produk;
 - (vii) meningkatkan pengendalian, pengawasan dan advokasi tentang mutu, keamanan, dan kehalalan produk pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- 5). Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (i) meningkatkan pengetahuan petani/petani hutan/nelayan/petambak agar dapat meningkatkan kesejahteraannya;
 - (ii) meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan petani/petani hutan/nelayan/ petambak;
 - (iii) meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 - (iv) mengembangkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta diseminasinya kepada petani/nelayan/petambak;
 - (v) merumuskan kebijakan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang mendukung petani/petani hutan/nelayan/petambak;
 - (vi) mengembangkan sistem data dan informasi pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang integratif dan mudah diakses oleh petani/nelayan/ pembudidaya ikan;
 - (vii) meningkatkan kemampuan/keterampilan serta penguatan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan; dan
 - (viii) memfasilitasi dan mendorong pengembangan kelembagaan pembiayaan bagi masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan yang terjangkau.

Boks 3.1 Kaitan antara **Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan **Strategi** Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014**

RPJMN 2010-2014		RENSTRA DEPTAN 2010-2014	
BUKU I RPJMN 2010-2014		7 GEMA REVITALISASI	
Prioritas Nasional No. 5: KETAHANAN PANGAN		1.	Revitalisasi Lahan
6 Substansi Inti		2.	Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan
1.	Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian	3.	Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana
2.	Infrastruktur	4.	Revitalisasi Sumber Daya Manusia
3.	Penelitian dan Pengembangan	5.	Revitalisasi Pembiayaan Petani
4.	Investasi, Pembiayaan dan Subsidi	6.	Revitalisasi Kelembagaan Petani
5.	Pangan dan Gizi	7.	Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir
6.	Adaptasi Perubahan Iklim		
Selain Prioritas No.5, terlibat dalam pelaksanaan:		4 TARGET UTAMA DEPTAN	
1.	Prioritas Nasional No.1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1.	Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
2.	Prioritas Nasional No.8: Energi	2.	Peningkatan Diversifikasi Pangan
3.	Prioritas Nasional No. 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	3.	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor
		4.	Peningkatan Kesejahteraan Petani
BUKU II RPJMN 2010-2014			
Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
Prioritas Bidang No.1:			
Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan			
		Penjelasan: Target kontrak kinerja Kementerian Pertanian masuk di masing-masing ke-4 target tersebut (sub bab 2.4).	

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

3.2.1 Arah Kebijakan Kementerian Pertanian

- 1) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT).
- 2) Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekrutmen tenaga pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di perdesaan.
- 3) Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan.
- 4) Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri.
- 5) Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi komoditas impor.
- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas *public goods* melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, dan jalan usahatani.
- 7) Jaminan penguasaan lahan produktif.
- 8) Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani.
- 9) Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional.
- 10) Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan.
- 11) Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah.
- 12) Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif.

- 13) Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional.
- 14) Pengembangan *bio-energi* berbasis bahan baku lokal terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di perdesaan dan mensubstitusi BBM.
- 15) Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi.
- 16) Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu.
- 17) Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional.
- 18) Penguatan sistem perkarantina pertanian.
- 19) Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani.
- 20) Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota.
- 21) Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.
- 22) Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis.
- 23) Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan *good governance*.

3.2.2 Strategi Kementerian Pertanian

Dalam menjalankan tugas pelaksanaan pembangunan pertanian di Indonesia, strategi yang akan dikembangkan Kementerian Pertanian selama periode 2010-2014 yang akan datang adalah **TUJUH GEMA REVITALISASI**.

Boks 3.2

TUJUH GEMA REVITALISASI

1. Revitalisasi Lahan
2. Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan
3. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana
4. Revitalisasi Sumber Daya Manusia
5. Revitalisasi Pembiayaan Petani
6. Revitalisasi Kelembagaan Petani
7. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir

Penjabaran dari **TUJUH GEMA REVITALISASI** tersebut adalah sebagai berikut :

3.2.2.1 REVITALISASI LAHAN

Ketersediaan sumberdaya lahan, termasuk air, yang memadai baik secara kuantitas dan kualitas merupakan faktor yang sangat fundamental bagi pertanian. Lahan dan air sebagai media dasar tanaman harus dijaga kelestariannya agar sistem produksi dapat berjalan secara berkesinambungan.

Berkaitan dengan sumberdaya lahan dan air, beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian secara serius yaitu: ketersediaan, kesuburan atau pengelolaan, status dan kepemilikan.

1) *Ketersediaan Lahan Pertanian*

Ketersediaan lahan pertanian harus dipertahankan dalam jumlah tertentu untuk jangka panjang. Untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian di masa yang akan datang, selama lima tahun ke depan upaya yang akan dilakukan meliputi :

- a) Menindak lanjuti Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dengan Peraturan Pemerintah. UU PLP2B dan Peraturan Pemerintah pendukungnya merupakan perangkat hukum untuk melindungi dan mengatur konversi lahan pertanian.
- b) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar. Lahan pertanian terlantar ini meliputi lahan pertanian yang selama ini tidak dibudidayakan, lahan pertanian yang masih dalam wewenang sektor kehutanan, dan lahan kehutanan yang telah dilepas untuk keperluan pertanian tetapi belum dimanfaatkan.
- c) Membangun database yang akurat berisi ketersediaan dan keberadaan lahan secara geografis dan peruntukkan lahan untuk berbagai sub sektor pertanian.

2). *Kesuburan Lahan Pertanian*

Ketersediaan lahan yang memadai tidaklah mencukupi tanpa disertai dengan kondisi lahan yang subur. Pertanian yang intensif selama bertahun tahun secara

turun temurun terus dilakukan, penggundulan hutan di daerah hulu yang sangat intensif, dan kondisi iklim tropis yang khas dengan curah hujan yang tinggi menyebabkan tergerusnya sumber hara mineral yang sangat berharga di dalam tanah. Akibatnya kondisi lahan pertanian menjadi marjinal, yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak maksimal.

Untuk mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan marjinal maka upaya-upaya yang akan dilakukan adalah :

- a) Melakukan penanaman pohon di daerah kawasan sungai. Disamping itu, turut serta dalam upaya koordinasi lintas sektor untuk pengurangan pembabatan hutan. Hal ini merupakan upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan di hulu.
- b) Mendorong petani untuk menggunakan pupuk kimia secara berimbang dengan pupuk organik, dan menerapkan praktek budidaya pertanian yang tepat.

3). *Kepemilikan dan Status Lahan*

Kepemilikan dan status lahan merupakan aspek non teknik yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan lahan pertanian. Ketidak jelasan kepemilikan dan status lahan berpengaruh pada investasi dalam bidang pertanian. Petani sangat sulit untuk mendapatkan modal dari perbankan tanpa ada agunan. Demikian juga para investor sulit untuk melakukan investasi tanpa ada status dan kepemilikan lahan yang jelas. Sehingga semakin banyak lahan pertanian yang dijarah dan dirambah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu kepemilikan lahan petani yang sempit merupakan salah satu penyebab usaha tani menjadi tidak efisien.

Upaya untuk mengatasi masalah kepemilikan dan status lahan pertanian ini adalah membantu petani dalam sertifikasi lahan, mendorong pengelolaan dan konsolidasi lahan, mendorong pengelolaan warisan untuk tidak mengakibatkan kepemilikan lahan pertanian menjadi terfragmentasi atau terbagi menjadi lahan sempit dan/atau lahan non-pertanian. Semua upaya ini dimaksudkan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian dan membuat lahan usahatani berskala ekonomi.

4). *Ketersediaan Air Pertanian*

Penggunaan air semakin kompetitif dewasa ini. Di sisi lain, di satu tempat terjadi kekeringan karena kelangkaan air sementara di tempat lain terjadi banjir. Kejadian ini sering ditemui disepanjang tahun.

Agenda kerja yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian selama tahun 2010-2014 adalah:

- (1) Memperbaiki saluran irigasi
- (2) Memperbaiki struktur fisik tanah dengan penambahan bahan organik;
- (3) Membuat dam-dam kecil serta embung dan dam parit bertingkat;
- (4) Mengatur jadwal tanam;
- (5) Mencari teknologi budidaya varietas tahan kekeringan dan hemat air;
- (6) berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan konservasi hutan baik di daerah hulu maupun di daerah aliran sungai;
- (7) berkoordinasi dengan pihak PU untuk memperbaiki bendungan, waduk, dan saluran irigasi.

3.2.2.2 REVITALISASI PERBENIHAN DAN PERBIBITAN

Setelah lahan dan air maka dalam aspek budidaya ketersediaan benih dan bibit unggul merupakan suatu hal yang sangat fundamental. Perpaduan antara lahan yang subur dengan benih/bibit yang unggul akan memproduksi/melahirkan produksi yang unggul. Secara historis peran benih unggul telah dibuktikan pada saat keberhasilan dalam peningkatan produksi pada era Revolusi Hijau ditahun 1960-an, dan keberhasilan swasembada beras dan jagung yang dicapai baru-baru ini antara lain juga karena penggunaan benih unggul. Dengan demikian untuk mencapai dan mempertahankan swasembada pangan yang berkelanjutan maka perangkat perbenihan/perbibitan harus kuat.

Untuk memperbaiki perangkat perbenihan/perbibitan maka upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Menata kembali kelembagaan perbenihan/perbibitan nasional mulai dari tingkat pusat sampai di daerah.

- 2) Melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumberdaya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul lokal.
- 3) Mendorong sektor swasta untuk ikut berpartisipasi dalam usaha pengembangan bibit/benih.
- 4) Memperkuat tenaga tenaga pemuliaan di berbagai stratra/tingkat pendidikan.
- 5) Membentuk penangkar-penangkar benih unggul di tingkat lapangan
- 6) Memperbanyak/ekstensifikasi sumber-sumber bibit unggul baik dari sumber lokal maupun dari luar negeri.
- 7) Penerapan undang-undang perbenihan/perbibitan.

3.2.2.3 REVITALISASI INFRASTRUKTUR DAN SARANA

Jalan usaha tani sangat penting meningkatkan efisiensi usaha tani terutama dalam hal pengangkutan sarana produksi dan hasil panen. Upaya untuk membuat jalan usaha tani dan jalan tingkat desa perlu terus dilakukan. Untuk hal ini koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah setempat sangat diperlukan terutama untuk membuka akses ke daerah sentra produksi pertanian.

Untuk mengarah ke pertanian yang industrial, penggunaan alat dan mesin pertanian tidak dapat dihindari karena penggunaan alsin dapat meningkatkan efisiensi usaha pertanian. Untuk memberikan penyediaan dan pelayanan alsin secara tepat kepada petani maka beberapa upaya perlu dilakukan adalah :

- 1) Memperkuat kelembagaan alsin di pusat yang bertujuan untuk membuat kebijakan dan regulasi berkaitan dengan pembuatan, penyebaran dan penggunaan alat mesin di tingkat petani secara bertanggung jawab.
- 2) Mendorong unsur swasta untuk mendesain, memproduksi dan menyebarkan alsin sesuai dengan kualitas standar nasional.
- 3) Bekerjasama dengan sektor terkait untuk mendorong terbentuknya fasilitas bengkel-bengkel alsin di daerah.
- 4) Mengusahakan skim bantuan permodalan dalam pengadaan aslin di tingkat petani.

3.2.2.4 REVITALISASI SUMBERDAYA MANUSIA

Manusia merupakan sumberdaya yang sangat vital karena merupakan pelaku utama pembangunan, termasuk pertanian. Tanpa pelaku yang handal dan berkompeten, maka pembangunan pertanian tidak dapat berjalan secara optimal. Kementerian Pertanian mengembangkan berbagai kegiatan bagi peningkatan sumberdaya manusia pertanian melalui pendidikan, pelatihan, magang, dan sekolah lapang. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini diperuntukkan bagi petani dan aparatur pertanian.

Penyuluh pertanian merupakan aparatur pertanian yang paling dekat tugasnya dengan petani. Namun demikian sejak otonomi keberadaan dan kelembagaan penyuluh menjadi lemah karena perhatian pemerintah daerah yang sangat beragam dan selain usia para penyuluh rata-rata sudah mendekati masa purna bakti. Sejak era otonomi daerah, perekrutan tenaga penyuluh tidak pernah dilakukan secara serius, akibatnya jumlah dan kualitasnya sangat menurun. Mengingat pentingnya tenaga penyuluh di lapangan serta kondisi keberadaannya maka pada masa 2005-2009 telah dilakukan perekrutan dalam bentuk Tenaga Harian Lepas (THL) karena keterbatasan untuk mendapat formasi pegawai negeri sipil. Untuk memperkuat sistem penyuluhan di masa yang akan datang maka upaya upaya yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Meningkatkan jumlah formasi penyuluh di daerah.
- 2) Mendorong munculnya tenaga penyuluh swadaya.
- 3) Memberikan bimbingan teknis dan usahatani produktif termasuk dalam mengakses informasi teknologi dan informasi pasar.
- 4) Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah berkaitan rekrutmen dan pembiayaan tenaga penyuluh daerah.

3.2.2.5 REVITALISASI PEMBIAYAAN PETANI

Kendala yang dialami petani utamanya petani menengah kebawah adalah akses terhadap permodalan. Hal ini disebabkan karena masalah klasik yaitu tidak adanya jaminan/agunan yang dipersyaratkan perbankan. Pada kondisi ini petani terpaksa berhubungan dengan rentenir yang sudah barang tentu dengan bunga yang sangat mencekik.

Untuk memperbaiki kendala ini maka upaya-upaya yang selama ini dilakukan perlu diteruskan seperti:

- 1) Penyediaan skim perkreditan dengan kemudahan proses administrasi seperti KKP-E, KPEN-RP, KUPS.
- 2) Memperluas skim baru yang lebih mudah.
- 3) Menumbuhkan kelembagaan ekonomi mikro di pedesaan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi di pusat dan di daerah untuk mempermudah petani dalam mengakses sumber pembiayaan koperasi termasuk skim pembiayaan yang sudah ada.
- 5) Menumbuhkan kembali koperasi khusus dibidang pertanian.

3.2.2.6 REVITALISASI KELEMBAGAAN PETANI

Kegiatan pertanian secara alami melibatkan sumberdaya manusia (petani) yang cukup banyak, sarana produksi dan permodalan yang cukup besar. Selain itu juga sangat berhubungan erat dengan sumber inovasi teknologi dan informasi pasar mulai dari hulu sampai hilir. Dengan karakteristik seperti ini maka untuk mempermudah melakukan koordinasi sangat diperlukan kelembagaan petani. Melalui kelembagaan petani, mereka dengan mudah melakukan koordinasi diantara mereka dan antara kelompok. Demikian juga melalui kelompok mereka akan menjadi kuat untuk bisa mengakses pasar dan informasi.

Menyadari manfaat keberadaan kelompok tani maka ke depan upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Terus memperbanyak kelompok dan gabungan kelompok tani;
- 2) Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis untuk memperkuat kemampuan baik dari segi aspek budidaya maupun dalam aspek pemasaran;
- 3) Memperluas jenis kelompok tani sesuai dengan bidang usaha, misalnya kelompok PHT, IB, P3A, Revitbun dsb.;

- 4) Memperkuat modal usaha bagi kelompok/gabungan kelompok melalui pemberian bantuan modal, dan memperkuat jaringan kelompok tani dengan penyuluh lapangan.

3.2.2.7 REVITALISASI TEKNOLOGI DAN INDUSTRI HILIR

Hal yang perlu dilakukan dalam rangka revitalisasi teknologi dan industri hilir adalah:

- 1). *Meningkatkan kegiatan penelitian khususnya dalam rangka penciptaan inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan dan produk olahan serta pemanfaatan sumberdaya lahan dan air*

Kementerian Pertanian mendatang akan difokuskan pada upaya untuk menghasilkan: (a) bibit, benih unggul, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan dan produk olahan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan, (b) inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya pertanian, (c) rekomendasi kebijakan pertanian, (d) penelitian pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) yang efektif dan ramah lingkungan, dan (e) adopsi inovasi teknologi hasil penelitian dan pengembangan.

Kementerian Pertanian juga akan terus mengembangkan inovasi teknologi pertanian, merumuskan kebijakan pembangunan pertanian yang bersifat antisipatif dan responsif serta berbagai model kerja sama kelembagaan antar pelaku usaha untuk mendistribusikan insentif teknologi secara proporsional dalam kerangka sistem pertanian industrial. Jaringan kerja sama nasional dan internasional dalam rangka penguasaan IPTEK atau inovasi pertanian akan terus dikembangkan.

Badan Litbang akan menyiapkan rekomendasi teknologi, terutama teknologi budidaya terkait dengan perubahan iklim dan penerapan praktek pertanian yang berwawasan kelestarian lingkungan hidup.

- 2). *Mempercepat diseminasi hasil penelitian dengan mengoptimalkan kelembagaan pengkajian, diklat, penyuluhan, tenaga teknis pertanian lapangan dan kelembagaan petani*

Percepatan diseminasi teknologi pertanian hasil litbang dilaksanakan melalui berbagai metode dan media diseminasi inovasi teknologi pertanian mutakhir, efektif dan efisien. Hasil-hasil penelitian terus dirakit dan dikemas dalam bentuk yang mudah diketahui, dipahami dan diakses oleh petani.

Kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pertanian lainnya, termasuk aparat penyuluh dan kelompok tani perlu ditingkatkan kemampuannya dalam mengakses informasi teknologi baik dari dalam maupun luar negeri. Kegiatan pengkajian teknologi spesifik lokasi dilaksanakan dengan lebih mengintensifkan peranserta pemerintah daerah.

- 3). *Mendorong pengembangan industri pengolahan pertanian di pedesaan secara efisien guna peningkatan nilai tambah dan daya saing di pasar dalam negeri dan internasional*

Strategi pembangunan pertanian ke depan adalah **pengembangan agroindustri pedesaan** yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan baik produk antara (*intermediate product*) maupun produk akhir (*finish product*). Termasuk di dalamnya adalah industri pengolahan makanan dan minuman, industri biofarmaka, industri bio-energi, industri pengolahan hasil ikutan (*by-product*).

Oleh karenanya perlu ditingkatkan koordinasi dengan sektor terkait baik di pusat maupun di daerah untuk membangun sebanyak mungkin industri pengolahan pertanian di pedesaan sesuai dengan sumberdaya lokal dengan standar dan kualitas pasar internasional.

- 4). *Meningkatkan jaminan pemasaran dan stabilitas harga komoditas pertanian*

Dalam mata rantai agribisnis aspek yang sering menjadi masalah yang dihadapi petani adalah jaminan pemasaran produk, dan harga yang diterima petani. Sudah menjadi hal yang rutin dialami petani adalah sulitnya memasarkan produk

yang mereka hasilkan dan rendahnya harga yang diterima terutama pada saat panen raya. Upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain :

- a) Melanjutkan upaya intervensi stabilisasi harga melalui pembelian dari BULOG khususnya untuk komoditi beras pada saat panen.
- b) Melanjutkan dan menerapkan secara intensif sistem pembelian dengan resi gudang.
- c) Berupaya untuk memberikan perlindungan melalui kebijakan non-tarif khususnya komoditi impor agar harga dalam negeri tidak jatuh seperti pada susu.
- d) Membentuk jaringan informasi pasar dan menyebarkan ke seluruh wilayah.
- e) Melakukan promosi pemasaran terhadap komoditi-komoditi ekspor.

5). *Meningkatkan dan menjaga mutu dan keamanan pangan pada semua tahapan produksi mulai dari hulu sampai hilir*

Peningkatan mutu hasil pertanian ditempuh melalui penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dengan memperkuat : (a) kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD); (b) SDM inspektor, auditor, fasilitator dan pengawas; dan (c) sistem dan prosedur.

Standardisasi produk produk pertanian mulai dari hulu sampai hilir perlu dilakukan untuk komoditas-komoditas yang mempunyai prospek pasar luar negeri.

3.2.3 Program dan Kegiatan Kementerian Pertanian

Sesuai pedoman dalam **Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP)**, setiap eselon I mempunyai satu program dan nama program mencerminkan nama eselon I, sehingga di lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 12 program.

Dua belas program yang dilaksanakan Kementerian Pertanian untuk periode 2010-2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

- 2) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
- 3) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
- 4) Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal.
- 5) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
- 6) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
- 7) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 8) Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
- 9) Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani
- 10) Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
- 11) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
- 12) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian

Boks 3.3 Pokok-Pokok Reformasi Perencanaan dan Penganggaran
(SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan, No. 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009)

- Penganggaran berbasis kinerja (tiap pejabat atau unit kerja melaksanakan kegiatan sesuai TUPOKSI organisasi)
- Kerangka pengeluaran jangka menengah

Unit Kerja	Basis Penyusunan Kinerja	Instrumen	Indikator Kinerja
Menteri	Tupoksi		Impact
Eselon I	Tupoksi	Program*	Outcome
Eselon II	Tupoksi	Kegiatan**	Output

Keterangan:

- * Nama program mencerminkan nama unit organisasi Eselon I yang bersangkutan.
- ** Nama kegiatan mencerminkan nama unit organisasi Eselon II yang bersangkutan.

Pokok-pokok Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP) seperti pada tabel tersebut di atas diuraikan pada sub bab 3.2.3 dan dijabarkan lebih rinci dalam bentuk tabel keterkaitan Program, Kegiatan, Sasaran, Indikator, Target dan Pendanaan sebagaimana pada Lampiran 1.

Uraian kegiatan dari masing-masing program adalah sebagai berikut:

1) PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA & SWASEMBADA BERKELANJUTAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan di bawah program tersebut adalah:

- (1) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia.
- (2) Pengelolaan Produksi Tanaman Kacang-kangan dan Umbi-umbian.
- (3) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan.
- (4) Penyaluran Subsidi Benih Tanaman Pangan.
- (5) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Tanaman Pangan.
- (6) Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

- (7) Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DFI.
- (8) Pengembangan Metoda Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih.
- (9) Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (10) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

2) PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU PRODUK TANAMAN HORTIKULTURA BERKELANJUTAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan di bawah program tersebut adalah:

- (1) Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Tanaman Buah.
- (2) Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka.
- (3) Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Tanaman Hias.
- (4) Pengembangan Sistem Perbenihan, Pupuk dan Sarana Produksi lainnya.
- (5) Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura.
- (6) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura.

3) PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan di bawah program tersebut adalah:

- (1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim.
- (2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan.
- (3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar.
- (4) Dukungan Penyediaan Benih Unggul Bermutu dan Sarana Produksi Perkebunan.
- (5) Dukungan Perlindungan Perkebunan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan.

- (6) Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Surabaya.
- (7) Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Medan.
- (8) Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Ambon.
- (9) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.

4) PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI DAN PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTH, DAN HALAL

Kegiatan yang akan dilaksanakan di bawah program tersebut adalah:

- (1) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih/Bibit dengan Mengoptimalkan Sumberdaya Lokal.
- (2) Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia dengan Pendayagunaan Sumberdaya Lokal.
- (3) Peningkatan Produksi Ternak Non Ruminansia dengan Pendayagunaan Sumberdaya Lokal.
- (4) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis.
- (5) Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan
- (6) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Peternakan.

5) PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan di bawah program tersebut adalah:

- (1) Perluasan Areal Pertanian.
- (2) Pengelolaan Air untuk Pertanian.
- (3) Pengembangan Pengelolaan Lahan Pertanian.
- (4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air.

6) PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN, DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan di bawah program tersebut adalah:

- (1) Pengembangan Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian.
- (3) Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian.
- (4) Pengembangan Pemasaran Domestik.
- (5) Pengembangan Pemasaran Internasional.
- (6) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

7) PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Kegiatan yang akan dilaksanakan di bawah program tersebut adalah:

- (1) Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan.
- (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.
- (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar.
- (4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

8) PENCIPTAAN TEKNOLOGI DAN VARIETAS UNGGUL BERDAYA SAING

Kegiatan yang akan dilaksanakan di bawah program tersebut adalah:

- (1) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- (2) Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura.
- (3) Penelitian /Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- (4) Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian.
- (5) Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian Mendukung P2BN dan Hortikultura.

- (6) Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian.
- (7) Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian.
- (8) Penelitian /Perekayasa dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian.
- (9) Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan.
- (10) Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.
- (11) Penelitian dan Pengembangan Peternakan dan Veteriner.
- (12) Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian.

9) PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN PETANI

Kegiatan yang akan dilaksanakan di bawah program tersebut adalah:

- (1) Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian.
- (2) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian.
- (3) Pengembangan Reorientasi Pendidikan Pertanian.
- (4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

10) PENINGKATAN KUALITAS PERKARANTINAAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI

Kegiatan yang akan dilaksanakan di bawah program tersebut adalah:

- (1) Peningkatan Sistem Karantina Hewan.
- (2) Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan.
- (3) Pengembangan Sistem Informasi Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati.
- (4) Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.
- (5) Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar Karantina Pertanian.
- (6) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Karantina Pertanian.

11) PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan di bawah program tersebut adalah:

- (1) Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan Badan PSDM Pertanian.
- (2) Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Ditjen TP, Ditjen PLA dan BKP.
- (3) Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian.
- (4) Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Badan Karantina Pertanian.
- (5) Peningkatan Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan untuk Tujuan Tertentu.
- (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya pada Inspektorat Jenderal.

12) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERTANIAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan di bawah program tersebut adalah:

- (1) Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian.
- (2) Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Kementerian serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat.
- (3) Pembinaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pertanian dan Koordinasi Pemasarakatan Pembangunan Pertanian.
- (4) Pengembangan Kerjasama Luar Negeri Untuk Bidang Pangan dan Pertanian Dalam Kerangka Bilateral, Regional, Multilateral serta PBB.
- (5) Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
- (6) Pelayanan Perizinan dan Investasi Pertanian.
- (7) Pelayanan Pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui LM3.

- (8) Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian.
- (9) Pengembangan Perlindungan dan Pendaftaran Varietas Tanaman.

3.2.4 Dukungan Sektor Lain Untuk Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian merupakan masalah kompleks, hingga membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai fungsi dan kebijakan. Hanya saja berbagai fungsi dan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah wewenang Kementerian Pertanian, bahkan lebih banyak berada di bawah kewenangan Kementerian atau Lembaga lain. Oleh karena itu penanganan pembangunan pertanian mau tidak mau membutuhkan dukungan dan kerja sama dari kementerian/lembaga lain.

Dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan, diperlukan dukungan kebijakan makro, yaitu kebijakan fiskal dan moneter seperti subsidi sarana produksi, bunga kredit, penjaminan, perpajakan, investasi serta kebijakan alokasi dana perimbangan yang secara khusus dialokasikan untuk sektor pertanian.

Dari Kementerian Dalam Negeri diperlukan dukungan kebijakan pengawasan penetapan Peraturan Daerah, terutama terhadap retribusi daerah yang menekan harga dan daya saing produk pertanian.

Dari Kementerian Pekerjaan Umum diperlukan dukungan berbagai kebijakan antara lain pengawasan penetapan Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak melindungi aktivitas pertanian, pengembangan infrastruktur jaringan jalan produksi, pembangunan dan rehabilitasi waduk dan embung besar, pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder di wilayah sentra produksi pertanian serta pengembangan infrastruktur pergudangan di pelabuhan dan pasar yang secara khusus dirancang sesuai dengan karakteristik produk pertanian.

Dari Kementerian Perdagangan diperlukan dukungan kebijakan penataan kerja sama pemasaran internasional di negara tujuan ekspor; pengaturan pajak impor barang modal yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; pengaturan pajak dan prosedur ekspor dan impor yang mendukung peningkatan harga produk segar dan olahan yang berorientasi ekspor serta perlindungan harga bagi produk substitusi impor yang telah mampu dihasilkan masyarakat petani; penataan struktur pasar dalam negeri yang masih menekan nilai jual produk dan kenaikan harga sarana produksi di tingkat usaha tani.

Dari Kementerian Perindustrian diperlukan dukungan kebijakan pengembangan kompetensi inti industri nasional dan daerah yang memproduksi barang modal dan sarana produksi yang mendukung produksi primer dan olahan komoditas pertanian.

Dari Kementerian Perhubungan diperlukan dukungan ketersediaan kapasitas, tarif dan kelancaran arus transportasi perdagangan sarana produksi dan komoditas pertanian, baik di tingkat lokal, antar pulau maupun internasional; serta penyebaran informasi perkembangan harga harian komoditas pertanian di tingkat usaha tani dan pusat-pusat pemasaran.

Dari Kementerian Kehutanan diperlukan dukungan kebijakan konservasi hutan lindung dan daerah aliran sungai untuk menjamin ketersediaan air irigasi serta menekan degradasi lahan dan air pertanian; peningkatan produksi komoditas pertanian di hutan produksi dan hutan kemasyarakatan; pemeliharaan plasma nutfah pertanian *in situ*; rehabilitasi lahan pertanian terlantar yang belum digunakan; serta kemudahan pelepasan kawasan budi daya yang diperuntukan untuk perluasan areal pertanian.

Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan diperlukan dukungan kebijakan untuk pelestarian sumber daya air di darat (danau dan situ) untuk menjamin ketersediaan air pertanian melalui pengembangan usaha budidaya perikanan

serta pengembangan integrasi budidaya perikanan tumpang sari (usaha mina) untuk meningkatkan pendapatan petani dan perlindungan tanaman melalui pengendalian musuh alami oleh ikan.

Dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi diperlukan dukungan kebijakan pengembangan wilayah transmigrasi menjadi kawasan agropolitan serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja pertanian yang akan menjadi buruh migran.

Dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diperlukan dukungan kebijakan pengembangan penyediaan bahan baku energi alternatif berbasis komoditas dan limbah komoditas pertanian serta pengembangan energi terbarukan (mikro hidro, surya, angin dan panas bumi) yang tersedia di daerah terpencil dan di sentra produksi untuk mendukung efisiensi proses produksi pertanian.

Dari Kementerian Agama diperlukan dukungan kebijakan untuk memasyarakatkan program percontohan pembangunan pertanian melalui pengabdian masyarakat oleh pemuka agama.

Dari Kementerian Negara dan Usaha Kecil dan Menengah diperlukan dukungan kebijakan penataan dan pengembangan kelembagaan usaha tani menjadi kelembagaan koperasi yang berbasis pada usaha pengolahan, perdagangan maupun penyediaan aneka jasa, terutama permodalan usaha yang dibutuhkan untuk proses produksi pertanian.

Dari Kementerian Pendidikan Nasional diperlukan dukungan kebijakan untuk mendidik anak usia sekolah secara dini untuk mengenal dan mencintai lingkungan hidup dan kebanggaan terhadap profesi petani dan produk pertanian dalam negeri serta pendidikan diversifikasi pangan dengan mengkonsumsi bahan pangan lokal.

Dari Kementerian Kesehatan diperlukan dukungan kebijakan untuk membina dan melindungi petani/peternak dan masyarakat melalui proses produksi bersih dan pemeliharaan keamanan lingkungan dari penyakit zoonosis; pemasyarakatan Pola Pangan Harapan yang mendukung diversifikasi konsumsi pangan; serta pengawasan produk pertanian yang tidak halal.

Dari Badan Pertanahan Nasional diperlukan dukungan kebijakan untuk mencegah dan menekan laju konversi lahan pertanian ke non pertanian, penetapan status penguasaan lahan serta perwujudan dan perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan.

Dari Badan Koordinasi Penanaman Modal diperlukan dukungan kebijakan untuk penyediaan informasi investasi komoditas dan daerah sentra dan pengembangan produksi pertanian unggulan nasional serta kebijakan pemberian insentif investasi bagi penanaman modal langsung industri primer dan olahan produk pertanian.

Dari Badan Meteorologi dan Klimatologi diperlukan dukungan kebijakan untuk menata jaringan dan melayani penyediaan informasi prakiraan perubahan dan anomali iklim serta bencana alam yang berpotensi mengancam produksi dan keselamatan masyarakat petani.

Dari Perum BULOG diperlukan dukungan kebijakan stabilisasi harga pangan pada harga yang wajar bagi petani produsen dan masyarakat konsumen; serta memberdayakan usaha kelompok tani yang mampu bekerja sama langsung dalam pemasaran produk pertanian yang dihasilkannya.

Dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi diperlukan dukungan kebijakan untuk pembinaan peningkatan kapasitas lembaga dan sumber daya peneliti untuk menghasilkan penelitian rintisan maupun terapan yang mendorong daya saing komoditas dan

daerah; melindungi dan memasyarakatkan hasil penelitian unggulan tepat guna yang dibutuhkan masyarakat dan petani; serta kebijakan untuk mengembangkan kerja sama dan pemanfaatan hasil penelitian dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi maupun industri.

Dari Perguruan Tinggi diperlukan dukungan kebijakan untuk mengembangkan jurusan dan strata pendidikan yang menyiapkan mahasiswa untuk menjadi pelopor pembangunan pertanian pedesaan serta meningkatkan pembinaan dan pendampingan daerah melalui pengabdian masyarakat.

3.2.5 Pembiayaan Pembangunan Pertanian

Dengan menggunakan pendekatan ICVAR (*Incremental Capital Value-Added Ratio*), untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pertanian guna mencapai target yang telah ditetapkan selama periode jangka waktu 2010-2014 adalah sangat besar, yaitu sekitar Rp 220 triliun lebih setiap tahunnya. Sebagian besar (85-90)% merupakan pembiayaan yang bersumber dari swasta, perbankan dan masyarakat. Sebagian kecil (sekitar 10-15%) anggaran tersebut disediakan oleh pemerintah baik melalui APBN maupun APBD.

Besaran pembiayaan pembangunan pertanian selama 2010-2014 yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian ini hanya yang berasal dari pendanaan APBN dengan rincian alokasi anggaran setiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 1.

IV. PENUTUP

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan pertanian nasional 2010 – 2014 akan diwujudkan melalui pencapaian 4 (empat) target utama yaitu: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta (4) peningkatan kesejahteraan petani. Selanjutnya target tersebut akan menjadi pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan sasaran pembangunan pertanian di tingkat nasional dan regional yang disesuaikan dengan potensi sumber daya serta karakteristik permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Disadari bahwa untuk mencapai target tersebut di atas tidaklah mudah, namun berdasarkan keragaan dan kinerja pembangunan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir dan dengan tekad kerja keras, kita optimis bahwa target tersebut dapat dicapai apabila para pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan.

Kerja sama antar pelaku pembangunan pertanian sangat dibutuhkan, karena pembangunan pertanian merupakan masalah kompleks, hingga membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai fungsi dan kebijakan. Hanya saja berbagai fungsi dan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah wewenang Kementerian Pertanian dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pertanian, bahkan lebih banyak berada di bawah kewenangan Kementerian/Lembaga atau SKPD lain. Oleh karena itu penanganan pembangunan pertanian mau tidak mau membutuhkan kerja sama dari sektor lain, mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya di lapangan.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
1	<u>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Pertanian</u>	Peningkatan pelaksanaan kegiatan Departemen Pertanian melalui dukungan koordinasi, pembinaan dan pelayanan administrasi	► Jumlah dokumen perencanaan, keuangan & perlengkapan, hukum & humas, kerjasama luar negeri, organisasi dan kepegawaian, statistik dan sistem informasi pertanian	24 paket	24 paket	24 paket	24 paket	24 paket	1.417.41	1.488.27	1.562.69	1.640.82	1.722.86
			► Jumlah ijin usaha pertanian, ijin pemasukan/pengeluaran benih/bibit, obat hewan dan pakan ternak, produk ternak dan agensia hayati, serta rekomendasi produk pangan	2500	2850	4200	4500	5000					
			► Realisasi penyaluran kredit program untuk pertanian (KKP-E, KUR)	1,5 trilyun	2 trilyun	2 trilyun	2 trilyun	2,5 trilyun					
			► Realisasi penyaluran pembiayaan syariah dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian	4 trilyun	5 trilyun	6 trilyun	7 trilyun	8 trilyun					
			► Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan	200	200	200	200	200					
			► Jumlah Gapoktan PUAP (unit)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000					
1.1	Koordinasi dan pembinaan perencanaan Departemen Pertanian	Peningkatan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kerja kebijakan dan program, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan	Jumlah dokumen koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kerja kebijakan dan program, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan (paket)	4	4	4	4	4	86.67	91.00	95.55	100.33	105.34
1.2	Pengelolaan keuangan dan perlengkapan departemen serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat Departemen Pertanian	Peningkatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan secara akuntabel dan transparan	Jumlah dokumen koordinasi dan pembinaan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak, verifikasi dan akuntansi, perlengkapan serta rumah tangga (paket)	4	4	4	4	4	134.57	141.30	148.37	155.78	163.57
1.3	Pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian serta koordinasi humas dan komunikasi publik di bidang pertanian	Terbitnya produk hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, serta terbitnya produk humas dan terlaksananya komunikasi publik di bidang informasi pembangunan pertanian	Jumlah dokumen pembinaan, koordinasi produk hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, produk humas serta terlaksananya komunikasi publik dan tersedianya sistem informasi pembangunan pertanian (paket)	4	4	4	4	4	44.00	46.20	48.51	50.94	53.48
1.4	Pengembangan kerjasama luar negeri untuk bidang pangan dan pertanian dalam kerangka bilateral, regional, multilateral serta PBB	Peningkatan kerja sama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional, multilateral serta PBB	Jumlah dokumen koordinasi dan pembinaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional, multilateral serta PBB (paket)	4	4	4	4	4	16.16	16.97	17.81	18.70	19.64

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
									2010	2011	2012	2013	2014
1.5	Peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian	Penataan kelembagaan, pelayanan administrasi dan perencanaan serta pengembangan pegawai dan mutasi	Jumlah dokumen koordinasi dan pembinaan penataan kelembagaan, tatalaksana perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, serta reformasi birokrasi (paket)	4	4	4	4	4	45.24	47.51	49.88	52.37	54.99
1.6	Pelayanan perizinan dan investasi pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Peningkatan penerimaan penyiapan bahan analisa, fasilitas proses teknis permohonan ijin, pendaftaran di bidang pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, benih/bibit, produk ternak dan pangan segar serta penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi	► Jumlah ijin usaha pertanian, ijin pemasukan/pengeluaran benih/bibit, obat hewan dan pakan ternak, produk ternak dan agensia hayati, serta rekomendasi produk pangan	2500	2850	4200	4500	5000	9.36	9.83	10.32	10.83	11.38
			► Bahan informasi dan bahan kebijakan pengembangan investasi pertanian (publikasi, pameran, bahan analisis untuk kebijakan pertanian)	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	2.25	2.36	2.48	2.60	2.73
1.7	Pelayanan pembiayaan pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Prioritas Nasional dan Bidang)	Peningkatan realisasi penyaluran kredit program (KKP-E dan KUR) pembiayaan komersial, pembiayaan syariah, pengembangan sentra usaha pertanian perdesaan, dan pengembangan Gapoktan PUAP	► Realisasi penyaluran kredit program untuk pertanian (KKP-E, KUR)	1,5 trilyun	2 trilyun	2 trilyun	2 trilyun	2,5 trilyun	2.18	2.28	2.40	2.52	2.64
			► Realisasi penyaluran pembiayaan syariah dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian	4 trilyun	5 trilyun	6 trilyun	7 trilyun	8 trilyun	6.58	6.91	7.26	7.62	8.00
			► Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan	200	200	200	200	200	3.62	3.80	3.99	4.19	4.40
			► Jumlah Gapoktan PUAP (unit)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1005.00	1055.25	1108.01	1163.41	1221.58
1.8	Pengembangan perstatistikan dan sistem informasi pertanian	Tersedianya data, metodologi, hasil analisis dan sistem informasi pertanian	Jumlah data, metodologi, hasil analisis tanaman pangan dan peternakan, hortikultura dan perkebunan, sistem informasi pertanian serta tata usaha (paket)	4	4	4	4	4	54.78	57.51	60.39	63.41	66.58
1.9	Pengembangan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman (Prioritas Bidang)	Peningkatan kinerja pelayanan teknis, hukum dan administrasi perlindungan varietas tanaman	Jumlah pelayanan teknis, hukum dan administrasi perlindungan varietas tanaman (buah)	300	400	500	600	700	7.00	7.35	7.72	8.10	8.51
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Departemen Pertanian	Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Departemen Pertanian	► Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan intern pada unsur Departemen Pertanian untuk mewujudkan good governance dan clean government (Kinerja/Satker)	384	384	384	384	384	66.11	67.51	69.01	70.51	72.01
			► % proses administrasi dan dukungan teknis Ijin tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
			► % temuan laporan audit internal Departemen Pertanian ditindaklanjuti										
			• Tahun Tunjgal (awal)	65%	75%	80%	85%	90%					
			• Rata-rata 5 tahun	79%	79%	79%	79%	79%					

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
2.1	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Inspektorat Jenderal	Meningkatnya kapasitas manajemen administrasi, sumberdaya, sarana dan prasarana, anggaran serta piranti lunak organisasi lingkup Inspektorat Jenderal	Jumlah rumusan rencana, program, dan anggaran pengawasan; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program serta tersusunnya laporan kegiatan dibidang pengawasan; pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dan urusan peraturan perundang-undangan; pengelolaan urusan keuangan, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga; pemantauan, analisis, evaluasi dan penilaian penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; dan kegiatan pembinaan SPI pada unit kerja lingkup Departemen Pertanian (Paket)	34	34	34	34	34	33.13	34.53	36.03	37.53	39.03
2.2	Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Pengembangan SDM Pertanian	Meningkatnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja dan pengelolaan keuangan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Pengembangan SDM Pertanian	► Jumlah kegiatan pemeriksaan kinerja dan pengelolaan keuangan pada Satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Pengembangan SDM Pertanian (Satker dan Pelaporan)	96	96	96	96	96	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23
			► Jumlah kegiatan evaluasi LAKIP, review laporan keuangan, dan pemeriksaan anggaran bantuan luar negeri pada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Pengembangan SDM Pertanian (Laporan)	33	33	33	33	33	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
			► Jumlah kegiatan pemantauan/pengawasan dan evaluasi pada Satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Pengembangan SDM Pertanian (Kegiatan dan Pelaporan)	2	2	2	2	2	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
2.3	Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PLA, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan & Badan Ketahanan Pangan	Meningkatnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja dan pengelolaan keuangan lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Badan Ketahanan Pangan	► Jumlah kegiatan pemeriksaan kinerja dan pengelolaan keuangan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Badan Ketahanan Pangan (Satker dan Pelaporan)	96	96	96	96	96	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
			► Jumlah kegiatan evaluasi LAKIP, review laporan keuangan, dan pemeriksaan anggaran bantuan luar negeri pada unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Badan Ketahanan Pangan (Laporan)	9	9	9	9	9	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
			► Jumlah kegiatan pemantauan/pengawasan dan evaluasi pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Badan Ketahanan Pangan (Kegiatan dan Pelaporan)	2	2	2	2	2	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
2.4	Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal P2HP, dan Badan Litbang Pertanian	Meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kinerja dan pengelolaan keuangan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	► Jumlah kegiatan pemeriksaan kinerja dan pengelolaan keuangan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Satker dan Pelaporan)	96	96	96	96	96	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23
			► Jumlah kegiatan evaluasi LAKIP, review laporan keuangan, dan pemeriksaan anggaran bantuan luar negeri pada unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Laporan)	17	17	17	17	17	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
			► Jumlah kegiatan pemantauan/pengawasan dan evaluasi pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Kegiatan dan Pelaporan)	2	2	2	2	2	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
2.5	Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Peternakan, Badan Karantina Pertanian, dan Inspektorat Jenderal	Meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kinerja dan pengelolaan keuangan lingkup Direktorat Jenderal Peternakan, Badan Karantina Pertanian, dan Inspektorat Jenderal	► Jumlah kegiatan pemeriksaan kinerja dan pengelolaan keuangan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Peternakan, Badan Karantina Pertanian, dan Inspektorat Jenderal (Satker dan Pelaporan)	96	96	96	96	96	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
			► Jumlah kegiatan evaluasi LAKIP, review laporan keuangan, dan pemeriksaan anggaran bantuan luar negeri pada unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Peternakan, Badan Karantina Pertanian, dan Inspektorat Jenderal (Laporan)	9	9	9	9	9	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
			► Jumlah kegiatan pemantauan/ pengawalan dan evaluasi pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Peternakan, Badan Karantina Pertanian, dan Inspektorat Jenderal (Kegiatan dan Pelaporan)	2	2	2	2	2	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
2.6	Peningkatan pelaksanaan Pemeriksaan Khusus dan Tujuan Tertentu	Meningkatnya pelaksanaan pemeriksaan khusus dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri Pertanian	► Jumlah rumusan kebijakan bidang pengawasan yang dihasilkan, pemeriksaan khusus dan pengusutan terhadap pengaduan masyarakat dan atas petunjuk/instruksi Menteri, pemeriksaan sanggahan terhadap LHP, pelaksanaan kegiatan intelejen terhadap dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, serta laporan hasil pemeriksaan/kegiatan lingkup Inspektorat Khusus (Kasus dan Pelaporan)	38	38	38	38	38	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16
			► Jumlah Unit Kerja lingkup Departemen pertanian yang ditetapkan sebagai Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (Unit Kerja)	50	50	50	50	50	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30
3	<u>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan</u>	Perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penyediaan sarana produksi dan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan	► Luas areal penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat (ribu ha)	2,969.49	3,401.81	3,737.28	4,137.78	4,493.31	892.37	1,204.86	1,471.30	1,838.73	2,280.80
			► Jumlah sarana produksi yang disediakan dan disalurkan serta lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat :										
			• Sarana Produksi (Unit)	13,836	14,989	16,110	17,235	18,354					
			• Lembaga perbenihan (Balai)	63	63	63	63	63					
			Jumlah subsidi pupuk dan benih :										
			• Pupuk (Juta ton)	11.06	11.32	11.6	11.89	12.2					
			• Benih (ribu ton)	178.18	211.99	217.55	222.19	226.92					
			► Luas areal yang aman dari serangan OPT dan DFI pada pertanaman pangan yang menerapkan budidaya tanaman pangan yang tepat (ribu ha)	147.5	169.25	186	206	223.75					

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
									(Milyar Rp)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
			Produksi:										
			• Padi non hibrida (ribu ton)	12544.00	13798.40	14425.60	15052.80	15680.00					
			Padi hibrida (ribu ton)	1509.20	1886.50	2263.80	3018.40	3773.00					
			Padi lahan kering (ribu ton)	1234.80	1440.60	1646.40	1852.20	2058.00					
			• Jagung (ribu ton)	926.25	1080.63	1235.00	1389.38	1543.75					
			• Kedelai (ribu ton)	380.00	460.56	542.69	665.57	790.86					
			• Kacang tanah (ribu ton)	83.17	172.40	268.01	370.36	383.84					
			• Kacang hijau (ribu ton)	3.96	12.49	25.26	25.54	32.28					
			• Ubi kayu (ribu ton)	155.09	159.69	164.68	169.82	175.39					
			• Ubi jalar (ribu ton)	117.33	126.28	139.88	149.29	159.53					
			Produktivitas:										
			• Padi non hibrida (ku/ha)	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00					
			Padi hibrida (ku/ha)	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00					
			Padi lahan kering (ku/ha)	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00					
			• Jagung (ku/ha)	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00					
			• Kedelai (ku/ha)	16.00	16.16	16.32	16.48	16.65					
			• Kacang tanah (ku/ha)	17.51	18.15	18.81	19.49	20.20					
			• Kacang hijau (ku/ha)	13.00	13.15	13.29	13.44	13.59					
			• Ubi kayu (ku/ha)	250.00	257.03	264.25	271.67	279.31					
			• Ubi jalar (ku/ha)	130.00	133.46	142.27	146.05	149.94					
			Luas Lahan:										
			• Padi non hibrida (ribu ha)	2000.00	2200.00	2300.00	2400.00	2500.00					
			Padi hibrida (ribu ha)	200.00	250.00	300.00	400.00	500.00					
			Padi lahan kering (ribu ha)	300.00	350.00	400.00	450.00	500.00					
			• Jagung (ribu ha)	150.00	175.00	200.00	225.00	250.00					
			• Kedelai (ribu ha)	250.00	300.00	350.00	425.00	500.00					
			• Kacang tanah (ribu ha)	50.00	100.00	150.00	200.00	200.00					
			• Kacang hijau (ribu ha)	3.21	10.00	20.00	20.00	25.00					
			• Ubi kayu (ribu ha)	6.53	6.54	6.56	6.58	6.61					
			• Ubi jalar (ribu ha)	9.50	9.96	10.35	10.76	11.20					
			Luas Panen:										
			• Padi non hibrida (ribu ha)	1960.00	2156.00	2254.00	2352.00	2450.00					
			Padi hibrida (ribu ha)	196.00	245.00	294.00	392.00	490.00					
			Padi lahan kering (ribu ha)	294.00	343.00	392.00	441.00	490.00					
			• Jagung (ribu ha)	142.50	166.25	190.00	213.75	237.50					
			• Kedelai (ribu ha)	237.50	285.00	332.50	403.75	475.00					
			• Kacang tanah (ribu ha)	47.50	95.00	142.50	190.00	190.00					
			• Kacang hijau (ribu ha)	3.05	9.50	19.00	19.00	23.75					
			• Ubi kayu (ribu ha)	6.20	6.21	6.23	6.25	6.28					
			• Ubi jalar (ribu ha)	9.03	9.46	9.83	10.22	10.64					

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
3.1	Pengelolaan produksi tanaman sereal (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman sereal yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.	► Luas areal penerapan budidaya sereal yang tepat dan berkelanjutan termasuk untuk bahan bakar nabati (ribu ha) : • SLPTT padi non hibrida (ribu ha) • SLPTT padi hibrida (ribu ha) • SLPTT Padi lahan kering (ribu ha) • SLPTT Jagung hibrida (ribu ha) • Pengembangan peningkatan produksi gandum (ribu ha) • Pengembangan peningkatan produksi sorghum (ribu ha) • Peta sentra produksi komoditas sereal (paket) • Data luas tanam komoditas sereal (paket)	2,000.00	2,200.00	2,300.00	2,400.00	2,500.00	360.74	469.80	616.30	825.60	1094.40
				200.00	250.00	300.00	400.00	500.00					
				300.00	350.00	400.00	450.00	500.00					
				150.00	175.00	200.00	225.00	250.00					
				0.10	0.13	0.15	0.18	0.20					
				0.10	0.13	0.15	0.18	0.20					
				1	1	1	1	1					
				1	1	1	1	1					
3.2	Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.	► Luas areal penerapan budidaya tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tepat dan berkelanjutan termasuk untuk bahan bakar nabati (ribu ha) : • SLPTT kedelai (ribu ha) • SLPTT kacang tanah (ribu ha) • SLPTT kacang hijau (ribu ha) • PTT kacang hijau (ribu ha) • PTT ubi kayu (ribu ha) • PTT ubi jalar (ribu ha) • PTT pangan lokal (ribu ha) • Peta sentra produksi beberapa komoditas Kabi (paket) • Data luas tanam beberapa komoditas Kabi (paket)	250.00	300.00	350.00	425.00	500.00	84.24	174.10	233.70	316.50	402.20
				50.00	100.00	150.00	200.00	200.00					
				-	10.00	20.00	20.00	25.00					
				3.21	-	-	-	-					
				6.53	6.54	6.56	6.58	6.61					
				9.50	9.96	10.35	10.76	11.20					
				0.05	0.06	0.08	0.09	0.10					
				1	1	1	1	1					
				1	1	1	1	1					
3.3	Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan (Prioritas Bidang)	Terselenggaranya sistem pembinaan lembaga perbenihan tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat	► Lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat : • Tersusunnya roadmap kebutuhan & ketersediaan benih (paket) • Tersusunnya kebijakan sistem subsidi benih (paket) • Tersusunnya rancangan revitalisasi perbenihan (paket) • BPSBT PH (Balai) • BBI (Balai)	1	1	1	1	1	53.50	60.50	66.00	72.50	80.00
				1	1	1	1	1					
				1	1	1	1	1					
				32	32	32	32	32					
				31	31	31	31	31					

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
									(Milyar Rp)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
3.4	Penyaluran subsidi benih tanaman pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)	Tersalurnya benih tanaman pangan bersubsidi	Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton)	178.18	211.99	217.55	222.19	226.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan sarana produksi tanaman pangan (Prioritas Bidang)	Terselenggaranya sistem penyediaan dan pengawasan sarana produksi tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat.	► Sarana produksi tersedia dan terawasi di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat (unit) :						50.37	107.30	135.90	177.20	228.40
			• Bantuan RPPPO (unit)	200	300	500	800	1200					
			• Bantuan Traktor R-2 (unit)	623	685	754	829	912					
			• Bantuan Traktor R-4 (unit)	7	8	8	9	10					
			• Bantuan pompa air (unit)	350	385	423	466	512					
			• Penguatan UPJA pemula (unit)	8,747	8,535	8,354	8,201	8,071					
			• Penguatan UPJA berkembang (unit)	2,864	3,581	4,019	4,245	4,313					
			• Penguatan UPJA profesional (unit)	585	1,015	1,552	2,155	2,792					
			• Penguatan KP3 (unit)	430	450	470	500	514					
			• Penguatan PPNS Pupas (orang)	30	30	30	30	30					
			• Skrening pestisida (unit)	30	30	30	30	30					
			• Tersusunnya roadmap kebutuhan & penyediaan pupuk & alsintan (paket)	1	1	1	1	1					
3.6	Penyaluran pupuk bersubsidi (Prioritas Nasional dan Bidang)	Tersalurnya pupuk bersubsidi	► Tersusunnya kebijakan subsidi pupuk (paket)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			► Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton)	11.06	11.32	11.6	11.89	12.2					
3.7	Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DFI (Prioritas Nasional dan Bidang)	Terkendalinya serangan OPT dan DFI di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat	► Jumlah luas areal tanaman pangan yang terserang OPT (ribu ha)	59.00	67.70	74.40	82.40	89.50	60.56	95.00	105.00	115.00	125.00
			► Jumlah luas areal tanaman pangan yang terkena DFI (ribu ha)	88.50	101.55	111.60	123.60	134.25					
3.8	Pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih (Prioritas Bidang)	Berkembangnya metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura	► Jumlah metode pengujian mutu benih yang dikembangkan, divalidasi dan disyahkan (metode)	8	8	8	8	8	1.50	1.95	2.54	3.30	4.29
			► Jumlah laboratorium yang menerapkan sistem mutu (laboratorium)	8	8	8	8	8					
			► Jumlah laboratorium peserta uji profisiensi (laboratorium)	30	30	30	30	30					
			► Jumlah pelaksanaan uji petik mutu benih yang beredar (contoh benih)	15	20	25	25	25					
3.9	Pengembangan peramalan serangan Organisme Penganggu Tumbuhan (Prioritas Bidang)	Tersedianya informasi dan model peramalan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) sebagai rujukan dalam pengamanan produksi tanaman pangan dan hortikultura	► Jumlah informasi peramalan serangan OPT (unit)	5	5	5	5	5	2.70	3.51	4.56	5.93	7.71
			► Jumlah teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (model)	8	8	8	8	8					

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
			► Jumlah propinsi yang menerapkan teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (propinsi)	6	9	12	15	18					
3.10	Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan program pengelolaan produksi tanaman pangan , kebijakan subsidi terpadu, data luas lahan, (paket)	1	1	1	1	1	278.76	292.70	307.30	322.70	338.80
4.	<u>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan</u>	Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura yang aman konsumsi berdaya saing dan berkelanjutan	► Produksi dan Laju Pertumbuhan Produksi Hortikultura • Produksi : - Buah (ton) : - Sayuran (ton) : - Tanaman hias (tangkai) - Biofarmaka (kg) • Laju Pertumbuhan Produksi : - Buah - Sayuran - Tanaman hias - Biofarmaka ► Peningkatan Mutu Produk Tanaman Hortikultura : • Peningkatan jumlah pelaku usaha panutan (champion) dan gapoktan/asosiasi hortikultura • Laju peningkatan ketersediaan produk hortikultura Kualitas Ekspor. - Buah - Tanaman Hias • Laju Peningkatan Produktivitas kebun/lahan usaha hortikultura (mengajukan registrasi) - Buah (kebun) - Sayuran (lahan usaha) - Biofarmaka (lahan usaha) - Tanaman hias (lahan usaha) ► Peningkatan ketersediaan benih bermutu (%)	19,216,575 10,483,440 216,675,019 511,416,046 5.00% 3.50% 6.00% 3.50% 10.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% Benih buah 3 %, benih sayur umbi 2 %, benih sayur biji 1 %, benih tanaman hias 2 %	20,235,053 10,881,811 230,758,895 531,872,688 5.30% 3.80% 6.50% 4.00% 10.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% Benih buah 3 %, benih sayur umbi 2 %, benih sayur biji 1 %, benih tanaman hias 2 %	21,347,981 11,295,320 245,758,223 553,147,595 5.50% 3.80% 6.50% 4.00% 10.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% Benih buah 3 %, benih sayur umbi 2 %, benih sayur biji 1 %, benih tanaman hias 2 %	22,543,468 11,769,723 261,732,508 575,273,499 5.60% 4.20% 6.50% 4.00% 10.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% Benih buah 3 %, benih sayur umbi 2 %, benih sayur biji 1 %, benih tanaman hias 2 %	23,805,903 12,264,052 278,745,121 598,284,439 5.60% 4.20% 6.50% 4.00% 10.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% Benih buah 3 %, benih sayur umbi 2 %, benih sayur biji 1 %, benih tanaman hias 2 %	330.28	363.30	417.80	501.36	626.70
			► Proporsi luas serangan OPT utama hortikultura terhadap total luas panen.	Maksimal 5 % terhadap luas panen	Maksimal 5 % terhadap luas panen	Maksimal 5 % terhadap luas panen	Maksimal 5 % terhadap luas panen	Maksimal 5 % terhadap luas panen					

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
4.1	Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura	Meningkatnya kapasitas manajemen administrasi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana anggaran serta piranti lunak organisasi pengembangan produksi hortikultura	Jumlah dokumen pendukung pengembangan produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura: (pencapaian dan penganggaran, kerjasama internasional, pengelolaan SDM, humas, keuangan, sarana dan prasarana, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan, evaluasi pro	1	1	1	1	1	94.39	103.83	119.40	143.28	179.10
4.2	Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu buah yang aman konsumsi, berdaya saing dan berkelanjutan	► Produksi Tanaman Buah (ton), dan laju pertumbuhan produksi (%)	19.216.575 (5,0%)	20.235.053 (5,30 %)	21.347.981 (5,50%)	22.543.468 (5,60%)	23.805.903 (5,60)	38.67	42.54	48.92	58.70	73.38
			► Laju Peningkatan mutu produk tanaman buah:						25.78	28.36	32.61	39.14	48.92
			• Laju Peningkatan Produktivitas kebun buah (mengajukan registrasi)	5%	5%	5%	5%	5%					
			• Jumlah pelaku usaha panutan (Champion), Gapoktan/Asosiasi Hortikultura	10%	10%	10%	10%	10%					
4.3	Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk sayuran dan biofarmaka yang cukup dan aman konsumsi serta berkelanjutan	► Produksi dan laju pertumbuhan Tanaman Sayuran dan biofarmaka :						40.51	44.57	51.25	61.50	76.88
			• Sayuran (ton)	10.483.440 (3,5 %)	10.881.811 (3,8 %)	11.295.320 (3,8 %)	11.769.723 (4,2 %)	12.264.052 (4,2%)					
			• Biofarmaka (Kg)	511.416.046 (3,5 %)	531.872.688 (4,0 %)	553.147.595 (4,0%)	575.273.499 (4,0%)	598.284.439 (4,0 %)					
			► Laju Peningkatan mutu produk tanaman sayuran dan biofarmaka						27.01	29.71	34.17	41.00	51.25
4.4	Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Hias Berkelanjutan (Prioritas Bidang)	Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman hias yang berdaya saing dan berkelanjutan	► Produksi dan laju pertumbuhan produksi Tanaman Hias (tangcai)	216.675.019 (6,50%)	230.758.895 (6,50%)	245.758.223 (6,50%)	261.732.508 (6,50%)	278.745.121 (6,50%)	12.89	14.18	16.31	19.57	24.46
			► Laju Peningkatan mutu produk tanaman hias						8.59	9.45	10.87	13.05	16.31
			• Laju Peningkatan Produktivitas lahan usaha tanaman hias (mengajukan registrasi)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%					
			• Jumlah pelaku usaha panutan (Champion), Gapoktan/Asosiasi Hortikultura	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%					
			• Laju peningkatan ketersediaan produk tanaman hias Kualitas Ekspor	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%					

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
4.5	Pengembangan Sistem Perbenihan, Pupuk dan Sarana Produksi lainnya (Prioritas Bidang)	Terfasilitasinya penyediaan benih bermutu dalam mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura	Peningkatan ketersediaan benih bermutu (%)	Benih buah 3 %, benih sayur umbi 2 %, benih sayur biji 1 %, benih tanaman hias 2 %	Benih buah 3 %, benih sayur umbi 2 %, benih sayur biji 1 %, benih tanaman hias 2 %	Benih buah 3 %, benih sayur umbi 2 %, benih sayur biji 1 %, benih tanaman hias 2 %	Benih buah 3 %, benih sayur umbi 2 %, benih sayur biji 1 %, benih tanaman hias 2 %	Benih buah 3 %, benih sayur umbi 2 %, benih sayur biji 1 %, benih tanaman hias 2 %	46.14	50.75	58.36	70.04	87.54
4.6	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura (Prioritas Nasional dan Bidang)	Berkembangnya sistem perlindungan tanaman dalam mendukung pengembangan produksi hortikultura	Proporsi luas serangan OPT utama hortikultura terhadap total luas panen.	Maksimal 5 % terhadap luas panen	Maksimal 5 % terhadap luas panen	Maksimal 5 % terhadap luas panen	Maksimal 5 % terhadap luas panen	Maksimal 5 % terhadap luas panen	36.29	39.92	45.90	55.09	68.86
5.	<u>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan</u>	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi, perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya	► Capaian produksi (ribu ton) komoditi unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar); • <i>Swasembada gula nasional</i> - Tebu (hablur) • <i>Koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan di 33 Provinsi</i> • <i>Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri</i> - Kapas - Cengkeh • <i>Pengembangan komoditas ekspor</i> - Tembakau - Nilam - Kopi - Teh - Kakao - Lada - Jambu mete - Karet	2,996	3,449	3,902	4,355	4,806	454.10	478.37	504.00	531.11	559.74

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
			- Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bioenergi) - Jarak pagar - Kelapa - Kelapa Sawit - Kemiri sunan	15	20	24	29	35					
				3,266	3,290	3,317	3,348	3,380					
				23,200	24,429	25,710	27,046	28,439					
				0	0	0	0	0					
			Peningkatan produktivitas (kg/ha) tanaman unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar);										
			- Swasembada gula nasional - Tebu	6450	6900	7200	7210	7230					
			- Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri - Kapas - Cengkeh	1750	1900	2000	2200	2500					
				266	274	281	284	300					
			- Pengembangan komoditas ekspor - Tembakau - Nilam - Kopi - Teh - Kakao - Lada - Karet - Jambu Mete	885	888	890	892	893					
				6300	6400	6500	6550	6600					
				780	840	900	900	900					
				1520	1600	1680	1760	1780					
				1000	1100	1200	1400	1500					
				694	713	722	734	760					
				999	1000	1009	1014	1019					
				537	569	579	616	640					
			- Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bioenergi) - Jarak Pagar - Kelapa - Kelapa Sawit - Kemiri Sunan	1000	1250	1500	1750	2000					
				1105	1119	1135	1151	1200					
				3888	3997	4109	4225	4344					
				0	0	0	0	0					
			Peningkatan mutu (% populasi standar) tanaman unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar);	76	77	78	79	80					

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
									2010	2011	2012	2013	2014
			- Penggunaan benih unggul bermutu, sarana produksi serta sumber benih bina perkebunan - Jumlah penggunaan sarana produksi (%) (Revitalisasi perbenihan dan pembibitan)	45	50	56	61	65					
			- Penguatan kelembagaan pengawas dan kelembagaan usaha perbenihan (Revitalisasi perbenihan dan perbibitan) - Jumlah kelembagaan perbenihan (unit) - Jumlah kelembagaan UPJA (unit usaha)	210	225	240	255	270					
			- Jumlah kelembagaan perlindungan tanaman - SL-PHT	500	515	530	546	563					
			- Jumlah areal pengendalian OPT (hektar) dan penurunan titik api (hot spot) serta penanganan gangguan usaha perkebunan - Jumlah penurunan titik api	2500	2250	2025	1823	1640					
5.1	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim (Prioritas Nasional dan Bidang)	Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman semusim (tebu,kapas, tembakau dan nilam)	Capaian luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman semusim (tebu, kapas, nilam, tembakau, dan aneka tanaman semusim lainnya) (Intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi)						45.57	47.85	50.24	52.76	55.39
			- Swasembada Gula Nasional - Tebu	465	509	553	597	641					
			- Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri - Kapas	15	18	20	24	25					
			- Pengembangan Komoditas Ekspor - Tembakau - Nilam	205	205	205	205	205					
5.2	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar (Prioritas Nasional dan Bidang)	Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman rempah dan penyegar (kopi, teh, kakao, lada, cengkeh)	Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman rempah dan penyegar (kopi, teh, kakao, lada, cengkeh dan aneka tanaman rempah dan penyegar lainnya) (Intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi):						46.07	48.38	50.79	53.33	56.00

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
			- Pengembangan Komoditas Ekspor - Kopi - Teh - Kakao - Lada - Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri - Cengkeh - Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (ribu ha) - Rehabilitasi - Intensifikasi - Peremajaan - Pengendalian OPT - Pemberdayaan petani (kelompok Tani)	1,291	1,308	1,328	1,331	1,354					
				129	130	130	130	130					
				1,655	1,746	1,837	1,929	2,020					
				192	193	194	195	196					
				465	469	474	479	484					
				81.85	93.15	15.00	15.00	10.00					
				30.55	49.45	15.00	20.00	20.00					
				22.60	27.40	5.00	5.00	5.00					
				135.00	170.00	35.00	40.00	35.00					
				6,750.00	8,500.00	1,750.00	2,000.00	1,750.00					
5.3	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman Tahunan (Prioritas Nasional dan Bidang)	Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman tahunan (kelapa, kelapa sawit, karet, jambu mete, jarak pagar)	Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman tahunan (Intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi) - Pengembangan Komoditas Ekspor - Karet - Jambu Mete - Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energi) - Jarak Pagar - Kelapa - Kelapa Sawit - Kemiri sunan - Revitalisasi perkebunan - Kelapa sawit - Karet - Kakao						74.65	76.28	80.12	84.14	88.38
				3,445	3,456	3,466	3,476	3,487					
				573	574	575	576	577					
				10	12	15	18	21	2.50	2.63	2.75	2.89	3.03
				3,807	3,814	3,820	3,827	3,833	1.50	1.58	1.65	1.74	1.82
				8,127	8,342	8,557	8,772	8,987	0.50	0.52	0.54	0.56	0.58
				1	2	4	7	10	0.00	2.10	2.20	2.30	2.40
				125	153	153	153	148					
				10	53	53	53	51					
				0	34	34	34	32					

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
									2010	2011	2012	2013	2014
			- Penyusunan kebijakan Pengembangan bio energi - Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) - Koordinasi dengan pihak terkait dalam menyediakan insentif pajak untuk mendorong pemantapan energy terbarukan - Berpartisipasi aktif dalam Tim Koordinasi Interdept pengembangan bio-fuel - Pengembangan integrasi kebun-ternak (paket)	27	28	29	30	31					
5.4	Dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan (Prioritas Bidang)	Terfasilitasinya penyediaan benih unggul bermutu dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas dan mutu tanaman perkebunan	Jumlah penggunaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan (%) (Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan) - Revitalisasi Perbenihan - Jumlah penggunaan benih unggul bermutu	45	48	52	55	60	30.66	32.19	33.80	35.49	37.27
5.5	Dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha perkebunan (Prioritas Bidang)	Terfasilitasinya pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan pada 13 komoditas perkebunan	Revitalisasi Perlindungan Perkebunan						23.03	24.19	25.39	26.66	27.99
			- Areal pengendalian OPT dan intensitas serangan OPT (ha) - Penanganan gangguan usaha perkebunan (dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan)	51,467	52,291	53,128	53,978	54,841					
5.6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan	Terfasilitasinya pelayanan bidang perencanaan, evaluasi, data dan informasi, keuangan, dan pelayanan kepegawaian, organisasi, kehumasan, ketatausahaan, rumusan di bidang kesekretariatan yang berkualitas	Provinsi yang memperoleh pelayanan di bidang perencanaan program dan penganggaran dan kerjasama; Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas; Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas; Pelayanan organisasi kepegawaian, humas dan administrasi perkantoran yang berkualitas. (Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan) - Penyelesaian PP, Keppres, Perpres, Kepmentan sebagai turunan dari UU No. 18/2004 - Pembinaan dan penilaian usaha perkebunan	32 Propinsi	32 Propinsi	32 Propinsi	32 Propinsi	32 Propinsi	165.76	175.61	186.12	197.32	209.28

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
			Penyediaan tenaga/petugas lapang seperti penyuluh, pengendali OPT, pengawas benih, inseminator, mantri tani/statistik, paramedik, petugas penyedia layanan informasi pasca, petugas revit perkebunan										
5.7	► Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan BBP2TP Surabaya	► Terlaksananya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan	Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan mutu benih, pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih, adaptasi dan kelayakan, fasilitasi sertifikasi benih dan pemantauan peredaran benih Jumlah bibit yang tersertifikasi (dalam 1.000 batang)	12301	12916	13561	14239	14950	3.74	3.92	4.12	4.33	4.54
		► Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan	Pelaksanaan analisis data serangan, situasi dan identifikasi OPT, koleksi OPT penting, pengembangan metode pengamatan, teknik surveillance, model peramalan, teknik surveillance, model peramalan OPT, fenomena iklim dan gangguan usaha serta taksasi kehilangan hasil, teknik pengendalian OPT dengan PHT Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket)	5	5	6	6	6	12.68	13.31	13.98	14.68	15.41
	► Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan BBP2TP Ambon	► Terlaksananya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan	Pelaksanaan analisa data serangan, situasi dan identifikasi OPT, koleksi OPT penting, pengembangan metode pengamatan, teknik surveillance, model peramalan, teknik surveillance, model peramalan OPT, fenomena iklim dan gangguan usaha serta taksasi kehilangan hasil, teknik pengendalian OPT dengan PHT Jumlah bibit yang tersertifikasi (dalam 1.000 batang)	188975	208344	218761	228938	240384	15.05	15.80	16.59	17.42	18.29
		► Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan	Eksplorasi dan inventarisasi koleksi, teknik perbanyakan/pengembangan pelepasan dan evaluasi pemanfaatan musuh alami, agens hayati dan pestisida nabati Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket)	5	6	8	9	10	17.27	18.13	19.04	19.99	20.99
	► Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan BBP2TP Ambon	► Terlaksananya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan	Jumlah pengawasan pelestarian plasma nutfah Jumlah bibit yang tersertifikasi (dalam 1.000 batang)	266	343	465	486	535	4.93	5.18	5.44	5.71	5.99

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
									2010	2011	2012	2013	2014
		► Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan	Jumlah eksplorasi dan inventarisasi koleksi, teknik perbanyakan/pengembangan pelepasan dan evaluasi pemanfaatan musuh alami, agens hayati dan pestisida nabati • Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket)	9	9	9	9	9	10.19	10.70	11.23	11.79	12.38
6.	<u>Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal</u>	► Meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu)	► Produksi daging meningkat 4,10% per tahun (ton) ► Produksi telur meningkat 4,42% per tahun (ton) ► Produksi susu meningkat 15,56% per tahun (ton)	2,201,214	2,283,287	2,370,527	2,456,302	2,584,432	940.69	1473.10	1692.86	1902.05	2141.00
		► Meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani (daging dan telur)	► Kontribusi daging sapi domestik terhadap total produksi daging sapi nasional meningkat (%) ► Kontribusi daging ayam buras terhadap total produksi daging ayam nasional meningkat (%) ► Penyediaan sumber pembiayaan pertanian (PUAP, SMD, LDPM, LM3, LKM) kelompok	18.7	19.2	19.8	20.6	21.1					
		► Meningkatnya ketersediaan protein hewani asal ternak	Ketersediaan protein hewani asal ternak per kapita meningkat 0,03% per tahun (g/kapita/hr)	6.4	6.6	6.7	6.9	7.2					
		► Tersedianya daging sapi domestik sebesar 90 persen	Produksi daging sapi domestik terhadap total penyediaan daging sapi nasional (%)	70.2	75.53	80.5	85.29	90					
6.1	Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal (Prioritas Bidang)	► Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit ternak (sapi potong, sapi perah)	Revitalisasi perbenihan dan perbibitan (semen ribu dosis)	2,700	3,050	3,400	3,700	4,000	67.50	76.25	85.00	92.50	100.00
		► Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu peternakan (embrio ekor)	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu peternakan (embrio ekor)	400	490	580	640	700	10.00	12.25	14.50	16.00	17.50
		► Peningkatan bibit sapi	Penyediaan bibit sapi 200 ribu ekor per tahun	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00
		► Penambahan propinsi peserta KUPS	Penambahan jumlah peserta dan pembinaan pelaksanaan KUPS (propinsi)	20	20	25	30	33	6.00	6.00	7.50	9.00	9.90
		► UPT yang menjadi BLU	Pengusulan 2 UPT peternakan menjadi Bahan Layanan Umum (BLU)	0	0	1	2	0	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
6.2	Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya populasi dan produksi ternak ruminansia	► Peningkatan produksi dan produktivitas ternak (sapi ekor) ► Swasembada daging sapi (share produk dalam negeri %) ► Revitalisasi persusuan (ekor) ► Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos)	21,000	23,760	26,136	28,750	31,625	210.00	237.60	261.36	287.50	316.25
				76	76	81	85	90	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
				1,666,667	1,833,333	2,016,667	2,218,333	2,440,167	50.00	55.00	60.50	66.55	73.21
				0	10,000	10,000	10,000	10,000	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
			► Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyarakat (BATAMAS) terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit)	100	150	200	250	300	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
			► Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak (padat & cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra perkebunan, tanaman pangan dan holtikulture (klp)	75	83	91	100	110	75.00	83.00	91.00	100.00	110.00
			► Penyediaan sumber pembiayaan pertanian (PU/AP, SMD, LDPM, LM3, LKM) kelompok	0	720	828	935	1050	0.00	288.00	331.00	374.00	420.14
			► Pemanfaatan 700 ribu ha lahan kehutanan untuk pengembangan peternakan	0	100	150	250	200	0.00	10.00	15.00	25.00	20.00
6.3	Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya populasi dan produksi, serta meningkatnya pendayagunaan sumber daya lokal ternak non ruminansia	► Restrukturisasi perunggasan (kelompok)	230	290	350	410	470	69.00	87.00	105.00	123.00	141.00
			► Pengembangan pakan ternak (Unit)	25	35	50	60	70	12.50	17.50	25.00	30.00	35.00
6.4	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis (Prioritas Nasional dan Bidang)	► Pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan	Penguatan sistem kesehatan hewan (vaksin/obat dlm juta dosis)	100	100	120	130	140	177.69	200.00	240.00	260.00	280.00
		► Perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik	Penyediaan tenaga/petugas lapang seperti penyuluh, pengendali OPT, pengawas n-benh, Inseminator, mantri tani/statistik, paramedik, petugas penyedia layanan informasi pasca , petugas revit bun	100	250	250	250	250	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00
6.5	Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)	► Penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner	Peningkatan sertifikasi nomor veteriner yang ASUH 400 unit usaha	0	100	200	300	400	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
		► Peningkatan jaminan produk hewan ASUH dan daya saing produk hewan	Jaminan produk pangan asal hewan yang ASUH RPH/RPA	169	210	260	310	400	169.00	210.00	260.00	310.00	400.00
6.6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Peternakan	► Perlindungan hewan dan penyakit hewan	Penyelesaian PP, Kepmen, turunan dari UU No 18 th 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	2	12	0	0	0	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		► Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat	Koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan 33 propinsi	33	33	33	33	33	51.00	59.00	65.00	71.00	80.00

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
7.	<u>Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian</u>	Meningkatnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berkelanjutan	► % penurunan kehilangan/kerusakan hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Menurun 0,2 – 5% /thn	Menurun 0,2 – 5% /thn	Menurun 0,2 – 5% /thn	Menurun 0,2 – 5% /thn	Menurun 0,2 – 5% /thn	326.81	431.06	569.03	751.75	993.89
			► % peningkatan produk dan jenis olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan substitusi impor	5%/thn	5%/thn	5%/thn	5%/thn	5%/thn					
			► % peningkatan jumlah lembaga pemasaran petani dan penyerapan pasar hasil pertanian di pasar domestik	5%/thn	5%/thn	5%/thn	5%/thn	5%/thn					
			► % peningkatan ekspor dan surplus neraca perdagangan hasil pertanian	15%/thn	15%/thn	15%/thn	15%/thn	15%/thn					
7.1	Pengembangan penanganan pasca panen pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya penanganan pasca panen hasil pertanian	► Jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pasca panen sesuai GHP dan standar mutu	1800 poktan/ gapoktan	1980 poktan/ gapoktan	2178 poktan/ gapoktan	2396 poktan/ gapoktan	2636 poktan/ Gapoktan	5.50	7.21	9.44	12.36	16.20
			► % Peningkatan produksi kakao fermentasi, karet boker, mete	10 %/thn	10 %/thn	10 %/thn	10 %/thn	10 %/thn	16.60	21.75	28.49	37.32	48.89
			► % Peningkatan produksi pakan temak berbahan baku lokal	10 %/thn	10 %/thn	10 %/thn	10 %/thn	10 %/thn	13.20	17.29	22.65	29.67	38.87
7.2	Pengembangan pengolahan hasil pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Berkembangnya pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan	► Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian yang bernilai tambah dan berdaya saing	1200 unit	1200 unit	1200 unit	1200 unit	1200 unit	111.13	148.91	199.54	267.39	358.30
			► % Peningkatan agroindustri susu segar	10 %/thn	10 %/thn	10 %/thn	10 %/thn	10 %/thn	9.50	12.73	17.06	22.86	30.63
			► % Peningkatan produksi tepung cassava fermentasi	5 %/thn	5 %/thn	5 %/thn	5 %/thn	5 %/thn	4.70	6.30	8.44	11.31	15.15
			► % Peningkatan produksi gula rakyat non tebu.	10 %/thn	10 %/thn	10 %/thn	10 %/thn	10 %/thn	0.50	0.67	0.90	1.20	1.61
7.3	Pengembangan mutu dan standardisasi pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya mutu dan keamanan pangan hasil pertanian	► Jumlah usaha pasca panen dan pengolahan yang menerapkan sistem jaminan mutu.	330 unit + 54 unit organik	330 unit + 54 unit organik	330 unit + 54 unit organik	330 unit + 54 unit organik	330 unit + 54 unit organik	19.07	25.93	35.27	47.96	65.23
			► Jumlah pengujian mutu alat mesin pertanian	42 sertifikat	42 sertifikat	42 sertifikat	42 sertifikat	42 sertifikat	3.50	4.76	6.47	8.80	11.97
7.4	Pengembangan pemasaran domestik (Prioritas Bidang)	Meningkatnya pemasaran hasil pertanian	► Jumlah kelembagaan pemasaran bagi petani	186 pasar	195 pasar	205 pasar	214 pasar	223 pasar	43.48	57.40	75.76	100.01	132.01
			► Jumlah hasil pertanian yang diserap pasar dalam negeri	0%	2%	3%	4%	5%	12.00	15.84	20.91	27.60	36.43
			► % Peningkatan kerjasama pasar modern dan tradisional	10 %/thn	10 %/thn	10 %/thn	10 %/thn	10 %/thn	2.50	3.30	4.36	5.75	7.59
			► % Peningkatan jaringan informasi harga antar Kab/Kota	10 %/thn	10 %/thn	100 kab/thn	100 kab/thn	100 kab/thn	6.50	8.58	11.33	14.95	19.73
7.5	Pengembangan pemasaran internasional (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya pemasaran internasional hasil pertanian	Jumlah ekspor dan surplus neraca perdagangan hasil pertanian	Meningkat 15% dan meningkat 30%	Meningkat 15% dan meningkat 30%	Meningkat 15% dan meningkat 30%	Meningkat 15% dan meningkat 30%	Meningkat 15% dan meningkat 30%	33.46	44.84	60.09	80.52	107.89

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
									(Milyar Rp)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
7.6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Meningkatnya manajemen pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	► Nilai peta kerawan penyimpangan	Putih	Putih	Putih	Putih	Putih	3.76	4.62	5.69	6.99	8.60
			► Nilai laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Gold	Gold	Gold	Gold	Gold					
			► Nilai laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
			► Nilai layanan publik	Meningkat 25%	Meningkat 25%	Meningkat 25%	Meningkat 25%	Meningkat 25%					
			► Perencanaan, Keuangan dan kepegawaian	peningkatan kualitas SDM & manajemen	peningkatan kualitas SDM & manajemen	peningkatan kualitas SDM & manajemen	peningkatan kualitas SDM & manajemen	peningkatan kualitas SDM & manajemen	41.41	50.93	62.64	77.05	94.77
8.	<u>Program Penediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian</u>	Terlaksananya pengembangan fasilitas dalam pengelolaan lahan dan air melalui upaya pemberdayaan lahan pertanian, pengelolaan air irigasi pertanian dan perluasan areal pertanian	► Terlaksananya 1.148.000 (ha), 25,884 unit kegiatan pengelolaan air irigasi						755.20	5275.19	5056.28	4956.15	4900.20
			► Terlaksananya 830.000 (Ha) perluasan areal lahan Pertanian										
			► Terlaksananya 1.000.000 Ha optimasi lahan pertanian (pupuk organik), dan 11.000 Km JUT/Jalan produksi										
8.1	Perluasan areal pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya luasan areal baru lahan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pertanian	Luasan (Ha) perluasan areal Tanaman pangan (saawah dan lahan Kering), hortikultura, perkebunan dan kawasan peternakan	32,505	519,570	483,965	482,600	481,360	225.35	3418.00	3150.65	3148.94	3142.87
8.2	Pengelolaan air untuk pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung produksi pertanian	► Tersedianya (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui irigasi pedesaan, pengembangan sumber air tanah, pompanisasi air permukaan) yang berfungsi.	1,005	2,035	1,520	1,520	1,520	313.23	769.69	860.75	855.96	850.08
			► Tersedianya optimasi pemanfaatan Air irigasi (melalui perbaikan JIUT/JIDES dan pengembangan TAM) yang berfungsi (ha)	108,486	497,434	490,000	485,000	479,080					
			► Tersedianya (unit) pengembangan Konservasi air (melalui pengembangan Embung, cek dam, sumur resapan, Antisipasi kekeringan dan banjir) yang berfungsi	464	5,794	8,050	8,092	8,100					
8.3	Pengembangan pengelolaan lahan pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	► Luasan (Ha) lahan yang dioptimasi, dikonservasi dan direhabilitasi, direklamasi (Pengembangan rumah kompos)	25,709	139,821	144,670	138,500	133,300	211.83	1061.29	1015.88	926.75	891.75
			► Panjang jalan (Km) Usaha Tani dan Jalan Produksi, serta tersedianya data bidang tanah Petani yang layak disertifikasi	952	3,481	2,867	2,600	2,600					

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
			► Terlaksananya pengembangan System of Rice Intensification (SRI) 2.000 paket (Adaptasi Iklim)	62	538	600	500	300	2.79	24.21	27.00	22.50	13.50
8.4	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada direktorat pengelolaan lahan dan air	Meningkatnya fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Direktorat Jenderal	Tersedianya dokumen (Paket) perencanaan program, anggaran dan kerjasama (Renja-KL, RKA-KL, DIPA, POK, MOU Kerjasama PBIS, TOR)	6	6	6	6	6	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
9	<u>Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing</u>	Peningkatan inovasi dan adopsi teknologi pertanian	► Inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan, dan produk olahan (paket)	98	117	140	168	200	908.28	981.06	1096.15	1191.79	1305.86
			► Inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya pertanian (paket)	35	35	35	35	35					
			► Rekomendasi kebijakan pertanian (paket)	33	33	33	33	33					
			► Adopsi inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan dan produk olahan (propinsi)	32	32	32	32	32					
9.1	Dukungan manajemen, fasilitasi dan instrumen teknis dalam pelaksanaan kegiatan litbang pertanian	Pengembangan manajemen perencanaan program dan anggaran, kerjasama, pengelolaan sumberdaya, dan hasil litbang pertanian	► Jumlah paket dokumen perencanaan program, anggaran, dan laporan pelaksanaan program/ kegiatan litbang seluruh Satker Badan Litbang Pertanian	65	65	65	65	65	70.51	79.56	89.51	100.46	112.51
			► Jumlah judul kerjasama kemitraan, sinergi penelitian pertanian, dan pemanfaatan hasil dengan Perguruan Tinggi	200	200	200	150	150	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
			► Jumlah sertifikat paten untuk dilindungi, promosi teknologi litbang, dan naskah perjanjian kerja sama lisensi	20	40	60	80	100	3.77	4.15	4.57	5.02	5.52
9.2	Penelitian dan pengembangan tanaman pangan	Penyediaan benih sumber dan varietas sangat genjah, pendampingan SLPTT dan peningkatan inovasi teknologi tanaman pangan mendukung P2BN	► Jumlah varietas sangat genjah dan unggul baru padi, sereal, kacang-kacangan & umbi-umbian	5-6	5-7	8-9	10-12	14-15	47.26	56.72	68.06	81.67	98.01
			► Jumlah teknologi budidaya, panen dan pasca panen primer	5	5	8	7	8	36.66	44.46	53.86	65.20	78.88
			► Jumlah akses sumberdaya genetik (SDG) padi, sereal, kacang-kacangan dan umbi-umbian terkoleksi, teridentifikasi dan terkonservasi untuk perbaikan sifat varietas	800	800	800	800	800	14.77	17.72	21.27	25.52	30.63

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
			► Jumlah produksi benih sumber (BS, FS) padi, sereal, kacang-kacangan & umbi-umbian dengan SMM ISO 9001-2000 dari 100 varietas tanaman pangan	BS 10 ton FS 20 ton	BS 10 ton FS 20 ton	BS 15 ton FS 20 ton	BS 15 ton FS 20 ton	BS 15 ton FS 20 ton	14.77	17.72	21.27	25.52	30.63
			► Jumlah penelitian konsorsium padi, kedelai, dan gandum	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	4.70	5.17	5.69	6.26	6.88
9.3	Penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura	Meningkatnya inovasi teknologi tan.	► Jml VUB yg diminati konsumen	40	131	235	414	1032	11.19	12.86	14.79	17.01	19.56
			► Jumlah PN yang terkonservasi dan terkarakterisasi	20 Bw, 455 acc, 3925	600 acc 3978	600 acc 4020	600 acc 4060	600 acc 4100	10.63	12.22	14.06	16.16	18.59
			► Jml benih sumber : • Sayuran	20.000 GO 20 ton	22.000 GO 25 ton	24.000 GO 16 ton	26.000 GO 35 ton	28.000 GO 40 ton	11.27	12.96	14.91	17.14	19.71
			• VUB buah tropik dan sub tropik	14335 batang (15 var)	15035 batang (5 var)	16000 batang (2 var)	17200 batang (3 var)	18700 batang (2 var)					
			• Akses mutasi buah trop	960	960	960	960	960					
			• Planlet, benih, stek tan. Hias	151800; 30 var	202400; 30 var	253100	253700	254000					
			• Jumlah benih bt bwh dan bt atas hsl SE	100000	500000	1000000	2500000	5000000					
			► Jumlah teknologi budidaya produksi hortikultura ramah lingkungan	12	12	12	12	12	18.87	21.70	24.95	28.70	33.00
9.4	Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan	Peningkatan inovasi tek. tan. perkebunan untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan nilai tambah tanaman perkebunan	► Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan	10 var;	10 var;	10 var;	12 var;	15 var;	49.98	63.00	86.11	88.76	96.00
			Penyediaan jumlah bibit kakao (batang) melalui teknologi SE mendukung Gernas Kakao	10 juta bibit	15 juta bibit	15 juta bibit	20 juta bibit	20 juta bibit					
			► Jumlah teknologi untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	42	47	47	52	52	27.05	37.82	49.03	43.23	43.68
			► Jumlah produk olahan tanaman perkebunan	20	24	24	29	33	15.00	21.00	25.00	22.00	26.04
			► Jumlah penelitian konsorsium kelapa sawit, kakao, dan jarak pagar	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	2.95	3.25	3.57	3.93	4.32
9.5	Penelitian dan pengembangan peternakan dan veteriner	Meningkatkan Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Program Percepatan Produksi Swasembada Daging Sapi (P2SDS)	► Jumlah rekomendasi pembangunan peternakan dan veteriner, diseminasi, promosi, publikasi hasil penelitian dan koordinasi dengan stakeholders	10	10	10	10	10	6.64	7.64	8.78	10.10	11.61
			► Jumlah SDG peternakan, TPT dan veteriner yang dikonservasi dan dikarakterisasi	112	112	112	112	112	29.62	34.06	39.17	45.05	51.80
			► Jumlah galur (bangsa) baru ternak dan TPT spesifik lokasi	6	6	8	8	8	10.99	12.63	14.53	16.32	19.22

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
									(Milyar Rp)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
			► Jumlah inovasi peternakan berupa <i>twinning technology</i> , aplikasi TPT murah dan teknologi veteriner (teknologi diagnosis, vaksin, epidemiologi, dan strategi pengendalian penyakit hewan strategis) yang dihasilkan dan didesiminasikan kepada pengguna	22	24	22	22	25	17.24	19.81	22.79	26.21	29.83
			► Jumlah penelitian konsorsium sapi perah dan sapi potong	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2.00	2.30	2.65	3.05	3.51
9.6	Penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	Hasil penelitian/analisis sosial ekonomi dan rekomendasi kebijakan pertanian	Jumlah rekomendasi kebijakan tentang • Penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian; • Pengelolaan sumberdaya pert. & pembangunan infrastruktur pert.; • Pengembangan kelembagaan dan peraturan mendorong iklim usaha yg kondusif; • Makro ekonomi mendorong pertumbuhan sektor pertanian; • Pembangunan pert. & perdesaan • Konsorsium karakteristik sosek petani padi	12	12	12	12	12	16.17	17.79	19.57	21.52	23.68
9.7	Pengembangan perpustakaan dan penyebaran teknologi pertanian	Meningkatnyapenyebaran teknologi hasil litbang pertanian mendukung ketahanan dan kemandirian pangan	► Jumlah judul jurnal primer dan publikasi bibliografis	13 Jdl	13 Jdl	13 Jdl	13 Jdl	13 Jdl	3.50	3.85	4.24	4.66	5.12
			► Jumlah perpustakaan yang dibina dan ditata	65 UK/UPT	65 UK/UPT	65 UK/UPT	65 UK/UPT	65 UK/UPT	2.50	2.75	3.03	3.33	3.66
			► Jumlah tambahan koleksi	30 jdl/ 3 dtbase	35 jdl/4 dtbase	40 judul/4 dtbase	45 judul/4 dtbase	50 jdl/ 4 dtbase	1.50	1.65	1.82	2.00	2.20
			► Jumlah kegiatan diseminasi dan perpustakaan	8 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg	5.28	5.81	6.40	7.04	7.74
9.8	Penelitian/perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian	Meningkatnya inovasi dan adopsi teknologi mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktiifitas, efisiensi dan nilai tambah produk pertanian dan limbahnya	► Inovasi teknologi dan sistem mekanisasi pertanian untuk peningkatan; produktivitas, efisiensi, kualitas, nilai tambah komoditas utama pertanian dan limbahnya	4	4	4	4	4	8.61	9.08	10.47	12.52	12.43
			► Kerjasama litbang mektan, konsorsium alsintan serta bahan rekomendasi kebijakan (paket)	3	3	3	3	3	4.63	4.94	5.86	5.55	7.18
			► Prototipe alsin yang didiseminasikan (Paket)	1	1	1	1	1	0.20	0.22	0.24	0.26	0.27
9.9	Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian	Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian	► Tersedianya peta potensi sumberdaya lahan pertanian terlintar	2,5 juta ha di Sulawesi dan daerah lainnya	2,5 juta ha di Sulawesi, NT & lainnya	3,5 juta ha di Maluku dan Papua	3,5 juta ha di Papua, dan daerah lainnya	3,5 juta ha di Papua, di daerah lainnya	2.50	3.50	3.50	5.50	5.50

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
									(Milyar Rp)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
			► Jumlah informasi, paket komponen teknologi pengelolaan SDL (lahan kering, lahan sawah, rawa, pasang surut, air, formula pupuk dan pembenah tanah, dan lingkungan pertanian)	9 paket	9 paket	9 paket	8 paket	8 paket	50.30	54.27	58.99	63.60	70.04
			► Jumlah informasi, pengelolaan sumberdaya iklim & air, model prediksi bencana pertanian serta paket komponen teknologi perubahan iklim global, mitigasi dan adaptasinya terhadap sektor pertanian	3 paket; 1 model prediksi bencana pertanian; 1 peta kalender tanam	3 paket; 2 model prediksi bencana pertanian; 1 peta kalender tanam	3 paket; 2 model prediksi bencana pertanian; 1 peta kalender tanam	3 paket; 2 model pengelolaan SDA; 1 peta kalender tanam	3 paket; 2 model pengelolaan SDA; 1 peta kalender tanam	6.19	7.12	8.19	9.41	10.82
			► Jumlah rekomendasi kebijakan penanganan perubahan iklim, dan konsorsium pengelolaan perubahan iklim dan lahan kering	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	1.30	1.43	1.57	1.73	1.90
9.10	Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian	Peningkatan inovasi dan adopsi hasil bioteknologi dan pemanfaatan sumberdaya genetik pertanian (SDGP) untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing produk pertanian	► Jumlah akses SDGP dan database yang dikonservasi atau diremajakan	2250 akses SDGP; 4 database	2250 akses SDGP; 4 database	2250 akses SDGP; 4 database	2250 akses SDGP; 4 database	2250 akses SDGP; 4 database	2.97	2.88	3.36	5.56	6.29
			► Jumlah varietas unggul atau galur harapan padi, kedelai, dan jagung berproduktivitas tinggi dan berumur genjah melalui somatik embriogenesis, <i>genom sequencing</i>	51 galur kedelai dan padi; 3 populasi baru padi; 6 galur transgenik	Keragaman 50 galur kedelai; 1 varietas padi unggul; Galur baru padi; 5 Galur transgenik (FUT)	50 galur harapan kedelai; 2 galur harapan baru padi; Galur baru padi; 5 Galur transgenik (FUT)	Galur terpilih; 1 galur unggul padi baru; Galur baru terseleksi padi; 5 Galur transgenik (LUT)	Varietas unggul kedelai; Galur harapan baru padi; 5 Galur transgenik (LUT)	3.39	3.41	3.79	5.99	6.72
			► Jumlah galur harapan gandum tropis		Galur gandum transgenik mengandung gen <i>ZmDreb2A</i>	Galur gandum adaptif iklim hasil pengujian di FUT	Galur gandum adaptif iklim LUT	Galur gandum adaptif iklim LUT		2.88	3.26	5.50	6.23
			► Jumlah galur padi dan jagung efisien penggunaan pupuk sintetik	125 galur calon hibrida jagung unggul	20-35 galur hibrida jagung adaptif kondisi pupuk rendah	8-10 galur hibrida jagung harapan dan padi harapan	2 Galur harapan jagung hibrida dan padi transgenik	2-4 varietas unggul hibrida jagung; Galur padi transgenik	2.88	2.90	3.33	5.53	6.26
			► Jumlah biofertilizer untuk padi dan tebu	20 isolat potensial biofertilizer	20 isolat potensial biofertilizer	3 formula bahan pembawa	2 biofertilizer padi	1 biofertilizer tebu	2.82	2.78	3.23	5.43	6.16
			► Jumlah tanaman manggis dan durian tanpa biji	2 metode regenerasi dan transformasi	2 metode transformasi dan perbanyakan	2 jenis tanaman transgenik putatif	2 jenis tanaman transgenik	Bahan sambungan	2.95	2.86	3.28	5.48	6.20
			► Jumlah peta gen sifat-sifat penting pada kelapa sawit, jarak pagar dan sapi	7 sekuens whole genom	258 sekuens DNA target	3 sistem kit dan peta gen			27.59	5.58	5.96		

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
			► Jumlah klon gen pengendali sifat toleran kekeringan, produktivitas dan umur genjah	3 mutan biologi padi terseleksi; 3 klon gen faktor transkripsi; 3 transkrip cDNA	3 klon gen target kandidat; 3 gen faktor transkripsi; 3 konstruksi cDNA	6 gen target fungsional; 3 gen faktor transkripsi fungsional			3.14	3.06	3.48		
9.11	Penelitian dan pengembangan pasca panen pertanian	Meningkatnya inovasi teknologi pascapanen dan pengembangan produk hasil pertanian	► Jumlah teknologi penanganan segar produk hortikultura dan daging	5	4	4	4	2	7.60	6.72	7.72	8.88	5.10
			► Jumlah produk diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor	6	6	6	6	8	4.68	5.04	5.79	6.66	10.20
			► Jumlah produk pengembangan/ product development untuk peningkatan nilai tambah	2	4	6	8	10	2.99	5.04	5.79	6.66	10.20
9.12	Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian	Pengembangan teknologi pertanian serta pembinaan dan koordinasi kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian	► Jumlah koordinasi penyusunan penganggaran, pelaksanaan dan movev kegiatan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian	10 koordinasi	10 koordinasi	10 koordinasi	10 koordinasi	10 koordinasi	32.40	32.40	32.40	32.40	32.40
			► Jumlah advokasi teknis, pendampingan, dan kebijakan operasional pembangunan pertanian wilayah, regional, dan nasional (termasuk PUAP)	34 advokasi	69 advokasi	69advokasi	69 advokasi	69 advokasi	39.57	39.57	39.57	40.86	40.90
			► Jumlah adaptasi teknologi spesifik lokasi	64 teknologi	96 teknologi	96 teknologi	96 teknologi	96 teknologi	82.25	82.26	82.26	86.13	86.25
			► Jumlah diseminasi inovasi pertanian	329 kegiatan	446 kegiatan	446 kegiatan	446 kegiatan	446 kegiatan	164.52	164.52	164.52	172.26	172.50
10.	<u>Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani</u>	Pengembangan SDM pertanian, melalui pemberdayaan SDM dan kelembagaan petani	► Jumlah aparatur di sektor pertanian yang diberdayakan dan dikembangkan kapasitasnya melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi profesi SDM pertanian (orang)	48,853	66,982	75,982	85,983	102,983	<u>1,161.79</u>	<u>1,287.61</u>	<u>1,374.28</u>	<u>1,461.59</u>	<u>1,537.94</u>
			► Jumlah non aparatur di sektor pertanian yang diberdayakan dan dikembangkan kapasitasnya melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi profesi SDM pertanian (orang)	19,091	29,080	29,277	29,278	29,278					
			► Jumlah kelembagaan Petani yang ditumbuhkembangkan dan diberdayakan kapasitasnya melalui penyuluhan dan pelatihan pertanian (unit)	28,344	28,554	51,764	63,974	72,880					
10.1	Pengembangan reorientasi pendidikan pertanian (Prioritas Bidang)	► Mengembangkan program pendidikan pertanian	► Persentase jumlah kegiatan pendidikan pertanian yang dirancang dan dianggarkan(%)	80	80	80	80	80	1.87	1.99	2.19	2.19	2.19

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
			► Jumlah jenis profesi SDM Pertanian yang terstandarisasi dan tersertifikasi (jenis)	3	3	3	3	3	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16
		► Mengembangkan kelembagaan pendidikan pertanian	Jumlah kelembagaan pendidikan yang ditingkatkan kualitasnya (lembaga)	25	19	25	25	25	2.72	2.45	2.90	2.75	2.60
		► Mengembangkan ketenagaan pendidikan pertanian	► Jumlah tenaga fungsional dan profesi yang sesuai dengan standar kompetensi (orang)	600	600	600	600	600	10.96	11.58	12.20	12.20	12.20
			► Jumlah SDM Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Diklat Fungsional dan Diklat Profesi yang sesuai dengan standar kompetensi(orang)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	16.02	16.02	16.22	16.82	17.22
			► Jumlah aparatur yang meningkat jenjang pendidikan formal	100	100	100	100	100	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71
			► Jumlah lulusan DIV di bidang RIHP	750	600	600	600	600	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84
			► Jumlah SDM Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan SPP(orang)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	27.03	27.03	27.03	27.03	27.03
			► Jumlah lulusan yang mengikuti retooling di bidang pertanian	600	600	600	600	600	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
		► Peningkatan kerjasama pendidikan pertanian di dalam dan luar negeri	Persentase Jumlah kegiatan kerjasama pendidikan di dalam dan di luar negeri yang dirancang dan dilaksanakan (%)	60	60	60	60	60	4.39	5.39	6.39	7.39	8.39
10.2	Pemantapan sistem pelatihan pertanian	► Menumbuh kembangkan kelembagaan pelatihan dan kelembagaan petani	jumlah kelembagaan UPT Pusat dan P4S yang terakreditasi	40	250	460	670	880	2.44	2.68	2.95	3.24	3.57
		► Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan pelatihan pertanian											
		- Mengembangkan pelatihan aparatur pertanian	Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan (orang)	17,010	27,982	27,982	27,983	27,983	104.63	107.81	118.73	120.28	122.24
		- Mengembangkan pelatihan non aparatur pertanian	Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan(orang)	14,491	24,480	24,677	24,678	24,678	38.59	57.34	63.24	66.28	66.97
		► Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pelatihan pertanian yang dirancang dan dianggarkan (%)	60	70	80	85	90	8.38	9.22	10.15	11.16	12.28
		► Mengembangkan kerjasama pelatihan pertanian	Jumlah kegiatan kerjasama pelatihan dan prosentase jumlah jenis pelatihan yang dirancang dan dilaksanakan (paket)	15	15	15	15	15	1.58	6.00	8.13	10.76	13.42

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
10.3	Pemantapan sistem penyuluhan pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	► Menata dan menguatkan kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk sesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K(Bakorluh dan Bapeluh)	245	345	410	458	491	95.05	99.80	104.79	110.03	115.54
		► Menumbuhkembangkan kelembagaan petani	jumlah kelembagaan petani (gapoktan)	28304	38304	51304	63304	72000	10.58	11.10	11.66	12.24	12.85
		► Meningkatkan BPP model	Jumlah BPP model	336	350	380	425	458	33.60	45.20	45.20	45.20	45.20
		► Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh pertanian	Jumlah Ketenagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya(orang)	27,393	36,000	45,000	55,000	72,000	429.69	479.10	510.00	530.00	545.00
		► Meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian	Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dirancang dan dianggarkan (%)	30	50	65	80	100	169.51	177.98	186.88	196.23	206.04
10.4	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Badan Pengembangan SDM Pertanian	► Meningkatkan kapasitas administrasi, manajemen sumber daya manusia, sarana dan prasarana anggaran serta piranti lunak organisasi pengembangan SDM Pertanian	Jumlah Dokumen perencanaan, keuangan, umum, serta evaluasi dan pelaporan program pengembangan SDM pertanian (paket)	18	18	18	18	18	174.40	196.55	215.26	257.43	294.86
		- pemantapan sistem perencanaan - pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan - Pemantapan sisdur pengelolaan peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan dan kepegawaian - Pemantapan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan - Pengelolaan gaji dan operasional perkantoran											
		► Meningkatkan kapasitas SDM pengelola LM3	Jumlah kegiatan dalam rangka koordinasi LM3 (paket)	9	9	9	9	9	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
11.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan melalui konsumsi dan keamanan pangan segar, distribusi dan pemberdayaan ditingkat masyarakat serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.	► % Realisasi koordinasi analisis dan rumusan kebijakan ketahanan pangan.	90	90	95	95	100	397.68	657.00	883.01	1147.99	1507.34
			► % Realisasi gerakan percepatan pengankaragaman konsumsi dan keamanan pangan dalam peningkatan konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang.	95	95	95	95	100					
			► % Realisasi penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat dalam stabilisasi harga dan cadangan pangan masyarakat.	95	95	95	95	100					
			► % Realisasi pengembangan Desa Mandiri Pangan dalam mengurangi jumlah penduduk rawan pangan	95	95	95	95	100					
11.1	Pengembangan pengankaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar	Meningkatnya pemantapan pengankaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	► Pengembangan Desa P2KP (Percepatan pengankaragaman konsumsi pangan, dan Promosi dalam rangka percepatan pengankaragaman konsumsi pangan,	2.000 Desa	4.000 Desa	6.000 Desa	8.000 Desa	10.000 Desa	3.00	26.00	44.30	68.80	98.10
				383 Pusat / Prop / Kab	434 Pusat / Prop / Kab	484 Pusat / Prop / Kab	484 Pusat / Prop / Kab	484 Pusat / Prop / Kab	29.40	36.34	37.26	40.21	44.23
			► Penyediaan tenaga/petugas lapang seperti penyuluh (Pendampingan P2KP)	2.000 Desa	4.000 Desa	6.000 Desa	8.000 Desa	10.000 Desa	7.00	14.00	21.00	28.00	35.00
			► Penanganan keamanan pangan segar di tingkat produsen dan konsumen	33/236 Prop/kab	33/236 Prop/kab	33/236 Prop/Kab	33/350 Prop/Kab	33/350 Prop/Kab	14.00	72.40	86.94	103.21	114.21
			► Terlaksananya pemantauan dan pemantapan pengankaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan (Percepatan diversifikasi pangan)	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	3.30	4.95	7.34	11.33	16.74
			► Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi, pengankaragaman dan keamanan pangan.	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	3.30	4.31	5.16	6.45	8.06
11.2	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.	Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan.	► Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan melalui Penyediaan Pembiayaan dalam Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).	750 Gap	1.000 Gap	1.250 Gap	1.500 Gap	2.500 Gap	114.07	161.50	215.62	274.75	387.25
			► Penyediaan tenaga/petugas lapang seperti penyuluh (Pendampingan Penguatan LDPM)	750 Gap	1.000 Gap	1.250 Gap	1.500 Gap	2.500 Gap	2.63	3.50	4.38	5.25	8.75
			► Tersedianya data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan.	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	6.65	9.69	12.48	15.60	19.50

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
									(Milyar Rp)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
			► Terlaksananya pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan. <i>(Peningkatan efisiensi distribusi dan akses pangan)</i>	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	6.65	8.31	10.52	12.40	16.50
11.3	Pengembangan ketersediaan dan penanganan	Meningkatnya pemantapan ketersediaan	► Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Lumbung Pangan.	1.750 Desa	2.550 Desa	3.350 Desa	4.150 Desa	5.000 Desa	119.79	197.76	285.99	389.45	519.06
				800 Lb	1225 Lb	1.650 Lb	2.075 Lb	2.500 Lb	12.00	20.21	29.95	41.64	54.90
			► Penyediaan tenaga/petugas lapang seperti penyuluh <i>(Pendampingan Desa Mandiri Pangan)</i>	1.750 Desa	2.550 Desa	3.350 Desa	4.150 Desa	5.000 Desa	6.13	8.93	11.73	14.53	17.50
			► Penanganan daerah/lokasi Rawan Pangan	350 Kab	400 Kab	450 Kab	450 Kab	450 Kab	8.75	11.00	13.61	14.97	16.47
			► Tersedianya Data & Informasi tentang ketersediaan, cadangan dan daerah rawan pangan.	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	4.95	7.52	9.25	11.56	14.45
			► Terlaksananya pemantauan dan analisis ketersediaan dan kebutuhan pangan, serta pemantauan dan pemantapan kerawanan pangan.	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	3.03	3.79	4.74	5.92	7.31
			► Menyusun skenario penyediaan pangan berbasis wilayah.	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	3.03	3.79	4.74	5.92	7.31
11.4	Dukungan Manajemen dan teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.	Meningkatnya manajemen serta pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan.	► Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan	5 Pkt / 33 Prop 350 kab	5 Pkt / 33 Prop 350 kab	5 Pkt / 33 Prop 350 kab	5 Pkt / 33 Prop 350 kab	5 Pkt / 33 Prop 350 kab	25.00	31.50	39.00	49.00	61.00
			► Koordinasi ketahanan pangan (Dewan Ketahanan Pangan), serta Koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pemantauan ketersediaan, distribusi dan konsumsi dan keamanan pangan	33 Prop 350 Kab	33 Prop 350 Kab	33 Prop 350 Kab	33 Prop 350 Kab	33 Prop 350 Kab	25.00	31.50	39.00	49.00	61.00
12.	Program Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	Meningkatnya efektivitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati	► Efektivitas pengendalian resiko masuk dan penyebarannya HPHK dan OPTK, serta pangan yang tidak sesuai standar keamanan pangan	50%	75%	80%	85%	90%	387.42	608.44	526.57	631.86	758.19
			► Efektivitas pelayanan ekspor komoditas pertanian dan produk tertentu.	90%	90%	90%	90%	95%					
			► Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian	75%	85%	90%	90%	95%					
12.1	Peningkatan Sistem Karantina Hewan (Prioritas Bidang)	Kebijakan teknis Karantina Hewan yang efektif dalam operasional pencegahan masuk, menyebar dan keluarnya HPHK.	Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina hewan yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi (paket)	3	3	3	3	3	4.71	8.00	9.60	11.52	13.82

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
12.2	Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan (Prioritas Bidang)	Kebijakan teknis Karantina Tumbuhan yang efektif dalam operasional pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK	Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi (paket)	3	3	3	3	3	3.62	8.00	9.60	11.52	13.82
12.3	Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan sistem Pengawasan Keamanan Hayati (prioritas Bidang)	Kebijakan teknis pengawasan keamanan hayati yang efektif dalam operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan Nabati; dan sistim informasi yang optimal dalam mendukung operasional Program Barantan	► Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional pengawasan keamanan hayati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi	2	2	2	2	2	1.54	8.00	9.60	11.52	13.82
			► Tingkat kesiapan infrastruktur sistem informasi Barantan	40%	50%	75%	80%	90%	3.75	11.24	6.00	7.20	8.64
			► Prosentase peningkatan akses informasi melalui jaringan ke pusat data Barantan oleh instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Barantan	25%	50%	50%	50%	25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Prioritas Nasional dan Bidang)	Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif	► Vol. dan frek. operasional tindakan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati (sertifikasi karantina)	350 rb	400 rb	420 rb	450 rb	450 rb	291.53	449.84	384.83	461.79	554.15
			► Prosentase peningkatan indeks kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan terhadap kebijakan, standar, teknik dan metoda yang diberlakukan	10%	20%	5%	5%	5%					
			► Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian	0%	0%	0%	0%	0%					
			► Peningkatan Indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa	15%	15%	10%	10%	10%					
12.5	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar Karantina Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dalam mendukung efektifitas penilaian dan pengendalian resiko ditempat pemasukkan dan pengeluaran	► Jml teknik dan metoda tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati yang diujicobakan dan dikembangkan	4	10	2	2	2	12.57	18.86	16.34	19.61	23.54
			► Jumlah sampel lab. yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (Uji Standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi)	5000	6000	7200	8000	8000					
			► Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi	4	6	2	2	2					

Lampiran 1.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN				
				2010	2011	2012	2013	2014	(Milyar Rp)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
12.6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Badan Karantina Pertanian	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati	► Opini laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	69.70	104.50	90.60	108.70	130.40
			► Kualifikasi laporan kinerja minimal baik	100%	100%	100%	100%	100%					
			► Peningkatan indeks kesesuaian kompetensi terhadap standar pelayanan	5%	25%	5%	5%	5%					
			► Indeks budaya kerja	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70					
			► Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan/disempurnakan berdasarkan rumusan kebijakan teknis (paket)	3	3	3	3	3					
			► Jumlah kehadiran dalam agenda pertemuan internasional (bilateral, regional, dan multilateral) (paket)	3	3	3	3	3					
TOTAL									8038.13	14315.76	15222.98	16625.71	18406.53

LAMPIRAN 2 : SASARAN PRODUKSI PADI TAHUN 2010 - 2014

No	Provinsi	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Nanggroe Aceh D	1,617,900	1,669,339	1,722,719	1,778,525	1,836,758
2.	Sumatera Utara	3,577,134	3,690,864	3,808,886	3,932,272	4,061,023
3.	Sumatera Barat	2,126,715	2,194,331	2,264,499	2,337,856	2,414,402
4.	R i a u	605,375	624,622	644,595	665,477	687,266
5.	Ja m b i	673,800	695,223	717,454	740,695	764,947
6.	Sumatera Selatan	3,106,295	3,205,055	3,307,543	3,414,688	3,526,493
7.	Bengkulu	512,247	528,533	545,434	563,103	581,540
8.	Lampung	2,697,400	2,783,160	2,872,157	2,965,198	3,062,285
9	D.K.I Jakarta	8,980	9,266	9,562	9,872	10,195
10	Jawa Barat	11,309,487	11,669,057	12,042,195	12,432,294	12,839,355
11	Jawa Tengah	9,733,950	10,043,428	10,364,584	10,700,338	11,050,690
12	D.I Yogyakarta	825,579	851,827	879,066	907,543	937,258
13	Jawa Timur	11,415,000	11,777,924	12,154,544	12,548,283	12,959,141
14	B a l i	840,000	866,707	894,421	923,395	953,629
15	Nusa Tenggara Barat	1,954,827	2,016,978	2,081,474	2,148,903	2,219,262
16	Nusa Tenggara Timur	621,394	641,150	661,652	683,086	705,452
17	Kalimantan Barat	1,444,530	1,490,457	1,538,117	1,587,943	1,639,936
18	Kalimantan Tengah	665,827	686,996	708,964	731,930	755,895
19	Kalimantan Selatan	2,113,048	2,180,229	2,249,946	2,322,832	2,398,886
20	Kalimantan Timur	620,000	639,712	660,168	681,554	703,869
21	Sulawesi Utara	582,826	601,356	620,586	640,689	661,667
22	Sulawesi Tengah	1,084,000	1,118,464	1,154,229	1,191,620	1,230,636
23	Sulawesi Selatan	5,104,800	5,267,100	5,435,525	5,611,605	5,795,341
24	Sulawesi Tenggara	452,060	466,433	481,348	496,941	513,211
25	Maluku	82,380	84,999	87,717	90,559	93,524
26	Papua	101,195	104,412	107,751	111,242	114,884
27	Bangka Belitung	29,200	30,128	31,092	32,099	33,150
28	Banten	2,025,000	2,089,382	2,156,194	2,226,042	2,298,928
29	Gorontalo	270,000	278,584	287,493	296,806	306,524
30	Maluku Utara	54,723	56,463	58,268	60,156	62,126
31	Riau Kepulauan	465	480	495	511	528
32	Papua Barat	48,300	49,836	51,429	53,095	54,834
33	Sulawesi Barat	375,563	387,504	399,895	412,849	426,367
Indonesia		66,680,000	68,800,000	71,000,000	73,300,000	75,700,000

LAMPIRAN 3 : SASARAN PRODUKSI JAGUNG TAHUN 2010 - 2014

NO	PROPINSI	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	161,000	177,100	194,810	208,447	229,291
2	SUMATERA UTARA	1,309,900	1,473,638	1,621,000	1,781,476	2,004,161
3	SUMATERA BARAT	437,733	481,506	529,650	566,725	623,398
4	RIAU	57,000	62,700	68,970	75,867	83,454
5	JAMBI	44,640	49,104	54,014	57,795	63,575
6	SUMATERA SELATAN	115,070	126,577	139,235	148,981	163,879
7	BENGKULU	102,582	112,840	124,124	132,813	146,094
8	LAMPUNG	2,243,821	2,461,199	2,700,723	2,840,048	3,195,054
9	DKI JAKARTA	35	39	40	41	43
10	JAWA BARAT	828,000	910,800	1,001,880	1,102,068	1,212,275
11	JAWA TENGAH	3,148,012	3,541,514	3,895,665	4,246,275	4,670,902
12	DI YOGYAKARTA	327,000	359,700	395,670	435,237	478,761
13	JAWA TIMUR	5,777,834	6,471,174	6,956,512	7,513,033	8,445,992
14	BALI	91,000	100,100	105,105	110,360	121,396
15	NUSA TENGGARA BARAT	370,000	407,000	427,350	448,718	493,589
16	NUSA TENGGARA TIMUR	846,693	931,362	1,024,500	1,126,949	1,239,644
17	KALIMANTAN BARAT	200,000	220,000	242,000	258,940	284,834
18	KALIMANTAN TENGAH	9,000	9,900	10,890	11,652	12,818
19	KALIMANTAN SELATAN	120,355	132,391	145,630	155,824	171,406
20	KALIMANTAN TIMUR	14,081	15,489	17,038	18,231	20,054
21	SULAWESI UTARA	660,000	726,000	798,600	878,460	988,268
22	SULAWESI TENGAH	167,360	184,096	202,506	222,756	245,032
23	SULAWESI SELATAN	1,641,217	1,805,339	1,985,870	2,184,457	2,457,514
24	SULAWESI TENGGARA	72,805	80,086	88,094	96,903	106,594
25	MALUKU	15,000	16,500	17,325	18,191	19,101
26	MALUKU UTARA	23,911	26,302	27,617	28,998	30,448
27	KEPRI	1,110	1,221	1,282	1,346	1,413
28	PAPUA	7,875	8,663	9,096	9,550	10,028
29	BABEL	2,023	2,225	2,337	2,453	2,576
30	BANTEN	51,081	56,189	61,808	66,135	72,748
31	GORONTALO	890,000	979,000	1,076,900	1,173,821	1,320,549
32	PAPUA BARAT	1,362	1,498	1,573	1,652	1,734
33	SULAWESI BARAT	62,500	68,750	72,188	75,797	83,377
INDONESIA		19,800,000	22,000,000	24,000,000	26,000,000	29,000,000

LAMPIRAN 4 : SASARAN PRODUKSI KEDELAI TAHUN 2010 - 2014

NO	PROPINSI	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Nanggroe Aceh D	118,340	142,000	174,400	198,400	238,100
2	Sumatera Utara	20,530	26,150	34,400	42,800	54,800
3	Sumatera Barat	7,500	10,150	13,400	16,400	20,800
4	R i a u	8,080	10,850	14,300	18,900	24,200
5	Ja m b i	15,340	19,400	24,400	29,700	38,700
6	Sumatera Selatan	17,090	21,500	26,800	34,600	43,600
7	Bengkulu	6,170	9,500	14,600	18,900	24,100
8	Lampung	19,690	24,620	32,600	39,200	51,200
9	D.K.I Jakarta	0	0	0	0	0
10	Jawa Barat	78,420	95,100	125,200	150,500	184,600
11	Jawa Tengah	211,780	254,140	308,500	370,200	446,300
12	D.I Yogyakarta	45,600	54,720	65,700	78,800	96,600
13	Jawa Timur	420,100	488,320	557,800	632,700	715,800
14	B a l i	14,830	16,950	20,500	24,800	29,800
15	Nusa Tenggara Barat	135,000	162,000	194,400	232,000	278,400
16	Nusa Tenggara Timur	3,500	4,240	6,600	7,900	10,500
17	Kalimantan Barat	3,330	4,100	5,600	8,100	10,800
18	Kalimantan Tengah	15,000	18,300	22,400	27,400	33,400
19	Kalimantan Selatan	5,800	7,080	10,200	13,800	18,800
20	Kalimantan Timur	6,200	7,600	10,700	14,700	19,600
21	Sulawesi Utara	10,600	12,940	17,800	21,800	27,600
22	Sulawesi Tengah	9,000	10,980	14,500	18,700	23,800
23	Sulawesi Selatan	63,450	76,140	94,400	112,200	136,600
24	Sulawesi Tenggara	9,880	13,060	18,100	23,100	29,200
25	Maluku	2,130	3,050	4,200	5,100	6,700
26	Papua	5,000	6,550	8,600	10,500	12,800
27	Bangka Belitung	0	0	0	0	0
28	Banten	25,000	31,000	40,700	49,800	60,700
29	Gorontalo	6,900	8,400	10,200	12,400	16,200
30	Maluku Utara	2,270	3,250	4,500	5,600	7,100
31	Riau Kepulauan	0	0	0	0	0
32	Papua Barat	2,470	3,490	4,800	5,800	7,400
33	Sulawesi Barat	11,000	14,420	19,700	25,200	31,800
Indonesia		1,300,000	1,560,000	1,900,000	2,250,000	2,700,000

LAMPIRAN 5 : SASARAN PRODUKSI KACANG TANAH TAHUN 2010 - 2014

No.	PROPINSI	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Nanggroe Aceh D	8,019	11,200	11,648	12,707	13,766
2	Sumatera Utara	21,850	27,330	27,423	29,916	32,409
3	Sumatera Barat	10,937	11,392	13,787	15,041	16,294
4	Riau	3,632	3,994	4,062	4,431	4,800
5	Jambi	2,470	2,716	3,349	3,654	3,958
6	Sumatera Selatan	7,497	10,429	12,330	13,451	14,572
7	Bengkulu	6,708	7,377	7,825	8,536	9,248
8	Lampung	13,168	14,160	17,314	18,888	20,462
9	DKI Jakarta	23	25	28	31	33
10	Jawa Barat	98,691	111,866	120,115	131,035	141,954
11	Jawa Tengah	188,964	212,852	240,852	262,747	284,643
12	D.I. Yogyakarta	73,104	71,626	85,470	93,240	101,010
13	Jawa Timur	227,336	244,519	283,641	309,426	335,212
14	Bali	19,382	22,416	24,645	26,885	29,126
15	Nusa Tenggara Barat	40,623	54,274	50,115	54,671	59,227
16	Nusa Tenggara Timur	27,750	20,153	29,763	32,468	35,174
17	Kalimantan Barat	2,197	2,581	2,896	3,159	3,422
18	Kalimantan Tengah	2,079	2,286	2,366	2,581	2,797
19	Kalimantan Selatan	18,020	19,818	23,149	25,254	27,358
20	Kalimantan Timur	3,038	2,791	3,264	3,561	3,857
21	Sulawesi Utara	9,740	7,412	10,741	11,718	12,697
22	Sulawesi Tengah	9,911	10,349	13,760	15,011	16,262
23	Sulawesi Selatan	40,932	50,856	54,039	58,952	63,864
24	Sulawesi Tenggara	7,822	8,602	9,784	10,673	11,563
25	Maluku	3,552	2,808	4,148	4,525	4,902
26	Papua	3,103	3,147	3,827	4,175	4,523
27	Bangka Belitung	539	593	695	758	822
28	Banten	20,985	19,097	24,331	26,543	28,755
29	Gorontalo	2,100	4,812	3,692	4,028	4,364
30	Maluku Utara	4,726	5,197	7,749	8,453	9,154
31	Riau Kepulauan	125	90	100	109	118
32	Papua Barat	2,094	2,303	2,146	2,341	2,536
33	Sulawesi Barat	883	929	946	1,032	1,118
Indonesia		882,000	970,000	1,100,000	1,200,000	1,300,000

LAMPIRAN 6: SASARAN PRODUKSI KACANG HIJAU TAHUN 2010 - 2014

No.	PROPINSI	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Nanggroe Aceh D	3,284	3,375	3,558	3,740	3,923
2	Sumatera Utara	6,489	6,669	7,030	7,390	7,751
3	Sumatera Barat	1,598	1,643	1,732	1,820	1,909
4	Riau	2,205	2,267	2,389	2,512	2,634
5	Jambi	654	672	708	745	781
6	Sumatera Selatan	4,197	4,313	4,546	4,779	5,013
7	Bengkulu	1,716	1,764	1,859	1,954	2,050
8	Lampung	4,971	5,109	5,386	5,662	5,938
9	DKI Jakarta	0	0	0	0	0
10	Jawa Barat	14,403	14,803	15,604	16,404	17,204
11	Jawa Tengah	109,148	112,180	118,343	124,307	130,371
12	D.I. Yogyakarta	633	651	686	721	757
13	Jawa Timur	88,218	90,668	95,569	100,470	105,371
14	Bali	1,164	1,196	1,261	1,325	1,390
15	Nusa Tenggara Barat	46,771	48,071	50,669	53,267	55,866
16	Nusa Tenggara Timur	24,423	25,102	26,459	27,816	29,172
17	Kalimantan Barat	1,050	1,079	1,138	1,196	1,254
18	Kalimantan Tengah	326	335	353	372	390
19	Kalimantan Selatan	1,631	1,676	1,767	1,857	1,948
20	Kalimantan Timur	1,177	1,210	1,275	1,341	1,406
21	Sulawesi Utara	2,541	2,612	2,573	2,894	3,035
22	Sulawesi Tengah	1,256	1,291	1,361	1,431	1,501
23	Sulawesi Selatan	32,807	33,718	35,620	37,363	39,186
24	Sulawesi Tenggara	1,901	1,954	2,060	2,165	2,271
25	Maluku	693	712	750	789	827
26	Papua	1,225	1,259	1,327	1,395	1,463
27	Bangka Belitung	0	0	0	0	0
28	Banten	2,383	2,449	2,581	2,714	2,846
29	Gorontalo	595	611	644	677	710
30	Maluku Utara	451	464	489	515	538
31	Riau Kepulauan	2	2	2	2	2
32	Papua Barat	830	852	898	944	990
33	Sulawesi Barat	1,258	1,293	1,363	1,433	1,503
Indonesia		360,000	370,000	390,000	410,000	430,000

LAMPIRAN 7 : SASARAN PRODUKSI UBIKAYU TAHUN 2010 - 2014

NO	PROPINSI	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	N. ACEH D.	45,880	48,256	51,555	54,236	56,917
2.	SUMUT	803,500	845,105	902,890	949,840	996,791
3.	SUMBAR	107,250	112,803	120,516	126,783	133,050
4.	RIAU	66,000	69,417	74,164	78,020	81,877
5.	JAMBI	38,080	40,052	42,790	45,015	47,241
6.	SUMSEL	200,080	210,440	224,829	236,520	248,211
7.	BENGKULU	81,900	86,141	92,031	96,816	101,602
8.	LAMPUNG	7,594,000	7,987,217	8,533,351	8,977,086	9,420,820
9	DKI JAKARTA	580	610	652	686	720
10	JABAR	2,078,200	2,185,809	2,335,266	2,456,700	2,578,134
11	JATENG	3,354,000	3,527,670	3,768,878	3,964,860	4,160,841
12	DI JOGJA	960,000	1,009,709	1,078,749	1,134,844	1,190,939
13	JATIM	3,642,000	3,830,583	4,092,503	4,305,313	4,518,123
14	BALI	172,280	181,201	193,590	203,657	213,724
15	N.T.B.	102,000	107,282	114,617	120,577	126,537
16	N.T.T.	901,000	947,654	1,012,451	1,065,098	1,117,745
17	KALBAR	234,720	246,874	263,754	277,469	291,184
18	KALTENG	101,790	107,061	114,381	120,329	126,277
19	KALSEL	125,560	132,061	141,091	148,428	155,765
20	KALTIM	123,200	129,579	138,439	145,638	152,837
21	SULUT	80,600	84,773	90,570	95,280	99,989
22	SULTENG	72,450	76,201	81,412	85,645	89,879
23	SULSEL	510,380	536,807	573,512	603,335	633,157
24	SULTRA	221,100	232,549	248,449	261,369	274,288
25	MALUKU	140,800	148,091	158,216	166,444	174,671
26	PAPUA	46,400	48,803	52,140	54,851	57,562
27	BABEL	25,380	26,694	28,519	30,002	31,485
28	BANTEN	168,000	176,699	188,781	198,598	208,414
29	GORONTALO	18,000	18,932	20,227	21,278	22,330
30	MALUKU UT	133,100	139,992	149,564	157,341	165,119
31	KEP RIAU	12,720	13,379	14,293	15,037	15,780
32	PAPUA BARAT	28,250	29,713	31,744	33,395	35,046
33	SUL BARAT	58,800	61,845	66,073	69,509	72,945
INDONESIA		22,248,000	23,400,000	25,000,000	26,300,000	27,600,000

LAMPIRAN 8 : SASARAN PRODUKSI UBI JALAR TAHUN 2010 - 2014

NO	PROPINSI	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	N. ACEH D.	30,769	33,077	35,385	37,692	40,000
2.	SUMUT	161,026	173,103	185,179	197,256	209,333
3.	SUMBAR	45,128	48,513	51,897	55,282	58,667
4.	RIAU	10,564	11,356	12,149	12,941	13,733
5.	JAMBI	19,692	21,169	22,646	24,123	25,600
6.	SUMSEL	15,179	16,318	17,456	18,595	19,733
7.	BENGKULU	41,026	44,103	47,179	50,256	53,333
8.	LAMPUNG	42,051	45,205	48,359	51,513	54,667
9	DKI JAKARTA	0	0	0	0	0
10	JABAR	396,923	426,692	456,462	486,231	516,000
11	JATENG	150,769	162,077	173,385	184,692	196,000
12	DI JOGJA	5,128	5,513	5,897	6,282	6,667
13	JATIM	166,667	179,167	191,667	204,167	216,667
14	BALI	66,667	71,667	76,667	81,667	86,667
15	N.T.B.	16,923	18,192	19,462	20,731	22,000
16	N.T.T.	153,846	165,385	176,923	188,462	200,000
17	KALBAR	6,667	7,167	7,667	8,167	8,667
18	KALTENG	11,897	12,790	13,682	14,574	15,467
19	KALSEL	13,846	14,885	15,923	16,962	18,000
20	KALTIM	22,051	23,705	25,359	27,013	28,667
21	SULUT	30,769	33,077	35,385	37,692	40,000
22	SULTENG	20,513	22,051	23,590	25,128	26,667
23	SULSEL	82,051	88,205	94,359	100,513	106,667
24	SULTRA	17,231	18,523	19,815	21,108	22,400
25	MALUKU	12,821	13,782	14,744	15,705	16,667
26	MALUKU UT	27,692	29,769	31,846	33,923	36,000
27	KEP RIAU	2,564	2,756	2,949	3,141	3,333
28	PAPUA	354,974	381,597	408,221	434,844	461,467
29	BABEL	5,128	5,513	5,897	6,282	6,667
30	BANTEN	32,308	34,731	37,154	39,577	42,000
31	GORONTALO	5,128	5,513	5,897	6,282	6,667
32	PAPUA BARAT	26,872	28,887	30,903	32,918	34,933
33	SUL BARAT	5,128	5,513	5,897	6,282	6,667
INDONESIA		2,000,000	2,150,000	2,300,000	2,450,000	2,600,000

LAMPIRAN 9 : SASARAN PRODUKSI CABE 2010-2014

NO.	PROPINSI	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Nanggroe Aceh D.	42,552	43,708	45,545	46,861	48,102
2.	Sumatera Utara	141,569	142,939	143,910	145,887	146,761
3.	Sumatera Barat	38,983	40,228	41,069	41,710	41,401
4.	R i a u	9,070	10,424	10,725	11,026	11,327
5.	J a m b i	24,115	25,429	25,972	26,839	27,393
6.	Sumatera Selatan	26,502	26,761	27,742	28,323	29,104
7.	Bengkulu	52,916	53,757	55,077	56,497	57,817
8.	Lampung	24,238	25,036	26,166	27,316	28,806
9	DKI Jakarta	2	0	0	0	0
10	Jawa Barat	250,480	251,472	252,045	251,639	252,962
11	Jawa Tengah	156,440	157,066	157,981	158,780	160,013
12	DI Yogyakarta	15,632	16,193	16,727	17,395	18,670
13	Jawa Timur	200,834	201,300	201,967	202,937	203,378
14	Bali	24,469	25,419	25,817	26,016	26,614
15	N T B	46,713	47,560	48,624	49,242	49,841
16	N T T	10,922	11,148	11,748	12,643	13,640
17	Kalimantan Barat	8,349	9,004	9,809	10,813	11,917
18	Kalimantan Tengah	8,960	9,451	10,649	11,446	12,343
19	Kalimantan Selatan	10,645	11,382	11,815	12,148	12,516
20	Kalimantan Timur	17,042	18,392	19,345	20,215	21,058
21	Sulawesi Utara	8,452	9,752	10,357	10,955	11,367
22	Sulawesi Tengah	7,244	7,987	8,227	8,867	9,607
23	Sulawesi Selatan	23,203	23,565	24,139	25,900	26,825
24	Sulawesi Tenggara	1,632	2,152	2,301	2,430	2,910
25	Maluku	938	1,232	1,583	1,584	1,985
26	Papua	3,938	4,802	5,019	6,366	7,212
27	Bangka Belitung	5,338	6,693	8,490	9,288	10,086
28	B a n t e n	7,186	7,798	8,316	9,247	9,977
29	Gorontalo	11,895	12,174	12,293	12,367	12,963
30	Maluku Utara	1,505	1,721	2,161	2,458	2,842
31	Kepulauan Riau	4,075	4,770	5,953	6,835	7,816
32	Papua Barat	9,163	9,747	11,161	12,444	13,491
33	Sulawesi Barat	1,620	2,236	3,246	4,186	4,591
JUMLAH		1,196,622	1,221,299	1,245,979	1,270,657	1,295,336

LAMPIRAN 10 : SASARAN PRODUKSI BAWANG MERAH 2010-2014

NO.	PROVINSI	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Nanggroe Aceh D.	6,098	7,338	8,035	8,335	9,636
2.	Sumatera Utara	12,373	13,136	14,223	15,310	15,398
3.	Sumatera Barat	21,256	21,861	22,160	22,458	23,757
4.	R i a u	52	82	97	112	128
5.	J a m b i	2,698	3,299	4,012	4,425	4,839
6.	Sumatera Selatan	52	81	234	277	523
7.	Bengkulu	1,107	1,180	1,924	2,168	2,412
8.	Lampung	298	317	712	863	1,012
9	DKI Jakarta	0	0	0	0	0
10	Jawa Barat	119,854	120,118	121,876	122,634	123,392
11	Jawa Tengah	389,407	390,551	390,847	392,058	396,582
12	DI Yogyakarta	17,421	19,598	21,369	22,140	22,375
13	Jawa Timur	186,058	187,087	188,126	190,164	192,459
14	Bali	7,953	8,776	9,690	10,605	11,020
15	N T B	70,468	72,480	73,144	78,807	79,471
16	N T T	15,516	17,225	18,961	20,351	21,741
17	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0
18	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0
19	Kalimantan Selatan	9	18	21	24	28
20	Kalimantan Timur	162	189	321	454	687
21	Sulawesi Utara	3,956	4,241	5,658	6,074	6,491
22	Sulawesi Tengah	5,917	6,849	7,867	8,884	9,901
23	Sulawesi Selatan	10,780	11,611	12,003	12,395	13,675
24	Sulawesi Tenggara	581	695	734	773	812
25	Maluku	470	1,481	2,080	2,678	3,277
26	Papua	955	1,884	1,895	2,575	2,870
27	Bangka Belitung	0	80	100	120	140
28	B a n t e n	162	254	1,145	1,357	2,127
29	Gorontalo	315	504	2,919	3,280	4,268
30	Maluku Utara	299	365	393	420	448
31	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0
32	Papua Barat	506	1,484	1,976	2,511	2,525
33	Sulawesi Barat	246	2,153	2,382	2,612	2,841
JUMLAH		874,970	894,936	914,902	934,867	954,833

LAMPIRAN 11 : SASARAN PRODUKSI KENTANG 2010-2014

NO.	PROPINSI	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Nanggroe Aceh D.	13,855	14,568	14,804	15,040	15,276
2.	Sumatera Utara	130,438	130,534	131,297	132,060	132,823
3.	Sumatera Barat	32,299	32,562	33,209	33,656	34,303
4.	R i a u	0	0	0	0	0
5.	J a m b i	58,969	59,189	59,787	60,392	60,998
6.	Sumatera Selatan	1,625	2,029	2,271	2,512	2,754
7.	Bengkulu	2,656	3,389	3,952	4,516	5,079
8.	Lampung	963	1,659	1,525	2,390	2,505
9	DKI Jakarta	0	0	0	0	0
10	Jawa Barat	292,571	293,051	293,660	293,820	294,652
11	Jawa Tengah	263,434	263,609	264,562	264,521	264,922
12	DI Yogyakarta	127	181	283	485	887
13	Jawa Timur	105,172	105,448	105,777	105,870	106,128
14	Bali	4,105	4,853	5,349	5,846	6,343
15	N T B	2,595	3,771	4,577	4,882	5,188
16	N T T	3,071	3,361	3,638	3,915	4,191
17	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0
18	Kalimantan Tengah	0	190	234	278	322
19	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0
21	Sulawesi Utara	139,169	139,851	139,955	140,805	141,115
22	Sulawesi Tengah	411	625	689	752	815
23	Sulawesi Selatan	20,611	20,642	21,302	21,962	22,622
24	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0
25	Maluku	297	579	712	964	1,207
26	Papua	106	207	573	1,385	1,730
27	Bangka Belitung	0	0	0	0	0
28	B a n t e n	0	28	30	36	64
29	Gorontalo	0	0	0	0	0
30	Maluku Utara	0	0	0	0	0
31	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0
32	Papua Barat	152	173	183	193	203
33	Sulawesi Barat	81	88	98	64	97
JUMLAH		1,072,710	1,080,588	1,088,467	1,096,345	1,104,224

LAMPIRAN 12 : SASARAN PRODUKSI MANGGA 2010-2014

NO	PROPINSI	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Nanggoe Aceh D.	21,554	23,021	24,595	26,277	37,031
2.	Sum. Utara	34,364	37,293	40,223	43,150	45,922
3.	Sum. Barat	6,471	6,962	7,453	7,943	8,404
4.	R i a u	6,016	6,390	6,762	7,132	7,477
5.	J a m b i	2,751	2,841	2,922	3,017	3,078
6.	Sum. Selatan	13,664	12,214	12,159	12,897	13,596
7.	Bengkulu	3,594	3,714	3,835	3,958	4,071
8.	Lampung	43,004	44,482	45,976	47,488	48,870
9	DKI Jakarta	3,269	3,860	3,941	4,537	4,899
10	Jabar	504,829	549,161	591,513	635,322	676,054
11	Jateng	349,743	361,771	373,935	386,244	402,493
12	D.I. Yogya	37,553	39,478	39,393	41,294	43,043
13	Jatim	723,761	757,901	793,762	826,824	854,910
14	B a l i	68,002	71,867	76,725	81,569	86,117
15	N.T.B.	73,870	83,654	92,043	99,625	106,788
16	N.T.T.	110,388	112,677	115,509	118,387	121,932
17	Kal. Barat	3,419	4,514	5,607	6,200	2,782
18	Kal. Tengah	6,754	7,180	8,607	9,034	10,439
19	Kal. Selatan	8,866	9,489	10,111	10,730	11,311
20	Kal. Timur	9,797	10,239	10,681	11,120	11,530
21	Sul. Utara	16,684	17,111	19,542	20,978	22,376
22	Sul. Tengah	19,881	21,453	21,495	22,505	24,167
23	Sul. Selatan	107,960	111,161	114,903	118,691	120,152
24	Sul. Tenggara	6,146	6,329	6,492	6,683	6,807
25	Maluku	4,728	5,193	5,660	6,126	6,571
26	Papua	3,952	4,261	4,571	4,882	5,178
27	Bangka Belitung	2,617	2,861	3,106	3,350	3,583
28	Banten	24,191	26,392	28,596	30,800	32,899
29	Gorontalo	3,491	3,797	4,104	4,411	4,702
30	Maluku Utara	2,465	3,651	3,836	4,022	5,196
31	Kep. Riau	343	352	360	369	375
32	Papua Barat	911	1,008	1,106	1,204	1,297
33	Sul. Barat	8,106	8,447	8,784	9,118	9,418
INDONESIA		2,233,145	2,360,725	2,488,306	2,615,886	2,743,467

LAMPIRAN 13 : SASARAN PRODUKSI PISANG 2010-2014

NO	PROPINSI	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Nanggoe Aceh D.	34,350	36,025	39,793	40,721	43,073
2.	Sum. Utara	266,585	282,573	296,740	308,523	318,406
3.	Sum. Barat	81,083	81,338	82,289	84,915	82,806
4.	R i a u	29,166	29,436	29,490	29,536	31,746
5.	J a m b i	34,694	35,046	36,273	38,327	40,472
6.	Sum. Selatan	320,201	323,461	325,571	326,066	326,156
7.	Bengkulu	53,424	53,958	54,304	54,385	54,301
8.	Lampung	700,966	802,303	848,063	916,520	979,096
9	DKI Jakarta	1,746	1,762	1,765	1,767	1,800
10	Jabar	1,378,781	1,384,048	1,446,492	1,486,533	1,520,405
11	Jateng	831,488	834,756	845,236	846,522	846,797
12	D.I. Yogya	65,764	66,695	67,536	73,996	71,191
13	Jatim	1,103,449	1,104,474	1,111,608	1,133,282	1,164,557
14	B a l i	152,341	187,925	202,588	206,041	208,597
15	N.T.B.	62,875	63,461	63,577	63,675	63,698
16	N.T.T.	191,482	193,432	194,693	194,989	195,184
19	Kal. Barat	127,399	142,977	147,738	151,425	154,300
20	Kal. Tengah	33,835	35,360	36,676	37,719	38,553
21	Kal. Selatan	112,988	119,409	125,075	129,750	131,643
20	Kal. Timur	94,471	99,344	103,609	107,074	109,916
21	Sul. Utara	63,908	67,003	69,695	71,859	73,613
22	Sul. Tengah	26,453	26,698	29,846	31,387	36,925
23	Sul. Selatan	220,373	222,613	224,062	224,103	224,152
24	Sul. Tenggara	43,050	43,452	43,532	43,599	43,669
25	Maluku	9,953	11,729	13,623	15,577	17,584
26	Papua	11,839	12,202	13,001	16,713	18,863
27	Bangka Belitung	22,351	23,974	25,432	26,674	27,739
28	Banten	158,154	166,275	172,363	176,830	180,103
29	Gorontalo	9,832	10,545	11,185	11,729	12,196
30	Maluku Utara	74,138	74,892	75,380	75,494	75,876
31	Kep. Riau	2,307	2,708	3,082	3,419	3,723
32	Papua Barat	4,537	4,558	5,061	5,589	7,601
33	Sul. Barat	23,608	26,374	32,437	33,872	38,452
INDONESIA		6,347,591	6,570,809	6,777,816	6,968,612	7,143,196

LAMPIRAN 14 : SASARAN PRODUKSI JERUK 2010-2014

NO	PROPINSI	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Nanggoe Aceh D.	17,015	18,069	19,931	20,559	32,179
2.	Sum. Utara	972,821	1,027,861	1,082,451	1,136,742	1,183,734
3.	Sum. Barat	25,558	25,833	26,083	26,390	26,796
4.	R i a u	28,882	28,895	28,999	29,182	29,379
5.	J a m b i	47,213	51,296	55,264	59,144	62,823
6.	Sum. Selatan	68,810	69,399	69,811	70,307	70,936
7.	Bengkulu	14,635	15,723	16,790	17,842	18,846
8.	Lampung	65,867	66,012	66,220	66,491	67,039
9	DKI Jakarta	0	0	0	0	0
10	Jabar	29,316	29,890	30,414	30,985	31,645
11	Jateng	43,079	45,486	47,823	50,077	52,199
12	D.I. Yogya	2,790	2,846	2,910	2,976	3,055
13	Jatim	561,602	572,579	583,636	595,733	607,295
14	B a l i	101,056	102,549	104,212	106,014	107,704
15	N.T.B.	4,595	4,602	4,613	4,622	4,750
16	N.T.T.	41,442	43,606	45,435	47,256	48,928
17	Kal. Barat	224,148	238,822	248,267	261,541	281,068
18	Kal. Tengah	7,610	8,191	8,753	9,303	9,824
19	Kal. Selatan	86,102	87,508	90,542	95,680	96,388
20	Kal. Timur	11,860	12,552	13,243	13,939	14,604
21	Sul. Utara	2,229	2,337	2,453	2,578	2,708
22	Sul. Tengah	30,835	31,959	33,113	34,284	35,398
23	Sul. Selatan	48,773	48,368	48,001	47,619	47,321
24	Sul. Tenggara	19,680	19,886	20,045	20,252	20,453
25	Maluku	5,127	5,296	5,466	5,638	5,801
26	Papua	7,461	8,175	8,862	9,527	10,158
27	Bangka Belitung	11,950	12,072	12,228	12,332	12,601
28	Banten	1,623	1,799	1,980	2,161	2,350
29	Gorontalo	1,165	1,305	1,446	1,590	1,731
30	Maluku Utara	5,470	5,906	6,328	6,741	7,136
31	Kep. Riau	367	421	469	514	555
32	Papua Barat	584	631	675	718	758
33	Sul. Barat	383,166	430,484	481,422	526,675	566,776
INDONESIA		2,872,832	3,020,358	3,167,885	3,315,411	3,462,938

LAMPIRAN 15 : SASARAN PRODUKSI DURIAN 2010-2014

NO	PROPINSI	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Nanggoe Aceh D.	8,962	9,789	11,397	13,056	15,084
2.	Sum. Utara	129,381	136,253	146,254	156,996	167,617
3.	Sum. Barat	42,604	44,717	47,071	49,658	52,213
4.	R i a u	10,891	10,926	11,019	11,161	11,305
5.	J a m b i	14,403	20,230	20,476	20,825	21,166
6.	Sum. Selatan	24,319	24,399	24,611	24,937	25,265
7.	Bengkulu	27,557	29,475	31,535	33,740	35,921
8.	Lampung	31,357	31,557	33,092	34,965	35,816
9	DKI Jakarta	138	139	140	142	144
10	Jabar	91,908	95,478	99,467	103,858	108,195
11	Jateng	66,041	67,495	67,749	70,791	76,541
12	D.I. Yogya	6,620	6,873	9,663	9,986	10,306
13	Jatim	92,420	93,361	96,686	100,376	104,019
14	B a l i	8,605	8,761	8,864	9,209	9,550
15	N.T.B.	3,794	3,949	4,530	4,937	5,341
16	N.T.T.	810	856	905	957	1,008
17	Kal. Barat	16,931	17,762	18,768	19,936	20,086
18	Kal. Tengah	8,333	8,368	8,440	8,546	9,150
19	Kal. Selatan	9,338	9,400	9,518	9,685	11,848
20	Kal. Timur	6,952	8,816	9,258	9,771	10,276
21	Sul. Utara	11,676	12,448	13,288	14,195	15,091
22	Sul. Tengah	9,544	9,726	10,353	11,028	11,694
23	Sul. Selatan	22,095	23,250	24,966	26,637	28,287
24	Sul. Tenggara	2,456	2,503	2,564	2,640	2,714
25	Maluku	5,600	5,859	6,148	6,466	6,780
26	Maluku Utara	2,134	2,374	2,627	2,895	3,160
27	Kep. Riau	4,896	6,624	8,362	10,133	11,887
28	Papua	3,271	3,436	3,613	3,803	3,991
29	Bangka Belitung	2,687	3,885	4,102	4,338	4,571
30	Banten	23,354	24,891	26,539	28,303	30,047
31	Gorontalo	286	299	314	330	346
32	Papua Barat	2,411	2,657	2,919	3,199	3,476
33	Sul. Barat	4,020	4,033	4,067	4,121	4,174
INDONESIA		695,796	730,586	769,307	811,618	857,069

LAMPIRAN 16 : SASARAN PRODUKSI MANGGIS 2010-2014

NO	PROPINSI	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Nanggoe Aceh D.	970	975	985	1,001	1,245
2.	Sum. Utara	9,528	9,767	9,931	10,225	10,411
3.	Sum. Barat	13,990	14,239	14,443	14,725	14,919
4.	R i a u	3,045	3,047	3,088	3,160	3,262
5.	J a m b i	1,804	1,902	1,938	1,957	2,006
6.	Sum. Selatan	995	1,035	1,159	1,170	1,209
7.	Bengkulu	2,019	2,164	2,373	2,638	2,803
8.	Lampung	1,277	1,364	1,602	1,695	1,737
9	DKI Jakarta	65	65	67	74	84
10	Jabar	23,977	24,124	24,404	24,493	24,540
11	Jateng	2,043	2,060	2,099	2,122	2,158
12	D.I. Yogya	1,044	1,093	1,162	1,196	1,195
13	Jatim	5,593	5,653	5,663	5,672	5,708
14	B a l i	968	1,078	1,104	1,201	1,309
15	N.T.B.	637	668	682	726	750
16	N.T.T.	18	19	20	21	22
17	Kal. Barat	542	554	564	573	583
18	Kal. Tengah	786	798	803	806	815
19	Kal. Selatan	450	485	500	528	535
20	Kal. Timur	312	318	329	363	401
21	Sul. Utara	1,357	1,382	1,408	1,467	1,503
22	Sul. Tengah	335	381	389	500	573
23	Sul. Selatan	1,362	1,379	1,434	1,479	1,527
24	Sul. Tenggara	0	0	0	0	0
25	Maluku	220	227	231	241	247
26	Papua	0	0	0	0	0
27	Bangka Belitung	2,760	2,806	2,899	2,934	3,009
28	Banten	2,413	2,643	2,695	2,696	2,758
29	Gorontalo	0	0	0	0	0
30	Maluku Utara	154	159	166	170	174
31	Kep. Riau	159	188	192	240	263
32	Papua Barat	0	0	0	0	0
33	Sul. Barat	178	188	190	206	294
INDONESIA		79,003	80,762	82,521	84,280	86,039

LAMPIRAN 17 : SASARAN PRODUKSI RIMPANG 2010-2014

NO.	PROPINSI	TARGET (KG)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Nanggroe Aceh D.	1,077,653	1,202,015	1,319,745	1,432,335	1,540,665
2.	Sumatera Utara	12,999,069	13,470,741	14,125,863	14,768,620	15,400,064
3.	Sumatera Barat	9,248,081	10,564,203	10,886,183	11,212,600	11,540,320
4.	R i a u	4,691,015	5,851,337	6,045,725	6,281,359	6,566,273
5.	J a m b i	4,686,012	5,065,045	5,431,214	5,787,824	6,136,449
6.	Sumatera Selatan	5,100,590	6,263,093	7,432,573	7,607,840	7,787,038
7.	Bengkulu	7,040,355	7,740,323	8,406,220	9,045,780	9,663,335
8.	Lampung	18,657,175	19,001,886	21,236,046	23,384,843	25,462,107
9	DKI Jakarta	80,622	84,529	88,423	92,280	96,010
10	Jawa Barat	100,519,731	104,367,124	107,434,287	108,256,739	110,273,947
11	Jawa Tengah	94,337,992	96,726,924	99,124,382	101,654,307	104,287,354
12	DI Yogyakarta	15,363,094	15,501,320	15,744,419	16,098,021	16,579,425
13	Jawa Timur	102,291,437	104,733,736	106,532,764	112,665,043	118,173,766
14	Bali	1,492,880	1,503,103	1,517,920	1,537,299	1,561,309
15	N T B	1,119,938	1,181,435	1,241,610	1,300,806	1,359,084
16	N T T	9,790,709	10,487,721	11,160,179	11,813,826	12,451,197
17	Kalimantan Barat	3,864,460	4,005,005	4,144,209	4,282,525	4,419,764
18	Kalimantan Tengah	2,143,271	2,326,542	2,501,906	2,671,174	2,835,290
19	Kalimantan Selatan	7,653,372	8,142,197	8,619,698	9,088,765	9,550,030
20	Kalimantan Timur	6,852,722	7,282,946	7,922,525	8,591,981	9,315,566
21	Sulawesi Utara	3,143,208	3,129,191	3,228,000	3,336,928	3,454,087
22	Sulawesi Tengah	803,398	878,773	950,630	1,019,772	1,086,634
23	Sulawesi Selatan	4,152,662	4,101,003	4,240,684	4,382,312	4,525,895
24	Sulawesi Tenggara	2,082,915	2,276,978	2,462,058	2,640,187	2,812,482
25	Maluku	785,182	1,273,812	1,436,560	1,679,246	1,905,295
26	Maluku Utara	0	0	0	0	0
27	Kepulauan Riau	199,699	224,459	247,849	270,177	291,626
28	Papua	1,082,064	1,176,332	1,959,902	2,135,172	2,303,582
29	Bangka Belitung	1,957,041	2,111,030	2,258,886	2,402,034	2,541,170
30	B a n t e n	13,521,034	13,578,047	14,650,848	15,742,790	16,854,432
31	Gorontalo	144,441	118,610	100,160	87,002	77,599
32	Irian Jaya Barat	101,443	111,038	120,183	128,981	137,487
33	Sulawesi Barat	1,164,718	1,313,700	1,454,315	1,588,439	1,717,202
INDONESIA		438,147,984	455,794,199	474,025,967	492,987,006	512,706,486

LAMPIRAN 18 : SASARAN PRODUKSI TANAMAN HIAS 2010-2014

NO.	PROVINSI	TARGET (TANGKAI)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Nanggroe Aceh D.	5,697	7,598	8,499	11,410	14,320
2.	Sumatera Utara	5,555,097	5,948,685	6,492,490	7,440,153	8,501,482
3.	Sumatera Barat	1,266,425	1,343,526	1,504,843	1,640,377	1,717,130
4.	R i a u	284,485	315,688	355,148	403,228	616,875
5.	J a m b i	124,327	138,146	164,870	181,952	199,978
6.	Sumatera Selatan	260,743	283,283	301,525	338,158	487,790
7.	Bengkulu	87,567	110,015	130,463	148,910	170,358
8.	Lampung	1,214,898	1,333,521	1,499,144	1,787,768	2,034,392
11.	DKI Jakarta	1,407,520	1,466,873	1,551,829	1,734,681	1,920,534
12.	Jawa Barat	83,541,129	86,151,038	91,163,363	95,134,860	100,467,516
13.	Jawa Tengah	34,573,405	39,614,644	42,157,784	45,075,693	48,536,893
14.	DI Yogyakarta	987,495	1,235,322	1,386,148	1,909,976	2,175,704
15.	Jawa Timur	70,817,926	74,502,172	78,503,888	83,943,273	88,514,818
17.	Bali	3,926,674	4,073,884	4,243,739	4,422,981	4,720,389
18.	N T B	99,689	120,059	147,140	172,862	183,486
19.	N T T	315,100	350,025	375,939	523,854	590,767
20.	Kalimantan Barat	1,881,791	2,001,637	2,590,551	2,636,443	2,784,880
21.	Kalimantan Tengah	260,154	323,736	359,317	392,898	429,481
22.	Kalimantan Selatan	49,775	65,844	76,214	88,284	99,154
23.	Kalimantan Timur	830,606	1,199,797	1,376,894	1,438,292	826,949
24.	Sulawesi Utara	6,039,617	6,743,338	7,715,781	8,197,435	9,123,924
25.	Sulawesi Tengah	72,052	82,549	93,348	175,330	203,086
26.	Sulawesi Selatan	598,954	659,277	728,597	807,918	901,239
27.	Sulawesi Tenggara	57,856	69,168	82,524	95,804	106,110
30.	Maluku	92,000	102,316	115,906	130,430	149,805
32.	Papua	66,148	76,532	84,921	95,174	104,574
	Bangka Belitung	64,040	83,940	96,608	124,463	145,699
	B a n t e n	2,119,676	2,259,844	2,324,010	2,451,179	2,751,347
	Gorontalo	20,643	31,640	48,029	69,070	89,889
	Maluku Utara	0	0	0	0	0
	Kepulauan Riau	17,852	20,723	25,024	30,398	37,469
33.	Papua Barat	6,569	9,205	12,753	14,300	17,998
	Sulawesi Barat	29,110	34,870	40,935	114,954	121,086
JUMLAH		216,675,019	230,758,895	245,758,223	261,732,508	278,745,121

*) Tanaman Hias Bunga Potong (dalam dalam satuan tangkai) : Anggrek, Anthurium Bunga, Anyelir, Gerbera, Gladiol, Heliconia, Krisan, Mawar dan Sedap Malam

LAMPIRAN 19 : SASARAN PRODUKSI KARET 2010-2014

No.	PROPINSI	TARGET (RIBU TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	87.34	88.30	89.27	90.25	91.25
2	SUMUT	425.48	430.16	434.89	439.68	444.51
3	SUMBAR	91.46	92.47	93.48	94.51	95.55
4	RIAU	355.31	359.21	363.17	367.16	371.20
5	KEP. RIAU	22.05	22.29	22.53	22.78	23.03
6	JAMBI	300.63	303.94	307.28	310.66	314.08
7	SUMSEL	528.32	534.13	540.00	545.94	551.95
8	BABEL	19.33	19.55	19.76	19.98	20.20
9	BENGKULU	50.79	51.35	51.91	52.49	53.06
10	LAMPUNG	67.35	68.09	68.84	69.60	70.37
11	JABAR	56.82	57.45	58.08	58.72	59.36
12	BANTEN	14.76	14.92	15.08	15.25	15.42
13	JATENG	29.49	29.81	30.14	30.47	30.81
14	DIY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	JATIM	23.73	23.99	24.26	24.52	24.79
16	BALI	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12
17	NTB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	NTT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	KALBAR	262.49	265.89	269.00	271.80	274.31
20	KALTENG	195.56	197.71	199.89	202.09	204.31
21	KALSEL	106.30	107.47	108.65	109.85	111.06
22	KALTIM	27.22	27.52	27.82	28.13	28.44
23	SULUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	GORONTALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	SULTENG	3.36	3.40	3.44	3.47	3.51
26	SULSEL	10.06	10.17	10.28	10.39	10.51
27	SULTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	SULBAR	1.31	1.32	1.33	1.35	1.36
29	MALUKU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	MALUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	PAPUA	1.71	1.73	1.75	1.77	1.78
32	PAPUA BARAT	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
TOTAL		2,681	2,711	2,741	2,771	2,801

LAMPIRAN 20 : SASARAN PRODUKSI KELAPA SAWIT 2010-2014

No.	Provinsi	TARGET (RIBU TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	933	992	1,053	1,117	1,184
2	SUMUT	3,535	3,656	3,782	3,911	4,045
3	SUMBAR	1,176	1,227	1,280	1,334	1,391
4	RIAU	5,098	5,273	5,453	5,640	5,833
5	KEP. RIAU	67	75	83	91	100
6	JAMBI	1,905	1,999	2,098	2,200	2,306
7	SUMSEL	2,311	2,421	2,536	2,656	2,780
8	BABEL	427	447	468	490	513
9	BENGKULU	463	483	503	524	546
10	LAMPUNG	535	558	581	606	631
11	JABAR	37	38	39	41	42
12	BANTEN	48	49	50	52	54
13	JATENG	0	0	0	0	0
14	DIY	0	0	0	0	0
15	JATIM	0	0	0	0	0
16	BALI	0	0	0	0	0
17	NTB	0	0	0	0	0
18	NTT	0	0	0	0	0
19	KALBAR	2,198	2,355	2,519	2,691	2,871
20	KALTENG	1,838	1,964	2,094	2,231	2,375
21	KALSEL	584	621	660	701	743
22	KALTIM	986	1,077	1,173	1,273	1,378
23	SULUT	0	0	0	0	0
24	GORONTALO	0	0	0	0	0
25	SULTENG	171	185	199	214	230
26	SULSEL	85	95	106	117	129
27	SULTRA	39	48	58	70	81
28	SULBAR	275	293	312	330	350
29	MALUKU	0	0	0	0	0
30	MALUT	0	0	0	0	0
31	PAPUA	278	324	374	426	481
32	PAPUA BARAT	210	248	289	331	376
TOTAL		23,200	24,429	25,710	27,046	28,439

LAMPIRAN 21 : SASARAN PRODUKSI KAKAO 2010-2014

No.	Provinsi	TARGET (RIBU TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	24.27	26.38	32.96	37.80	40.48
2	SUMUT	80.37	87.36	109.16	125.18	134.05
3	SUMBAR	57.82	62.86	78.54	90.07	96.45
4	RIAU	4.94	5.37	6.71	7.70	8.24
5	KEP. RIAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	JAMBI	0.55	0.60	0.75	0.86	0.92
7	SUMSEL	1.18	1.28	1.60	1.83	1.96
8	BABEL	0.12	0.13	0.17	0.19	0.21
9	BENGKULU	6.12	6.66	8.32	9.54	10.21
10	LAMPUNG	30.80	33.48	41.83	47.97	51.37
11	JABAR	4.43	4.81	6.01	6.89	7.38
12	BANTEN	2.94	3.19	3.99	4.57	4.90
13	JATENG	3.94	4.28	5.35	6.14	6.57
14	DIY	1.24	1.35	1.68	1.93	2.06
15	JATIM	24.35	26.47	33.07	37.93	40.61
16	BALI	9.90	10.76	13.44	15.42	16.51
17	NTB	2.18	2.37	2.96	3.40	3.64
18	NTT	15.36	16.70	20.86	23.92	25.62
19	KALBAR	2.53	2.75	3.44	3.95	4.23
20	KALTENG	0.38	0.41	0.52	0.59	0.64
21	KALSEL	0.25	0.27	0.34	0.39	0.41
22	KALTIM	30.62	33.29	41.59	47.70	51.07
23	SULUT	3.70	4.02	5.03	5.76	6.17
24	GORONTALO	3.73	4.06	5.07	5.82	6.23
25	SULTENG	188.26	204.64	255.71	293.24	314.01
26	SULSEL	156.24	169.84	212.22	243.38	260.61
27	SULTRA	112.40	122.18	152.67	175.08	187.48
28	SULBAR	174.81	190.03	237.45	272.30	291.59
29	MALUKU	8.74	9.51	11.88	13.62	14.59
30	MALUT	17.68	19.22	24.02	27.54	29.49
31	PAPUA	13.83	15.03	18.78	21.54	23.06
32	PAPUA BARAT	4.34	4.72	5.90	6.76	7.24
TOTAL		988	1,074	1,342	1,539	1,648

LAMPIRAN 22 : SASARAN PRODUKSI JAMBU METE 2010-2014

No.	Provinsi	TARGET (RIBU TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sumatera Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Sumatera Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Riau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Kepulauan Riau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Jambi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Sumatera Selatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Bangka Belitung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Bengkulu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Lampung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Jawa Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Banten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Jawa Tengah	15.97	16.15	16.42	16.69	16.86
14	D.I. Yogyakarta	14.20	14.35	14.60	14.84	14.99
15	Jawa Timur	1.78	1.79	1.83	1.86	1.87
16	Bali	21.65	22.53	23.75	24.63	25.56
17	NTB	30.17	30.50	31.02	31.53	31.85
18	NTT	30.17	30.72	31.28	32.20	32.75
19	Kalimantan Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Kalimantan Tengah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Kalimantan Selatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Kalimantan Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Sulawesi Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Gorontalo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Sulawesi Tengah	21.30	22.03	22.92	23.81	24.58
26	Sulawesi Selatan	5.32	5.45	5.62	5.79	5.92
27	Sulawesi Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Sulawesi Tenggara	4.26	4.31	4.38	4.45	4.50
29	Maluku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Maluku Utara	0.15	0.17	0.19	0.21	0.23
31	Papua Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Papua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		145	148	152	156	159

LAMPIRAN 23: SASARAN PRODUKSI KAPAS 2010-2014

No.	Provinsi	TARGET (RIBU TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD					
2	Sumatera Utara					
3	Sumatera Barat					
4	Riau					
5	Kepulauan Riau					
6	Jambi					
7	Sumatera Selatan					
8	Bangka Belitung					
9	Bengkulu					
10	Lampung					
11	Jawa Barat					
12	Banten					
13	Jawa Tengah	1.40	1.89	2.00	2.43	2.52
14	D.I. Yogyakarta	1.40	1.89	2.00	2.43	2.52
15	Jawa Timur	2.80	3.77	5.00	7.28	7.56
16	Bali	1.75	1.89	3.00	4.85	5.04
17	NTB	1.40	1.89	3.00	4.85	6.30
18	NTT	4.38	6.60	8.00	14.55	17.64
19	Kalimantan Barat					
20	Kalimantan Tengah					
21	Kalimantan Selatan					
22	Kalimantan Timur					
23	Sulawesi Utara					
24	Gorontalo					
25	Sulawesi Tengah					
26	Sulawesi Selatan	13.13	15.09	17.00	20.62	21.42
27	Sulawesi Barat					
28	Sulawesi Tenggara					
29	Maluku					
30	Maluku Utara					
31	Papua Barat					
32	Papua					
TOTAL		26	33	40	57	63

LAMPIRAN 24 : SASARAN PRODUKSI NILAM 2010-2014

No.	Provinsi	TARGET (RIBU TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	9.75	10.30	11.20	12.40	12.40
2	Sumatera Utara	9.75	10.20	11.20	12.50	12.40
3	Sumatera Barat	7.80	8.40	9.20	10.50	11.00
4	Riau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Kepulauan Riau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Jambi	7.15	7.70	8.60	9.50	10.30
7	Sumatera Selatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Bangka Belitung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Bengkulu	6.50	7.00	8.00	9.00	9.70
10	Lampung	3.90	4.40	5.30	6.00	7.00
11	Jawa Barat	6.50	7.00	7.30	7.50	9.00
12	Banten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Jawa Tengah	7.80	8.40	9.30	11.00	11.00
14	D.I. Yogyakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Jawa Timur	13.00	13.60	14.60	14.00	16.00
16	Bali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	NTB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	NTT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Kalimantan Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Kalimantan Tengah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Kalimantan Selatan	16.25	17.00	17.30	19.00	19.20
22	Kalimantan Timur	2.60	3.00	4.00	4.60	6.00
23	Sulawesi Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Gorontalo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Sulawesi Tengah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Sulawesi Selatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Sulawesi Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Sulawesi Tenggara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Maluku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Maluku Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Papua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Papua Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		91	97	106	116	124

LAMPIRAN 25 : SASARAN PRODUKSI TEMBAKAU 2010-2014

No.	Provinsi	TARGET (RIBU TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sumatera Utara	3.62	3.64	3.66	3.66	3.68
3	Sumatera Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Riau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Kepulauan Riau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Jambi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Sumatera Selatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Bangka Belitung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Bengkulu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Lampung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Jawa Barat	7.24	7.28	7.32	7.32	7.36
12	Banten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Jawa Tengah	39.82	40.04	40.26	40.26	40.48
14	D.I. Yogyakarta	3.62	3.64	3.66	3.66	3.68
15	Jawa Timur	94.12	94.64	95.16	95.16	95.68
16	Bali	1.81	1.82	1.83	1.83	1.84
17	NTB	30.77	30.94	31.11	31.11	31.28
18	NTT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Kalimantan Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Kalimantan Tengah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Kalimantan Selatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Kalimantan Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Sulawesi Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Gorontalo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Sulawesi Tengah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Sulawesi Selatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Sulawesi Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Sulawesi Tenggara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Maluku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Maluku Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Papua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Papua Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		181.00	182.00	183.00	183.00	184.00

LAMPIRAN 26 : SASARAN PRODUKSI JARAK PAGAR 2010-2014

No.	Provinsi	TARGET (RIBU TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sumatera Utara	0.13	0.17	0.21	0.25	0.30
3	Sumatera Barat	0.44	0.59	0.70	0.85	1.03
4	Riau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Kepulauan Riau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Jambi	0.44	0.59	0.70	0.85	1.03
7	Sumatera Selatan	0.38	0.51	0.61	0.74	0.89
8	Bangka Belitung	0.08	0.11	0.13	0.16	0.19
9	Bengkulu	0.25	0.33	0.40	0.48	0.58
10	Lampung	1.12	1.49	1.79	2.17	2.61
11	Jawa Barat	0.44	0.59	0.70	0.85	1.03
12	Banten	0.42	0.56	0.67	0.81	0.98
13	Jawa Tengah	0.42	0.56	0.67	0.81	0.98
14	D.I. Yogyakarta	0.43	0.57	0.68	0.82	0.99
15	Jawa Timur	0.42	0.55	0.66	0.80	0.97
16	Bali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	NTB	1.62	2.16	2.59	3.13	3.78
18	NTT	1.72	2.29	2.75	3.33	4.01
19	Kalimantan Barat	0.16	0.21	0.26	0.31	0.37
20	Kalimantan Tengah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Kalimantan Selatan	0.18	0.24	0.29	0.35	0.42
22	Kalimantan Timur	0.18	0.24	0.29	0.35	0.42
23	Sulawesi Utara	1.03	1.37	1.65	1.99	2.40
24	Gorontalo	1.08	1.44	1.73	2.10	2.52
25	Sulawesi Tengah	0.50	0.67	0.80	0.97	1.17
26	Sulawesi Selatan	1.08	1.44	1.73	2.09	2.52
27	Sulawesi Barat	0.28	0.37	0.44	0.53	0.64
28	Sulawesi Tenggara	1.02	1.36	1.63	1.97	2.38
29	Maluku	0.28	0.37	0.44	0.53	0.64
30	Maluku Utara	0.32	0.43	0.51	0.62	0.75
31	Papua	0.44	0.59	0.70	0.85	1.03
32	Papua Barat	0.16	0.21	0.26	0.31	0.37
TOTAL		15.00	20.00	24.00	29.00	35.00

LAMPIRAN 27 : SASARAN PRODUKSI CENGKEH 2010-2014

No.	Provinsi	TARGET (RIBU TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	2.95	3.02	3.13	3.17	3.25
2	Sumatera Utara	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48
3	Sumatera Barat	1.82	1.87	1.94	1.96	2.01
4	Riau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Kepulauan Riau	1.94	1.99	2.06	2.09	2.14
6	Jambi	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
7	Sumatera Selatan	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
8	Bangka Belitung	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
9	Bengkulu	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16
10	Lampung	0.52	0.53	0.55	0.56	0.57
11	Jawa Barat	2.47	2.54	2.63	2.66	2.73
12	Banten	2.90	2.98	3.09	3.13	3.20
13	Jawa Tengah	6.89	7.07	7.33	7.42	7.60
14	D.I. Yogyakarta	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42
15	Jawa Timur	8.79	9.02	9.35	9.47	9.69
16	Bali	4.81	4.94	5.12	5.18	5.31
17	NTB	0.39	0.40	0.41	0.41	0.42
18	NTT	1.08	1.11	1.15	1.16	1.19
19	Kalimantan Barat	0.23	0.23	0.24	0.24	0.25
20	Kalimantan Tengah	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
21	Kalimantan Selatan	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45
22	Kalimantan Timur	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
23	Sulawesi Utara	9.86	10.11	11.49	11.63	10.91
24	Gorontalo	0.61	0.63	0.65	0.66	0.67
25	Sulawesi Tengah	9.34	9.58	9.94	10.06	10.30
26	Sulawesi Selatan	6.36	6.53	6.77	6.85	7.02
27	Sulawesi Barat	0.41	0.42	0.44	0.45	0.46
28	Sulawesi Tenggara	1.72	1.76	1.83	1.85	1.89
29	Maluku	9.28	9.52	9.88	10.00	10.23
30	Maluku Utara	3.52	3.61	3.74	3.79	3.88
31	Papua Barat	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10
32	Papua	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
TOTAL		77.52	79.51	83.49	84.49	85.51

LAMPIRAN 28 : SASARAN PRODUKSI LADA 2010-2014

No.	Provinsi	TARGET (RIBU TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	0.28	0.29	0.30	0.31	0.31
2	SUMUT	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11
3	SUMBAR	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16
4	RIAU	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5	KEP. RIAU	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07
6	JAMBI	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
7	SUMSEL	3.67	3.80	3.89	3.98	4.07
8	BABEL	15.45	16.01	16.39	16.77	17.14
9	BENGKULU	4.05	4.20	4.30	4.40	4.50
10	LAMPUNG	24.33	24.28	24.99	25.74	26.55
11	JABAR	0.76	0.79	0.81	0.83	0.84
12	BANTEN	0.41	0.43	0.44	0.45	0.46
13	JATENG	1.13	1.17	1.20	1.23	1.25
14	DIY	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
15	JATIM	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40
16	BALI	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
17	NTB	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
18	NTT	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10
19	KALBAR	5.25	5.44	5.57	5.70	5.83
20	KALTENG	3.24	3.36	3.44	3.52	3.60
21	KALSEL	0.54	0.56	0.58	0.59	0.60
22	KALTIM	11.44	11.86	12.14	12.42	12.70
23	SULUT	0.28	0.29	0.30	0.31	0.31
24	GORONTALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	SULTENG	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18
26	SULSEL	6.20	6.43	6.58	6.73	6.88
27	SULTRA	4.65	4.82	4.93	5.04	5.16
28	SULBAR	0.22	0.23	0.24	0.24	0.25
29	MALUKU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	MALUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	PAPUA	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
32	PAPUA BARAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		82.93	85.02	87.15	89.34	91.58

LAMPIRAN 29 : SASARAN PRODUKSI KELAPA 2010-2014

No.	Provinsi	TARGET (RIBU TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	66.25	66.74	67.29	67.91	68.56
2	SUMUT	104.02	104.79	105.65	106.63	107.65
3	SUMBAR	81.89	82.49	83.17	83.95	84.75
4	RIAU	572.92	577.13	581.87	587.30	592.92
5	KEP. RIAU	11.39	11.47	11.57	11.68	11.79
6	JAMBI	117.51	118.37	119.34	120.46	121.61
7	SUMSEL	66.66	67.15	67.79	68.42	69.07
8	BABEL	2.62	2.64	2.66	2.68	2.71
9	BENGKULU	8.43	8.49	8.56	8.64	8.72
10	LAMPUNG	121.38	122.27	123.27	124.43	125.62
11	JABAR	142.06	143.11	144.28	145.63	147.02
12	BANTEN	60.13	60.58	61.07	61.64	62.23
13	JATENG	182.10	183.44	184.94	186.67	188.46
14	DIY	46.30	46.64	47.02	47.46	47.91
15	JATIM	248.89	250.72	252.78	255.14	257.58
16	BALI	67.36	67.86	68.41	69.05	69.71
17	NTB	53.39	53.79	54.23	54.73	55.26
18	NTT	65.27	65.75	66.29	66.91	67.55
19	KALBAR	76.84	77.40	78.04	78.77	79.52
20	KALTENG	87.94	88.59	89.32	90.15	91.01
21	KALSEL	34.15	34.40	34.69	35.01	35.34
22	KALTIM	21.33	21.49	21.67	21.87	22.08
23	SULUT	274.33	276.34	278.61	281.22	283.90
24	GORONTALO	60.70	61.15	61.65	62.22	62.82
25	SULTENG	189.86	191.26	192.83	194.63	196.49
26	SULSEL	76.52	77.08	77.71	78.44	79.19
27	SULTRA	40.57	40.87	41.21	41.59	41.99
28	SULBAR	59.41	59.84	60.33	60.90	61.48
29	MALUKU	71.68	72.21	72.80	73.48	74.18
30	MALUT	233.22	234.94	236.86	239.08	241.36
31	PAPUA	12.58	12.67	12.77	12.89	13.01
32	PAPUA BARAT	8.06	8.12	8.19	8.26	8.34
TOTAL		3,266	3,290	3,317	3,348	3,380

LAMPIRAN 30 : SASARAN PRODUKSI TEH 2010-2014

No.	Provinsi	TARGET (RIBU TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SUMUT	12.40	12.62	12.84	13.06	13.43
3	SUMBAR	5.80	5.90	6.01	6.11	6.28
4	RIAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	KEP. RIAU		0.00	0.00	0.00	0.00
6	JAMBI	6.50	6.62	6.73	6.85	7.04
7	SUMSEL	2.64	2.69	2.74	2.79	2.86
8	BABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	BENGKULU	1.79	1.82	1.85	1.88	1.93
10	LAMPUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	JABAR	122.46	124.65	126.84	129.02	132.67
12	BANTEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	JATENG	10.37	10.56	10.75	10.93	11.24
14	DIY	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15
15	JATIM	4.60	4.68	4.76	4.85	4.98
16	BALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	NTB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	NTT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	KALBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	KALTENG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	KALSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	KALTIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	SULUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	GORONTALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	SULTENG	1.50	1.53	1.55	1.57	1.60
26	SULSEL	0.28	0.28	0.29	0.29	0.30
27	SULTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	SULBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	MALUKU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	MALUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	PAPUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	PAPUA BARAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		168	171	174	177	182

LAMPIRAN 31 : SASARAN PRODUKSI KOPI 2010-2014

No.	Provinsi	TARGET (RIBU TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	49.56	50.34	50.98	51.69	52.40
2	Sumatera Utara	51.37	52.18	52.84	53.58	54.31
3	Sumatera Barat	32.83	33.34	33.77	34.24	34.71
4	Riau	4.36	4.43	4.49	4.55	4.61
5	Kepulauan Riau	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
6	Jambi	10.44	10.61	10.74	10.89	11.04
7	Sumatera Selatan	151.87	154.26	156.22	158.40	160.57
8	Bangka Belitung	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
9	Bengkulu	56.72	57.61	58.34	59.15	59.97
10	Lampung	142.80	145.05	146.89	148.93	150.98
11	Jawa Barat	8.02	8.15	8.25	8.36	8.48
12	Banten	2.81	2.86	2.89	2.94	2.98
13	Jawa Tengah	15.57	15.81	16.01	16.24	16.46
14	D.I. Yogyakarta	0.36	0.36	0.37	0.37	0.38
15	Jawa Timur	50.18	50.97	51.61	52.33	53.05
16	Bali	16.14	16.39	16.60	16.83	17.06
17	NTB	4.47	4.54	4.59	4.66	4.72
18	NTT	19.21	19.51	19.76	20.03	20.31
19	Kalimantan Barat	4.25	4.32	4.37	4.43	4.50
20	Kalimantan Tengah	2.97	3.02	3.06	3.10	3.14
21	Kalimantan Selatan	3.01	3.06	3.10	3.14	3.19
22	Kalimantan Timur	4.31	4.38	4.43	4.49	4.56
23	Sulawesi Utara	5.34	5.43	5.50	5.57	5.65
24	Gorontalo	0.82	0.83	0.84	0.86	0.87
25	Sulawesi Tengah	4.80	4.88	4.94	5.01	5.08
26	Sulawesi Selatan	34.47	35.02	35.46	35.95	36.45
27	Sulawesi Barat	12.81	13.01	13.18	13.36	13.55
28	Sulawesi Tenggara	3.51	3.57	3.61	3.66	3.71
29	Maluku	1.58	1.61	1.63	1.65	1.67
30	Maluku Utara	0.41	0.42	0.42	0.43	0.43
31	Papua	2.72	2.76	2.79	2.83	2.87
32	Papua Barat	0.23	0.24	0.24	0.24	0.25
TOTAL		698	709	718	728	738

LAMPIRAN 32 : SASARAN PRODUKSI TEBU 2010-2014

No.	Provinsi	TARGET (RIBU TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sumatera Utara	47.00	54.11	61.21	68.32	75.39
3	Sumatera Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Riau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Kepulauan Riau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Jambi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Sumatera Selatan	72.15	83.06	93.97	104.88	115.74
8	Bangka Belitung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Bengkulu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Lampung	814.19	937.30	1,060.41	1,183.51	1,306.08
11	Jawa Barat	144.90	166.81	188.72	210.63	232.44
12	Banten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Jawa Tengah	331.51	381.64	431.76	481.89	531.79
14	D.I. Yogyakarta	47.50	54.68	61.86	69.05	76.20
15	Jawa Timur	1,436.27	1,653.44	1,870.61	2,087.78	2,303.98
16	Bali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	NTB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	NTT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Kalimantan Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Kalimantan Tengah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Kalimantan Selatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Kalimantan Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Sulawesi Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Gorontalo	17.27	19.88	22.49	25.10	27.70
25	Sulawesi Tengah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Sulawesi Selatan	85.20	98.08	110.96	123.85	136.67
27	Sulawesi Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Sulawesi Tenggara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Maluku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Maluku Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Papua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Papua Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		2,996	3,449	3,902	4,355	4,806

LAMPIRAN 33 : SASARAN PRODUKSI DAGING SAPI 2010-2014

No	Provinsi	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	8,107	9,241	10,559	12,065	13,752
2	Sumut	18,268	21,202	24,676	28,674	33,279
3	Sumbar	16,898	18,106	19,427	20,845	22,335
4	Riau	6,989	8,112	9,441	10,988	12,753
5	Jambi	3,798	4,134	4,506	4,913	5,347
6	Sumsel	10,133	10,829	11,587	12,399	13,250
7	Bengkulu	2,061	2,282	2,532	2,809	3,110
8	Lampung	11,987	13,912	16,192	18,845	21,871
9	DKI Jakarta	8,668	8,808	8,952	9,099	9,245
10	Jabar	70,510	71,176	71,861	72,554	73,239
11	Jateng	46,291	47,035	47,806	48,589	49,369
12	DI Yogyakarta	4,684	4,759	4,837	4,916	4,995
13	Jatim	87,468	90,650	93,873	97,376	101,040
14	Bali	8,566	8,851	9,152	9,462	9,777
15	N T B	7,146	7,673	8,251	8,961	9,622
16	N T T	9,138	10,605	12,343	14,366	16,672
17	Kalbar	7,602	8,823	10,268	11,951	13,870
18	Kalteng	5,503	6,387	7,433	8,651	10,041
19	Kalsel	5,810	5,829	5,847	5,866	5,885
20	Kaltim	7,262	7,417	7,578	7,742	7,907
21	Sulut	4,482	4,696	4,923	5,162	5,408
22	Sulteng	2,717	2,821	2,932	3,047	3,164
23	Sulsel	10,677	12,392	14,422	16,785	19,481
24	Sultra	3,598	3,656	3,716	3,777	3,838
25	Maluku	1,276	1,297	1,318	1,340	1,361
26	Papua	2,235	2,375	2,527	2,689	2,857
27	Babel	1,862	2,161	2,515	2,928	3,398
28	Banten	29,076	33,747	39,277	45,712	53,052
29	Gorontalo	3,249	3,771	4,389	5,108	5,928
30	Malut	1,257	1,473	1,732	2,036	2,386
31	Kepri	804	817	830	844	858
32	Papua Barat	1,790	2,078	2,418	2,815	3,266
33	Sulbar	1,791	2,078	2,419	2,815	3,267
Jumlah		411,702	439,192	470,540	506,127	545,621

LAMPIRAN 34 : SASARAN PRODUKSI SUSU 2010-2014

No	Provinsi	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	32	33	34	35	35
2	Sumut	1,352	1,392	1,428	1,459	1,493
3	Sumbar	1,289	1,670	2,091	2,554	3,145
4	Riau					
5	Jambi					
6	Sumsel	170	175	180	184	188
7	Bengkulu	169	219	275	336	413
8	Lampung	627	1,211	2,169	3,680	6,359
9	DKI Jakarta	7,277	8,640	10,015	11,417	13,088
10	Jabar	231,247	239,804	247,346	254,191	261,543
11	Jateng	109,879	142,409	178,247	217,720	268,104
12	DI Yogyakarta	7,522	8,160	8,749	9,304	9,921
13	Jatim	364,263	445,257	529,628	617,218	723,808
14	Bali	0	0	0	1	1
15	NTB					
16	NTT					
17	Kalbar	0	0	0	0	0
18	Kalteng					
19	Kalsel	214	257	302	348	403
20	Kaltim					
21	Sulut					
22	Sulteng					
23	Sulsel	3,497	4,533	5,673	6,930	8,533
24	Sultra					
25	Maluku					
26	Papua					
27	Babel					
28	Banten					
29	Gorontalo					
30	Malut					
31	Kepri					
32	Papua Barat					
33	Sulbar					
Jumlah/ Total		727,539	853,761	986,135	1,125,375	1,297,035

LAMPIRAN 35 : SASARAN PRODUKSI DAGING KERBAU 2010-2014

No	Provinsi	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075
2	Sumut	10,475	10,476	10,484	10,485	10,507
3	Sumbar	2,457	2,458	2,458	2,471	2,471
4	Riau	1,952	1,952	1,953	1,953	1,940
5	Jambi	2,429	2,430	2,430	2,430	2,430
6	Sumsel	1,439	1,439	1,440	1,441	1,441
7	Bengkulu	585	586	587	588	589
8	Lampung	627	627	628	628	628
9	DKI Jakarta	44	45	45	45	46
10	Jabar	3,718	3,719	3,719	3,719	3,720
11	Jateng	2,783	2,784	2,784	2,784	2,784
12	DI Yogyakarta	9	9	9	9	9
13	Jatim	423	423	423	423	423
14	Bali	25	25	25	25	25
15	N T B	2,005	2,000	2,001	2,001	2,001
16	N T T	1,722	1,722	1,723	1,723	1,723
17	Kalbar	10	10	10	10	10
18	Kalteng	601	619	638	657	677
19	Kalsel	1,310	1,311	1,312	1,312	1,313
20	Kaltim	237	239	241	243	246
21	Sulut	0	0	0	0	0
22	Sulteng	35	35	35	36	36
23	Sulsel	3,095	3,097	3,098	3,100	3,101
24	Sultra	63	63	64	64	65
25	Maluku	278	280	281	282	284
26	Papua	83	84	84	85	85
27	Babel	8	8	8	8	8
28	Banten	3,185	3,186	3,187	3,188	3,189
29	Gorontalo	0	0	0	0	0
30	Malut	0	0	0	0	0
31	Kepri	0	0	0	0	0
32	Papua Barat	0	0	0	0	0
33	Sulbar	156	213	291	397	541
Total		41,830	41,913	42,030	42,182	42,368

LAMPIRAN 36 : SASARAN PRODUKSI DAGING KAMBING 2010-2014

No	Provinsi	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	1,789	1,986	2,208	2,449	2,596
2	Sumut	3,307	3,416	3,531	3,646	3,865
3	Sumbar	1,445	1,461	1,477	1,493	1,510
4	Riau	1,693	1,880	2,091	2,318	2,457
5	Jambi	605	671	747	828	918
6	Sumsel	1,664	1,682	1,701	1,720	1,738
7	Bengkulu	186	188	191	193	195
8	Lampung	7,175	7,964	8,857	9,821	10,890
9	DKI Jakarta	988	999	1,010	1,021	1,032
10	Jabar	7,220	7,300	7,382	7,462	7,543
11	Jateng	9,430	9,533	9,640	9,775	9,916
12	DI Yogyakarta	941	951	962	972	983
13	Jatim	15,239	15,455	15,675	15,810	16,053
14	Bali	1,358	1,459	1,569	1,683	1,806
15	N T B	273	282	292	301	311
16	N T T	2,925	3,021	3,123	3,225	3,418
17	Kalbar	498	515	532	550	568
18	Kalteng	609	629	650	672	694
19	Kalsel	417	431	446	460	475
20	Kaltim	565	572	579	586	594
21	Sulut	380	392	405	419	432
22	Sulteng	952	1,048	1,156	1,272	1,399
23	Sulsel	761	845	940	1,042	1,155
24	Sultra	541	547	553	559	565
25	Maluku	820	829	839	848	857
26	Papua	135	150	167	185	206
27	Babel	43	48	53	59	65
28	Banten	5,078	5,637	6,269	6,952	7,708
29	Gorontalo	1,102	1,223	1,360	1,509	1,673
30	Malut	1,246	1,383	1,538	1,706	1,892
31	Kepri	179	198	220	244	271
32	Papua Barat	64	71	79	88	98
33	Sulbar	1,198	1,330	1,479	1,640	1,819
Jumlah		70,827	74,096	77,722	81,507	85,700

LAMPIRAN 37 : SASARAN PRODKSI DAGING DOMBA 2010-2014

No	Provinsi	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	184	202	218	234	252
2	Sumut	1,724	1,785	1,849	1,914	2,048
3	Sumbar	59	66	73	80	88
4	Riau	22	32	44	49	54
5	Jambi	158	164	169	174	180
6	Sumsel	2,273	2,500	2,693	2,900	3,074
7	Bengkulu	16	17	17	18	19
8	Lampung	327	342	354	366	379
9	DKI Jakarta	613	640	662	685	705
10	Jabar	26,523	27,053	27,887	28,525	30,379
11	Jateng	6,497	6,538	6,569	6,701	6,902
12	DI Yogyakarta	1,663	1,682	1,701	1,720	1,740
13	Jatim	12,960	13,418	13,869	14,285	15,264
14	Bali					
15	N T B	65	72	79	86	94
16	N T T	544	571	592	614	638
17	Kalbar					
18	Kalteng	3,776	4,153	4,473	4,696	4,931
19	Kalsel	46	50	53	56	60
20	Kaltim	13	14	14	15	15
21	Sulut					
22	Sulteng	13	12	12	12	12
23	Sulsel	2	2	3	3	4
24	Sultra					
25	Maluku	732	1,385	2,337	3,941	4,213
26	Papua					
27	Babel	2	2	2	2	2
28	Banten	3,463	3,614	3,736	3,848	3,944
29	Gorontalo					
30	Malut					
31	Kepri					
32	Papua Barat					
33	Sulbar					
Jumlah		61,675	64,315	67,405	70,925	74,994

LAMPIRAN 38 : SASARAN PRODUKSI DAGING BABI 2010-2014

No	Provinsi	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD					
2	Sumut	30,766	31,074	31,385	31,699	32,016
3	Sumbar	485	487	488	490	492
4	Riau	1,409	1,641	1,912	2,227	2,595
5	Jambi	68	68	68	68	68
6	Sumsel	1,230	1,234	1,238	1,242	1,246
7	Bengkulu	101	115	130	147	167
8	Lampung	3,159	3,376	3,609	3,857	4,122
9	DKI Jakarta	12,598	12,640	12,682	12,724	12,766
10	Jabar	1,847	1,853	1,859	1,866	1,872
11	Jateng	2,154	2,161	2,168	2,175	2,182
12	DI Yogyakarta	79	80	80	80	80
13	Jatim	824	827	830	832	835
14	Bali	88,008	88,186	88,317	88,368	88,559
15	N T B	416	420	424	428	433
16	N T T	29,399	29,693	29,990	30,290	30,442
17	Kalbar	6,522	6,522	6,522	6,522	6,522
18	Kalteng	3,455	3,512	3,571	3,630	3,691
19	Kalsel	342	393	452	519	597
20	Kaltim	2,058	2,081	2,104	2,128	2,152
21	Sulut	15,567	15,567	15,567	15,567	15,567
22	Sulteng	4,145	4,359	4,584	4,820	5,068
23	Sulsel	2,552	2,577	2,603	2,629	2,655
24	Sultra	925	928	931	934	937
25	Maluku	2,847	2,857	2,866	2,876	2,886
26	Papua	8,600	8,866	9,140	9,423	9,611
27	Babel	790	790	791	791	792
28	Banten	980	1,141	1,328	1,545	1,798
29	Gorontalo	67	67	67	67	67
30	Malut	31	31	32	32	32
31	Kepri	6,825	7,730	8,755	9,916	11,231
32	Papua Barat	2,656	3,055	3,513	4,040	4,646
33	Sulbar	754	863	987	1,130	1,293
Total		231,658	235,193	238,992	243,064	247,420

LAMPIRAN 39 : SASARAN PRODUKSI DAGING AYAM BURAS 2010-2014

No	Provinsi	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	3,419	3,431	3,441	3,446	3,452
2	Sumut	20,062	20,776	21,402	21,689	22,064
3	Sumbar	5,424	5,617	5,787	5,864	5,966
4	Riau	2,681	2,777	2,861	2,899	2,949
5	Jambi	3,277	3,280	3,282	3,283	3,285
6	Sumsel	7,444	7,709	7,942	8,048	8,187
7	Bengkulu	1,697	1,758	1,811	1,835	1,867
8	Lampung	19,886	20,594	21,215	21,499	21,871
9	DKI Jakarta	6,126	6,562	6,958	7,145	7,392
10	Jabar	28,621	29,727	30,624	31,134	31,789
11	Jateng	35,885	36,013	36,316	36,365	36,428
12	DI Yogyakarta	7,527	7,795	8,030	8,138	8,278
13	Jatim	75,845	78,573	81,173	82,353	83,777
14	Bali	299	300	301	301	302
15	N T B	8,207	8,499	8,755	8,872	9,026
16	N T T	8,914	8,946	8,973	8,985	9,000
17	Kalbar	6,592	6,827	7,033	7,127	7,250
18	Kalteng	6,561	6,794	6,999	7,093	7,216
19	Kalsel	6,346	6,664	6,947	7,078	7,250
20	Kaltim	2,251	2,259	2,266	2,269	2,273
21	Sulut	2,195	2,202	2,209	2,212	2,216
22	Sulteng	5,007	5,274	5,512	5,623	5,769
23	Sulsel	12,117	12,548	12,927	13,100	13,327
24	Sultra	11,410	11,817	12,173	12,336	12,549
25	Maluku	341	341	342	342	342
26	Papua	995	995	996	996	996
27	Babel	8,875	9,349	9,772	10,068	10,330
28	Banten	9,690	10,034	10,337	10,476	10,657
29	Gorontalo	1,723	1,784	1,838	1,863	1,895
30	Malut	8,448	16,260	29,001	39,102	56,671
31	Kepri	676	695	712	719	729
32	Papua Barat	1,523	1,577	1,625	1,647	1,675
33	Sulbar	3,870	3,928	3,978	4,000	4,029
Total		323,933	341,705	363,536	377,907	400,806

LAMPIRAN 40 : SASARAN PRODUKSI DAGING ITIK 2010-2014

No	Provinsi	TARGET (TON)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	NAD	819	823	826	830	835
2	Sumut	3,035	3,159	3,289	3,451	3,671
3	Sumbar	579	598	618	642	674
4	Riau	135	141	146	153	163
5	Jambi	168	168	169	170	171
6	Sumsel	686	714	744	780	830
7	Bengkulu	44	44	44	44	45
8	Lampung	42	42	42	43	43
9	DKI Jakarta	3,459	3,443	3,487	3,516	3,539
10	Jabar	4,478	4,632	4,852	5,104	5,401
11	Jateng	2,848	2,899	2,966	3,049	3,159
12	DI Yogyakarta	2,317	2,411	2,515	2,639	2,808
13	Jatim	1,408	1,422	1,436	1,453	1,476
14	Bali	170	171	171	171	172
15	N T B	301	314	327	343	365
16	N T T	91	94	97	100	105
17	Kalbar	72	75	78	82	87
18	Kalteng	393	409	426	447	475
19	Kalsel	1,410	1,468	1,528	1,604	1,706
20	Kaltim	115	115	116	116	117
21	Sulut	50	52	54	56	60
22	Sulteng	120	124	128	133	140
23	Sulsel	1,227	1,256	1,286	1,323	1,372
24	Sultra	195	225	261	310	385
25	Maluku	125	130	136	142	151
26	Papua	70	70	70	71	71
27	Babel	22	23	24	25	26
28	Banten	3,372	3,510	3,654	3,833	4,079
29	Gorontalo	44	45	47	50	53
30	Malut	21	22	23	24	26
31	Kepri	16	16	16	16	16
32	Papua Barat	9	9	9	10	11
33	Sulbar	715	732	750	771	801
Total		28,554	29,356	30,333	31,500	33,032

LAMPIRAN 41. PROYEKSI KEBUTUHAN PUPUK SEKTOR PERTANIAN 2010 - 2014

JENIS PUPUK	TARGET (JUTA TON)				
	2010	2011	2012	2013	2014
<u>TANAMAN PANGAN:</u>					
UREA	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5
SP-36	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1
KCL	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
NPK	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6
ZA	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
ORGANIK	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2
<u>PERKEBUNAN:</u>					
UREA	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1
SP-36	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4
KCL	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7
NPK	5.8	6.3	6.8	7.3	7.8
ZA	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
ORGANIK	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6
<u>HORTIKULTURA:</u>					
UREA	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
SP-36	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
NPK	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0
ZA	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
ORGANIK	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
<u>PETERNAKAN:</u>					
UREA	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7
<u>PERIKANAN:</u>					
UREA	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
ORGANIK	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2

**LAMPIRAN 42 : TARGET PERLUASAN AREAL PERTANIAN 2 JUTA HA TAHUN 2010-2014
UNTUK LAHAN SAWAH 250.000 HA**

No	Propinsi	TARGET (HA)					
		2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	Papua	500	8,795	5,000	5,000	5,000	24,295
2	Papua Barat	115	4,400	2,500	2,500	2,500	12,015
3	Maluku	300	4,400	2,000	2,000	2,000	10,700
4	Maluku Utara	0	4,400	2,000	2,000	2,000	10,400
5	Kalimantan Timur	850	4,400	2,000	2,000	2,000	11,250
6	Kalimantan Selatan	900	4,400	2,000	2,000	2,000	11,300
7	Kalimantan Barat	700	3,770	2,000	2,000	2,000	10,470
8	Kalimantan Tengah	620	4,200	2,200	2,200	2,200	11,420
9	Sulawesi Selatan	590	4,000	2,500	2,500	2,500	12,090
10	Sulawesi Barat	400	4,000	2,500	2,500	2,500	11,900
11	Sulawesi Tengah	1,000	4,000	2,500	2,500	2,500	12,500
12	Sulawesi Tenggara	800	4,000	2,500	2,500	2,500	12,300
13	Sulawesi Utara		1,500	1,000	1,000	1,000	4,500
14	Gorontalo	100	1,000	500	500	500	2,600
15	NAD	800	4,400	2,500	2,500	2,500	12,700
16	Sumatera Utara	550	1,500	1,000	1,000	1,000	5,050
17	Sumatera Barat	700	2,630	1,500	1,500	1,500	7,830
18	Riau	950	4,000	2,500	2,500	2,500	12,450
19	Jambi	200	3,000	2,000	2,000	2,000	9,200
20	Sumatera Selatan	600	3,520	2,000	2,000	2,000	10,120
21	Lampung	400	3,000	2,000	2,000	2,000	9,400
22	Bengkulu	100	3,000	2,000	2,000	2,000	9,100
23	Bangka Belitung	300	200	200	200	200	1,100
24	Kepulauan Riau		200	100	100	100	500
25	DKI						
26	Banten		0	0	0	0	0
27	Jawa Barat	50	0	0	0	0	50
28	Jawa Tengah		0	0	0	0	0
29	DI Yogyakarta		0	0	0	0	0
30	Jawa Timur		0	0	0	0	0
31	Bali		0	0	0	0	0
32	NTB	200	2,630	1,500	1,500	1,500	7,330
33	NTT	300	2,630	1,500	1,500	1,500	7,430
JUMLAH		12,025	87,975	50,000	50,000	50,000	250,000

**LAMPIRAN 43 : TARGET PERLUASAN AREAL PERTANIAN 2 JUTA HA TAHUN 2010-2014
UNTUK LAHAN KERING 400.000 HA**

No	Propinsi	TARGET (HA)					
		2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	Papua	0	9,000	10,000	10,000	10,000	39,000
2	Papua Barat	150	4,530	5,000	5,000	5,000	19,680
3	Maluku	0	4,000	4,500	4,500	4,500	17,500
4	Maluku Utara	0	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000
5	Kalimantan Timur	0	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000
6	Kalimantan Selatan	0	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000
7	Kalimantan Barat	50	4,000	4,000	4,000	4,000	16,050
8	Kalimantan Tengah	0	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000
9	Sulawesi Selatan	0	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000
10	Sulawesi Barat	0	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000
11	Sulawesi Tengah	0	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000
12	Sulawesi Tenggara	0	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000
13	Sulawesi Utara	0	4,000	3,500	3,500	3,500	14,500
14	Gorontalo	200	3,000	3,000	3,000	3,000	12,200
15	NAD	0	4,000	4,500	4,500	4,500	17,500
16	Sumatera Utara	0	4,000	3,500	3,500	3,500	14,500
17	Sumatera Barat	0	3,500	3,000	3,000	3,000	12,500
18	Riau	0	4,500	5,000	5,000	5,000	19,500
19	Jambi	0	4,000	3,500	3,500	3,500	14,500
20	Sumatera Selatan	0	3,500	3,500	3,500	3,500	14,000
21	Lampung	0	3,500	3,500	3,500	3,500	14,000
22	Bengkulu	0	3,500	3,500	3,500	3,500	14,000
23	Bangka Belitung	0	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
24	Kepulauan Riau	0	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
25	Banten	40	0	0	0	0	40
26	Jawa Barat	50	0	0	0	0	50
27	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0
28	DI Yogyakarta	60	0	0	0	0	60
29	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0
30	Bali	0	0	0	0	0	0
31	NTB	200	2,960	3,000	3,000	3,000	12,160
32	NTT	300	2,960	3,000	3,000	3,000	12,260
JUMLAH		1,050	98,950	100,000	100,000	100,000	400,000

LAMPIRAN 44 : TARGET PERLUASAN AREAL PERTANIAN 2 JUTA HA TAHUN 2010-2014
UNTUK LAHAN HORTIKULTURA 400.000 HA

No	Propinsi	TARGET (HA)					
		2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	Papua	130	8,000	8,000	8,000	8,000	32,130
2	Papua Barat	130	4,500	4,500	4,500	4,500	18,130
3	Maluku	80	4,000	4,000	4,000	4,000	16,080
4	Maluku Utara	0	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000
5	Kalimantan Timur	130	4,500	4,500	4,500	4,500	18,130
6	Kalimantan Selatan	100	4,500	4,500	4,500	4,500	18,100
7	Kalimantan Barat	350	4,500	4,500	4,500	4,500	18,350
8	Kalimantan Tengah	75	4,500	4,500	4,500	4,500	18,075
9	Sulawesi Selatan	140	4,000	4,000	4,000	4,000	16,140
10	Sulawesi Barat	50	4,000	4,000	4,000	4,000	16,050
11	Sulawesi Tengah	140	4,000	4,000	4,000	4,000	16,140
12	Sulawesi Tenggara	150	4,000	4,000	4,000	4,000	16,150
13	Sulawesi Utara	100	3,000	4,000	4,000	4,000	15,100
14	Gorontalo	150	1,700	2,000	2,000	2,000	7,850
15	NAD	100	3,500	3,500	3,500	3,500	14,100
16	Sumatera Utara	160	3,000	3,500	3,500	3,500	13,660
17	Sumatera Barat	50	2,500	2,500	2,500	2,500	10,050
18	Riau	130	5,000	5,000	5,000	5,000	20,130
19	Jambi	180	3,000	3,500	3,500	3,500	13,680
20	Sumatera Selatan	100	3,000	3,400	3,400	3,400	13,300
21	Lampung	60	3,000	3,400	3,400	3,400	13,260
22	Bengkulu	110	3,000	3,400	3,400	3,400	13,310
23	Bangka Belitung	60	1,000	1,000	1,000	1,000	4,060
24	Kepulauan Riau	105	1,000	1,000	1,000	1,000	4,105
25	DKI						
26	Banten	25	300	300	300	300	1,225
27	Jawa Barat	110	800	800	800	800	3,310
28	Jawa Tengah	130	800	800	800	800	3,330
29	DI Yogyakarta	0	275	300	300	300	1,175
30	Jawa Timur	300	1,000	1,000	1,000	1,000	4,300
31	Bali	30	300	300	300	300	1,230
32	NTB	50	2,900	2,900	2,900	2,900	11,650
33	NTT	100	2,900	2,900	2,900	2,900	11,700
JUMLAH		3,525	96,475	100,000	100,000	100,000	400,000

LAMPIRAN 45 : TARGET PERLUASAN AREAL 2 JUTA HA TAHUN 2010-2014
UNTUK LAHAN PERKEBUNAN 585.430 HA

No	Propinsi	TARGET (HA)					
		2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	Papua	50	11,100	11,100	11,100	11,100	44,450
2	Papua Barat	0	7,450	7,450	7,450	7,460	29,810
3	Maluku	0	6,500	6,500	6,500	6,500	26,000
4	Maluku Utara	150	6,500	6,500	6,500	6,500	26,150
5	Kalimantan Timur	0	6,500	6,500	6,500	6,500	26,000
6	Kalimantan Selatan	550	6,500	6,500	6,500	6,500	26,550
7	Kalimantan Barat	200	6,500	6,500	6,500	6,500	26,200
8	Kalimantan Tengah	850	6,500	6,500	6,500	6,500	26,850
9	Sulawesi Selatan	575	6,500	6,500	6,500	6,500	26,575
10	Sulawesi Barat	475	6,500	6,500	6,500	6,500	26,475
11	Sulawesi Tengah	550	6,500	6,500	6,500	6,500	26,550
12	Sulawesi Tenggara	450	6,500	6,500	6,500	6,500	26,450
13	Sulawesi Utara	475	3,000	3,000	3,000	3,000	12,475
14	Gorontalo	275	3,000	3,000	3,000	3,000	12,275
15	NAD	600	7,405	7,500	7,500	7,500	30,505
16	Sumatera Utara	475	4,000	4,000	4,000	4,000	16,475
17	Sumatera Barat	575	4,000	4,000	4,000	4,000	16,575
18	Riau	525	7,000	7,000	7,000	7,000	28,525
19	Jambi	500	5,000	5,000	5,000	5,000	20,500
20	Sumatera Selatan	475	5,000	5,000	5,000	5,000	20,475
21	Lampung	200	5,000	5,000	5,000	5,000	20,200
22	Bengkulu	550	5,000	5,000	5,000	5,000	20,550
23	Bangka Belitung	150	1,000	1,000	1,000	1,000	4,150
24	Kepulauan Riau	0	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
25	DKI						
26	Banten	0	300	300	300	300	1,200
27	Jawa Barat	50	1,000	1,000	1,000	1,000	4,050
28	Jawa Tengah	0	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
29	DI Yogyakarta	0	300	300	300	300	1,200
30	Jawa Timur	75	1,000	1,000	1,000	1,000	4,075
31	Bali	0	200	200	200	200	800
32	NTB	475	3,000	3,000	3,000	3,000	12,475
33	NTT	950	3,000	3,000	3,000	3,000	12,950
JUMLAH		10,200	143,755	143,850	143,850	143,860	585,515

**LAMPIRAN 46 : TARGET PERLUASAN AREAL PERTANIAN 2 JUTA HA TAHUN 2010-2014
UNTUK LAHAN KEBUN HIJAUAN MAKANAN TERNAK (HMT) 351.000 HA**

No	Propinsi	TARGET (HA)					
		2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	Papua	300	9,000	8,000	8,000	8,000	33,300
2	Papua Barat	340	4,000	3,500	3,500	3,500	14,840
3	Maluku	75	3,500	3,500	3,500	3,500	14,075
4	Maluku Utara	75	3,500	3,500	3,500	3,500	14,075
5	Kalimantan Timur	260	4,000	3,500	3,500	3,500	14,760
6	Kalimantan Selatan	430	3,900	3,500	3,500	3,500	14,830
7	Kalimantan Barat	150	3,500	3,500	3,500	3,500	14,150
8	Kalimantan Tengah	130	4,000	3,500	3,500	3,500	14,630
9	Sulawesi Selatan	250	3,500	3,500	3,500	3,500	14,250
10	Sulawesi Barat	120	3,500	3,500	3,500	3,500	14,120
11	Sulawesi Tengah	160	3,500	3,500	3,500	3,500	14,160
12	Sulawesi Tenggara	170	3,500	3,500	3,500	3,500	14,170
13	Sulawesi Utara	0	3,000	2,500	2,500	2,500	10,500
14	Gorontalo	220	2,500	2,000	2,000	2,000	8,720
15	NAD	285	4,000	3,695	3,400	3,400	14,780
16	Sumatera Utara	155	3,000	3,000	3,000	3,000	12,155
17	Sumatera Barat	180	2,500	2,500	2,500	2,500	10,180
18	Riau	160	4,000	3,500	3,500	3,500	14,660
19	Jambi	180	3,000	3,000	3,000	3,000	12,180
20	Sumatera Selatan	340	3,000	3,000	3,000	3,000	12,340
21	Lampung	170	3,000	3,000	3,000	3,000	12,170
22	Bengkulu	180	3,000	3,000	3,000	3,000	12,180
23	Bangka Belitung	0	400	400	400	400	1,600
24	Kepulauan Riau	50	400	400	400	400	1,650
25	DKI						
26	Banten	0	400	400	400	400	1,600
27	Jawa Barat	150	1,000	1,000	1,000	1,000	4,150
28	Jawa Tengah	170	1,000	1,000	1,000	1,000	4,170
29	DI Yogyakarta	0	500	500	500	500	2,000
30	Jawa Timur	150	1,000	1,000	1,000	1,000	4,150
31	Bali	250	200	200	200	200	1,050
32	NTB	255	2,000	2,000	2,000	2,000	8,255
33	NTT	350	2,700	2,700	2,700	2,700	11,150
JUMLAH		5,705	90,000	85,295	85,000	85,000	351,000

**LAMPIRAN 47 : TARGET PERLUASAN AREAL PERTANIAN 2 JUTA HA TAHUN 2010-2014
UNTUK LAHAN PADANG PENGEMBALAN 13.570 HA**

No	Propinsi	TARGET (HA)					
		2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
1	Papua	50	25	375	375	25	850
2	Papua Barat	40	100	200	200	100	640
3	Maluku	0	100	175	175	100	550
4	Maluku Utara	0	100	175	175	100	550
5	Kalimantan Timur	80	100	175	175	100	630
6	Kalimantan Selatan	0	100	175	175	100	550
7	Kalimantan Barat	0	100	175	175	100	550
8	Kalimantan Tengah	40	100	175	175	100	590
9	Sulawesi Selatan	80	100	175	175	100	630
10	Sulawesi Barat	0	100	200	200	100	600
11	Sulawesi Tengah	120	100	200	200	100	720
12	Sulawesi Tenggara	120	100	200	200	100	720
13	Sulawesi Utara	0	100	100	100	75	375
14	Gorontalo	0	100	100	100	75	375
15	NAD	80	100	150	150	125	605
16	Sumatera Utara	0	100	100	100	100	400
17	Sumatera Barat	40	75	100	100	75	390
18	Riau	0	125	200	200	150	675
19	Jambi	0	100	100	100	100	400
20	Sumatera Selatan	0	100	100	100	100	400
21	Lampung	0	100	100	100	100	400
22	Bengkulu	0	100	100	100	100	400
23	Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
24	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0
25	DKI						
26	Banten	0	0	0	0	0	0
27	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0
28	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0
29	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0
30	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0
31	Bali	0	0	0	0	0	0
32	NTB	160	75	100	100	75	510
33	NTT	260	75	100	100	75	610
JUMLAH		1070	2275	3750	3750	2275	13120

Lampiran 48. Rancangan Pengembangan Industri Hilir Pertanian

Komoditas	Rencana Aksi dan Sasaran	Lokasi
Beras (penurunan kehilangan hasil 0,2%/thn)	- Pengembangan alsintan dan sertifikasi beras organik dan beras aromatik (100 ribu ton/thn) - Mempertahankan beras dalam SP - Peningkatan Promosi, misi dagang, kerjasama dengan kedutaan/ATPC - Pengembangan alsintan panen, revitalisasi RMU dan sistem pergudangan (termasuk sistem tunda jual) - Pengembangan sistem informasi pasar - Kebijakan stabilisasi harga	<i>Beras organik:</i> OKU Timur, Lampung Tengah, Karawang, Subang, Jombang, Tasikmalaya, Pinrang, Sidrap, Bone, Sragen, Cianjur, Temanggung, Sidoarjo <i>Beras konsumsi dalam negeri:</i> NAD, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, NTB, Sulsel, Kalsel, Bali, Banten
Tepung lokal (20% substitusi impor)	- Pengolahan tepung cassava, sagu, ganyong - Penyusunan Kebijakan bea masuk impor terigu - Kebijakan investasi tepung (pembebasan PPH utk investor, fasilitasi sertifikasi halal dan HACCP) - Pengembangan sistem informasi pasar - Pengembangan SDM (pelaku usaha tepung) melalui SL-PHP - Penerapan SNI wajib untuk tepung	Indragiri Hilir, Seram Bagian Barat, Waropen, Riau, Trenggalek, Gunungkidul, Lampung, Garut, Pacitan, Malang, Tulungagung
Jagung (Penurunan kehilangan hasil 2,5%/thn)	Penerapan SNI wajib jagung	
	Revitalisasi silo jagung (14 unit)	Musi Banyuasin, Lombok Tengah, Tanah Laut, Bulukumba, Takalar, Maros, Soppeng, Sinjai, Bone, Pinrang, Jeneponto, Tojo Una-una, Pahuwato, Bolmong
	Pembangunan silo jagung (30 unit/thn)	Prop prioritas: Sumut, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Sulsel, Sulut, Gorontalo
	Pengembangan industri pakan ternak skala kecil (60 unit/thn)	Prop prioritas: Sumut, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Sulsel, Sulut, Gorontalo

	• Pengembangan pengolahan pangan (kering dan basah), tepung jagung, beras jagung, pati jagung, minyak jagung, dextrin dan asam organik dari jagung skala kecil menengah	Prop prioritas: Sumut, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Sulsel, Sulut, Gorontalo
	• Kebijakan kelembagaan penyangga harga, kebijakan bea masuk, SPS	
	• Pengembangan kemitraan	
	• Pengembangan sistem informasi pasar	
	• Pengembangan SDM melalui SL-PPHP	
Kedele	• Sosialisasi dan penerapan SNI kedele • Mesin perontok multi guna • Pengembangan pengolahan makanan fermentasi dan nonfermentasi(tahu, tempe), minyak kedele, tepung konsentrat, pakan skala kecil dan menengah. • Pengembangan sistem informasi pasar • Kebijakan bea masuk, SPS • Peningkatan SDM melalui SL-PPHP	NAD, Lampung, Sumbar, Jabar, Jateng, Jatim, NTB.
Buah tropika (penurunan kehilangan hasil 2-5%/thn, Pertumbuhan ekspor 15%/thn)	• Penataan rantai pasokan • Peningkatan indeks panen, metode dan waktu panen • Penangan sortasi, grading, packing, dan penyimpanan. • Pengembangan sistem rantai pendingin (Cool Chain Management) • Pengembangan sarana dan peningkatan efisiensi transportasi • Pengembangan teknologi pascapanen untuk peningkatan daya saing produk segar (minimalisasi proses) • Pengembangan unit pengolahan hasil (nata, puree, sari buah, selai, jelli, pati/tepung, dodol, squash) skala kecil dan menengah • Penerapan GAP, registrasi/sertifikasi kebun dan packing house, GHP, GMP. • Pengembangan sistem informasi pasar • Penerapan kebijakan SPS, tarif bea masuk • Peningkatan SDM melalui SL-PPHP	Jateng, Jatim, DIY, Banten, Kalbar, Sulsel, Lampung, Kaltim,

Biofarmaka (peningkatan ekspor 20%/thn)	• Penataan rantai pasokan • Sosialisasi dan penerapan SNI • Penerapan GAP, GHP, GMP. • Pengolahan biofarmaka kering, granule, tepung, minuman, jus, nata, jelli, dan bahan baku obat. • Pengembangan kemitraan • Pengembangan sistem informasi pasar • Kebijakan pembiayaan • Peningkatan SDM melalui SL-PHP	Jabar, Jateng, Jatim, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Maluku
Sawit (25% peningkatan ekspor CPO dan produk olahannya)	• Pengembangan produk turunan CPO, biodiesel, arang tempurung, minyak goreng, pakan ternak skala kecil dan menengah. • Kebijakan tarif bea keluar • Penerapan GMP, HACCP • Advokasi pembangunan pelabuhan CPO dan sarana transportasi • Pengembangan kemitraan • Kebijakan advokasi <i>negative campaign</i> • Penerapan RSPO • Peningkatan SDM melalui SL-PHP	Sumut, Riau, Sumsel, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Papua
Kakao (100% kakao fermentasi, 50% dlm bentuk olahan)	• Penerapan SNI wajib fermentasi • Kebijakan untuk insentif industri pengolahan dalam negeri • Kebijakan bea keluar • Pengembangan pengolahan bubuk, lemak, pasta. • Pengembangan sistem informasi pasar • Pengembangan sistem tunda jual • Pengembangan promosi • Pengembangan kemitraan • Kebijakan registrasi untuk importir • Peningkatan SDM melalui SL-PHP	Sulsel, Sulbar, Sultra, Sulteng, Sumbar, Gorontalo, Bali, NTT, Papua, Kalbar, Jatim
Karet (70% penerapan SNI, 10% peningkatan ekspor)	• Penerapan SNI wajib • Gerakan nasional bahan olah karet (bokar) bersih • Pengolahan lateks pekat, remah/crumb rubber, slab, lump dan sheet berkelanjutan	Sumsel, Bengkulu, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Papua

	• Kebijakan pembiayaan • Kebijakan Insentif industri dalam negeri • Pengembangan kemitraan • Pengembangan sistem tunda jual • Pengembangan promosi • Pengembangan sistem informasi pasar • Pengembangan SDM melalui SL-PPHP	
Kopi (100% sertifikasi kopi <i>specialty</i> dan organik, 15% peningkatan ekspor)	• Penerapan SNI wajib • Sertifikasi GI • Pengembangan kopi <i>specialty</i>, dan organik • Pengolahan kopi (bubuk kopi) • Kebijakan pembiayaan • Kebijakan Insentif industri dalam negeri • Pengembangan kemitraan • Pengembangan sistem tunda jual • Pengembangan promosi • Pengembangan sistem informasi pasar • Pengembangan SDM melalui SL-PPHP	NAD, Sumut, Lampung, Jatim, Jabar, Jateng, Bali, Sulsel.
Tebu (mendukung swasembada gula industri)	• Penerapan SNI wajib • Pengembangan olahan (gula pasir, tetes, pakan ternak) • Revitalisasi pabrik gula • Kebijakan pembiayaan • Kebijakan Insentif industri dalam negeri • Pengembangan kemitraan • Pengembangan sistem tunda jual • Pengembangan promosi • Pengembangan sistem informasi pasar • Pengembangan SDM melalui SL-PPHP	Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Lampung, Sulsel, Papua, Kalbar
Susu (50% substitusi impor)	• Penerapan SNI wajib • Pengembangan pengolahan susu pasteurisasi, UHT, yoghurt, susu bubuk, susu kental manis, makanan olahan dari susu dan keju) • Penerapan HACCP, GHP, GMP. • Kebijakan importasi susu	Bengkulu, Jabar, DIY, Jateng, Jatim, Sulsel

	• Kebijakan pembiayaan • Kebijakan Insentif industri dalam negeri • Pengembangan kemitraan dengan pola cluster • Pengembangan promosi • Pengembangan sistem informasi pasar • Pengembangan SDM melalui SL-PPHP	
--	---	--

Lampiran 49.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, 2010-2014

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
1	<u>Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing</u>	Peningkatan inovasi dan adopsi teknologi pertanian	► Inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan, dan produk olahan (paket)	98	117	140	168	200
			► Inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya pertanian (paket)	35	35	35	35	35
			► Rekomendasi kebijakan pertanian (paket)	33	33	33	33	33
			► Adopsi inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan dan produk olahan (propinsi)	32	32	32	32	32
1.1	Dukungan manajemen, fasilitasi dan instrumen teknis dalam pelaksanaan kegiatan litbang pertanian	Pengembangan manajemen perencanaan program dan anggaran, kerjasama, pengelolaan sumberdaya, dan hasil litbang pertanian	► Jumlah paket dokumen perencanaan program, anggaran, dan laporan pelaksanaan program/ kegiatan litbang seluruh Satker Badan Litbang Pertanian	65	65	65	65	65
			► Jumlah judul kerjasama kemitraan, sinergi penelitian pertanian, dan pemanfaatan hasil dengan Perguruan Tinggi	200	200	200	150	150
			► Jumlah sertifikat paten untuk dilindungi, promosi teknologi litbang, dan naskah perjanjian kerja sama lisensi	20	40	60	80	100
1.2	Penelitian dan pengembangan tanaman pangan	Penyediaan benih sumber dan varietas sangat genjah, pendampingan SLPTT dan peningkatan inovasi teknologi tanaman pangan mendukung P2BN	► Jumlah varietas sangat genjah dan unggul baru padi, sereal, kacang-kacangan & umbi-umbian	5-6	5-7	8-9	10-12	14-15
			► Jumlah teknologi budidaya, panen dan pasca panen primer	5	5	8	7	8
			► Jumlah akses sumberdaya genetik (SDG) padi, sereal, kacang-kacangan dan umbi-umbian terkoleksi, teridentifikasi dan terkonservasi untuk perbaikan sifat varietas	800	800	800	800	800

Lampiran 49.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, 2010-2014

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
			► Jumlah produksi benih sumber (BS, FS) padi, sereal, kacang-kacangan & umbi-umbian dengan SMM ISO 9001-2000 dari 100 varietas tanaman pangan	BS 10 ton FS 20 ton	BS 10 ton FS 20 ton	BS 15 ton FS 20 ton	BS 15 ton FS 20 ton	BS 15 ton FS 20 ton
			► Jumlah penelitian konsorsium padi, kedelai, dan gandum	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg
1.3	Penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura	Meningkatnya inovasi teknologi tan.hortikultura mendukung pengembangan kawasan hortikultura	► Jml VUB yg diminati konsumen	40	131	235	414	1032
			► Jumlah PN yang terkonservasi dan terkarakterisasi	20 Bw, 455 acc, 3925	600 acc 3978	600 acc 4020	600 acc 4060	600 acc 4100
			► Jml benih sumber :					
			• Sayuran	20.000 GO 20 ton	22.000 GO 25 ton	24.000 GO 16 ton	26.000 GO 35 ton	28.000 GO 40 ton
			• VUB buah tropik dan sub tropik	14335 batang (15 var)	15035 batang (5 var)	16000 batang (2 var)	17200 batang (3 var)	18700 batang (2 var)
			• Akses mutasi buah trop	960	960	960	960	960
			• Planlet, benih, stek tan. Hias	151800; 30 var	202400; 30 var	253100	253700	254000
			• Jumlah benih bt bwh dan bt atas hsl SE	100,000	500,000	1,000,000	2,500,000	5,000,000
1.4	Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan	Peningkatan inovasi tek. tan. perkebunan untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan nilai tambah tanaman perkebunan	► Jumlah teknologi budidaya produksi hortikultura ramah lingkungan	12	12	12	12	12
			► Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan	10 var;	10 var;	10 var;	12 var;	15 var;
			Penyediaan jumlah bibit kakao (batang) melalui teknologi SE mendukung Gernas Kakao	10 juta bibit	15 juta bibit	15 juta bibit	20 juta bibit	20 juta bibit
			► Jumlah teknologi untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	42	47	47	52	52
			► Jumlah produk olahan tanaman perkebunan	20	24	24	29	33
			► Jumlah penelitian konsorsium kelapa sawit, kakao, dan jarak pagar	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg

Lampiran 49.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, 2010-2014

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
1.5	Penelitian dan pengembangan peternakan dan veteriner	Meningkatkan Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Program Percepatan Produksi Swasembada Daging Sapi (P2SDS)	► Jumlah rekomendasi pembangunan peternakan dan veteriner, diseminasi, promosi, publikasi hasil penelitian dan koordinasi dengan stakeholders	10	10	10	10	10
			► Jumlah SDG peternakan, TPT dan veteriner yang dikonservasi dan dikarakterisasi	112	112	112	112	112
			► Jumlah galur (bangsa) baru ternak dan TPT spesifik lokasi	6	6	8	8	8
			► Jumlah inovasi peternakan berupa <i>twinning technology</i> , aplikasi TPT murah dan teknologi veteriner (teknologi diagnosis, vaksin, epidemiologi, dan strategi pengendalian penyakit hewan strategis) yang dihasilkan dan didesiminasikan kepada pengguna	22	24	22	22	25
			► Jumlah penelitian konsorsium sapi perah dan sapi potong	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg
1.6	Penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	Hasil penelitian/analisis sosial ekonomi dan rekomendasi kebijakan pertanian	Jumlah rekomendasi kebijakan tentang • Penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian; • Pengelolaan sumberdaya pert. & pembangunan infrastruktur pert.; • Pengembangan kelembagaan dan peraturan mendorong iklim usaha yg kondusif; • Makro ekonomi mendorong pertumbuhan sektor pertanian; • Pembangunan pert.& perdesaan • Konsorsium karakteristik sosek petani padi	12	12	12	12	12

Lampiran 49.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, 2010-2014

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
1.7	Pengembangan perpustakaan dan penyebaran teknologi pertanian	Meningkatnyapenyebaran teknologi hasil litbang pertanian mendukung ketahanan dan kemandirian pangan	► Jumlah judul jurnal primer dan publikasi bibliografis	13 Jdl	13 Jdl	13 Jdl	13 Jdl	13 Jdl
			► Jumlah perpustakaan yang dibina dan ditata	65 UK/UPT	65 UK/UPT	65 UK/UPT	65 UK/UPT	65 UK/UPT
			► Jumlah tambahan koleksi	30 jdl / 3 dtbase	35 jdl / 4 dtbase	40 judul / 4 dtbase	45 judul / 4 dtbase	50 jdl / 4 dtbase
			► Jumlah kegiatan diseminasi dan perpustakaan	8 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg
1.8	Penelitian/perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian	Meningkatnya inovasi dan adopsi teknologi mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktifitas, efisiensi dan nilai tambah produk pertanian dan limbahnya	► Inovasi teknologi dan sistem mekanisasi pertanian untuk peningkatan; produktivitas, efisiensi, kualitas, nilai tambah komoditas utama pertanian dan limbahnya	4	4	4	4	4
			► Kerjasama litbang mektan, konsorsium alsintan serta bahan rekomendasi kebijakan (paket)	3	3	3	3	3
			► Prototipe alsin yang didiseminasikan (Paket)	1	1	1	1	1
1.9	Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian	Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian	► Tersedianya peta potensi sumberdaya lahan pertanian terlantar	2,5 juta ha di Sulawesi dan daerah lainnya	2,5 juta ha di Sulawesi, NT & lainnya	3,5 juta ha di Maluku dan Papua	3,5 juta ha di Papua, dan daerah lainnya	3,5 juta ha di Papua, di daerah lainnya
			► Jumlah informasi, paket komponen teknologi pengelolaan SDL (lahan kering, lahan sawah, rawa, pasang surut, air, formula pupuk dan pembenah tanah, dan lingkungan pertanian)	9 paket	9 paket	9 paket	8 paket	8 paket
			► Jumlah informasi, pengelolaan sumberdaya iklim & air, model prediksi bencana pertanian serta paket komponen teknologi perubahan iklim global, mitigasi dan adaptasinya terhadap sektor pertanian	3 paket; 1 model prediksi bencana pertanian; 1 peta kalender tanam	3 paket; 2 model prediksi bencana pertanian; 1 peta kalender tanam	3 paket; 2 model pengelolaan SDA; 1 peta kalender tanam	3 paket; 2 model pengelolaan SDA; 1 peta kalender tanam	3 paket; 2 model pengelolaan SDA; 1 peta kalender tanam
			► Jumlah rekomendasi kebijakan penanganan perubahan iklim, dan konsorsium pengelolaan perubahan iklim dan lahan kering	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket

Lampiran 49.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, 2010-2014

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
1.10	Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian	Peningkatan inovasi dan adopsi hasil bioteknologi dan pemanfaatan sumberdaya genetik pertanian (SDGP) untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing produk pertanian	► Jumlah akses SDGP dan database yang dikonservasi atau diremajakan	2250 akses SDGP; 4 database	2250 akses SDGP; 4 database	2250 akses SDGP; 4 database	2250 akses SDGP; 4 database	2250 akses SDGP; 4 database
			► Jumlah varietas unggul atau galur harapan padi, kedelai, dan jagung berproduktivitas tinggi dan berumur genjah melalui somatik embriogenesis, <i>genom sequencing</i>	51 galur kedelai dan padi; 3 populasi baru padi; 6 galur transgenik	Keragaman 50 galur kedelai; 1 varietas padi unggul; Galur baru padi; 5 Galur transgenik (FUT)	50 galur harapan kedelai; 2 galur harapan baru padi; Galur baru padi; 5 Galur transgenik (FUT)	Galur terpilih; 1 var. unggul padi baru; Galur baru terseleksi padi; 5 Galur transgenik (LUT)	Varietas unggul kedelai; Galur harapan baru padi; 5 Galur transgenik (LUT)
			► Jumlah galur harapan gandum tropis		Galur gandum transgenik mengandung gen <i>ZmDreb2A</i>	Galur gandum adaptif iklim hasil pengujian di FUT	Galur gandum adaptif iklim LUT	Galur gandum adaptif iklim LUT
			► Jumlah galur padi dan jagung efisien penggunaan pupuk sintetis	125 galur calon hibrida jagung unggul	20-35 galur hibrida jagung adaptif kondisi pupuk rendah	8-10 galur hibrida jagung harapan dan padi harapan	2 Galur harapan jagung hibrida dan padi transgenik	2-4 varietas unggul hibrida jagung; Galur padi transgenik
			► Jumlah biofertilizer untuk padi dan tebu	20 isolat potensial biofertilizer	20 isolat potensial biofertilizer	3 formula bahan pembawa	2 biofertilizer padi	1 biofertilizer tebu
			► Jumlah tanaman manggis dan durian tanpa biji	2 metode regenerasi dan transformasi	2 metode transformasi dan perbanyakan	2 jenis tanaman transgenik putatif	2 jenis tanaman transgenik	Bahan sambungan
			► Jumlah peta gen sifat-sifat penting pada kelapa sawit, jarak pagar dan sapi	7 sekuens whole genom	258 sekuens DNA target	3 sistem kit dan peta gen		

Lampiran 49.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, 2010-2014

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
			► Jumlah klon gen pengendali sifat toleran kekeringan, produktivitas dan umur genjah	3 mutan biologi padi terseleksi; 3 klon gen faktor transkripsi; 3 transkrip cDNA	3 klon gen target kandidat; 3 gen faktor transkripsi; 3 konstruksi cDNA	6 gen target fungsional; 3 gen faktor transkripsi fungsional		
1.11	Penelitian dan pengembangan pasca panen pertanian	Meningkatnya inovasi teknologi pascapanen dan pengembangan produk hasil pertanian	► Jumlah teknologi penanganan segar produk hortikultura dan daging	5	4	4	4	2
			► Jumlah produk diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor	6	6	6	6	8
			► Jumlah produk pengembangan/ product development untuk peningkatan nilai tambah	2	4	6	8	10
1.12	Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian	Pengembangan teknologi pertanian serta pembinaan dan koordinasi kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian	► Jumlah koordinasi penyusunan penganggaran, pelaksanaan dan monev kegiatan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian	10 koordinasi	10 koordinasi	10 koordinasi	10 koordinasi	10 koordinasi
			► Jumlah advokasi teknis, pendampingan, dan kebijakan operasional pembangunan pertanian wilayah, regional, dan nasional (termasuk PUAP)	34 advokasi	69 advokasi	69advokasi	69 advokasi	69 advokasi
			► Jumlah adaptasi teknologi spesifik lokasi	64 teknologi	96 teknologi	96 teknologi	96 teknologi	96 teknologi
			► Jumlah diseminasi inovasi pertanian	329 kegiatan	446 kegiatan	446 kegiatan	446 kegiatan	446 kegiatan